

PERAN PEMUDA STARTUP DALAM MENDORONG EKONOMI DAERAH: SEBUAH PENELITIAN GROUNDED THEORY

Ahmad Dahlan

Sekolah Pascasarjana Pengembangan dan Perencanaan Wilayah, Universitas Hasanuddin
Email: anakgombara@gmail.com

Ahmad Munir

Sekolah Pascasarjana Pengembangan dan Perencanaan Wilayah, Universitas Hasanuddin
email: amunir1963@icloud.com

Muslim Salam

Sekolah Pascasarjana Pengembangan dan Perencanaan Wilayah, Universitas Hasanuddin
email: muslimsal@yahoo.com

Abstract

The main focus of this research was to see the role of young startups in the local economy. This research was qualitative using grounded theory. The choice of this method was based on the purpose of the research being carried out, which was to build a theory based on data obtained from young startup participants in seeing job opportunities open up and improving community welfare. The steps taken to obtain data were interviews, observation, and document review. The data was analyzed based on the constructivism data analysis model in the form of data transcription and data interpretation through open coding, axial coding, and selective coding. Researchers using grounded theory were intended to explain the impact of the phenomenon of youth startups on the regional economy and unemployment which was extracted from information from participants, especially among young startups. The conclusion obtained from this research was that job opportunities will be opened to the community not only by using the theory "the more companies the more work opportunities" but also job opportunities will be opened to the community if companies or startups develop jobs that are in accordance with the social conditions of the community in an area.

Keywords: youth startup, grounded theory, regional economy

Abstrak

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat peranan pemuda startup terhadap ekonomi daerah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan grounded theory. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu membangun teori berdasarkan data yang didapatkan dari partisipan pemuda startup dalam melihat terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data adalah wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Data tersebut dianalisis berdasarkan model analisis data konstruktivisme berupa transkripsi data dan interpretasi data melalui pengkodean terbuka (open coding), pengkodean beralas (axial coding), dan pengkodean terseleksi (selective coding). Peneliti menggunakan grounded theory dimaksudkan untuk menjelaskan dampak fenomena pemuda startup terhadap perekonomian daerah dan pengangguran yang digali dari informasi para partisipan khususnya dikalangan pemuda startup. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kesempatan kerja akan terbuka bagi masyarakat tidak hanya menggunakan teori "semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja" namun, kesempatan kerja akan terbuka bagi masyarakat bila perusahaan atau startup mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat suatu daerah.

Kata Kunci: Pemuda startup, Grounded theory, Ekonomi daerah

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital tidak hanya difungsikan sebagai alat komunikasi, melainkan masyarakat juga melakukan banyak hal dengan terintegrasinya kecepatan internet. Melalui generasi muda, media sosial berkembang menjadi bisnis. Bentuknya beragam mulai berbisnis daring, *e-commerce*, atau dengan membangun startup berbasis teknologi digital yang diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar nantinya.

Kemajuan tersebut bagian dari transformasi digital yang telah mengubah masyarakat Indonesia menjadi salah satu negara aktif pengguna smartphone dan infrastruktur telekomunikasi internet. Berdasarkan data dari startup ranking hingga Maret 2018, Indonesia menempati urutan keempat dunia dalam hal jumlah startup. Amerika berada pada urutan pertama sekitar 28 ribu, India, 4.700, Inggris 3.000 dan Indonesia sekitar 1.720 startup (Menkominfo, 2018).

Beberapa negara telah menaruh perhatian terhadap kemajuan startup karena dianggap dapat menjadi solusi terhadap permasalahan pengangguran kaum muda masa kini. Jika mengacu pada agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia (TPT) sebesar 5,34 % (BPS, 2018). Untuk kaum muda sendiri, pada tingkat pendidikan kejuruan terdidik seperti untuk pendidikan tingkat SMK 11,24 %, SMA 7,95 %, Diploma 6,02 %, Universitas 5,89 %. Data tersebut membuktikan bahwa masih banyak usia produktif yang menjadi pengangguran yang perlu diperhatikan bersama.

Permasalahan pengangguran menjadi permasalahan klasik yang sampai pada saat ini terus menjadi permasalahan nasional. Pemerintah sendiri menargetkan angka pengangguran bisa turun ke level 3% hingga 4% pada 2024 melalui pengembangan ekosistem perusahaan rintisan atau startup. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pengembangan ini mulai dari investor

hingga sistem pemasaran produk. Program ini bertujuan agar banyak pekerjaan baru yang muncul, meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat. Fokusnya kepada berbagai sektor, sehingga kelompok rentan miskin bisa masuk ke dalam program untuk wirausaha.

Dapat dilihat dari data berikut, berdasar data Masyarakat Industri Kreatif Digital /TIK Indonesia (MIKTI) ada 992 startup di Indonesia yang telah terverifikasi. Dari startup tersebut jumlah karyawan yang dapat diserap, ada 1,90% startup mampu menyerap lebih dari 500 karyawan, 4,13 % startup mampu menyerap karyawan 201-500 karyawan, 12,38% menyerap 50-200 karyawan dan 88,25% menyerap kurang dari 50 karyawan (MIKTI, 2018). Ini menunjukkan bahwa peranan startup memberikan andil dalam permasalahan pengangguran yang ada.

Selain itu pengembangan startup juga menjadi daya pendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan regulasi serta infrastruktur dalam mendukung kemajuan perusahaan startup akan berbanding lurus naiknya sumber pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan rilis data BPS, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Indonesia pada 2018 sebesar 5,17 persen dengan sumbangan lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 0,38 persen (Saebani, 2019). Sehingga dengan meningkatkan jumlah startup, diprediksi LPE Indonesia juga akan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Misalnya pada bidang pertumbuhan toko transaksi online (*e-commerce*) menunjukkan peningkatan yang sangat cepat seiring dengan peningkatan penggunaan smartphone dan infrastruktur telekomunikasi internet. Hasil survei penelitian Indikator TIK oleh Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo tahun 2016 mencatat bahwa sebanyak 24,2% pengguna internet di Indonesia atau sekitar 19,5 juta penduduk Indonesia melakukan aktivitas *e-commerce*, itu artinya perputaran uang

dalam bisnis *e-commerce* cukup besar dari 500 perusahaan terdaftar *e-commerce* terpercaya yang ada di Kominfo. (Menkominfo, 2016)

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menyebutkan, transaksi *e-commerce* di Indonesia sepanjang 2018 lalu mencapai Rp 77,766 triliun. Angka ini meroket 151% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 30,942 triliun. Sementara untuk Januari 2019 saja, BI mencatat nilai transaksi di toko online angkanya mencapai Rp 8,204 triliun. Ini meningkat tinggi, yaitu 135,8% dibandingkan Januari 2018 lalu (Bank Indonesia, 2019). Dengan jumlah yang sedemikian tinggi tersebut, tentu *saja e-commerce* sebagai salah satu bidang pada startup menjadi solusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ini juga diharapkan mampu menjadi solusi terhadap peningkatan penghasilan masyarakat yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konteks Kota Makassar diketahui masih didominasi oleh penduduk yang berusia produktif, sehingga dapat menangkap peluang usaha startup. Para pelaku usaha startup dapat didorong dalam rangka memajukan perekonomian daerah dan turut berperan dalam pemerataan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam dunia usaha khususnya usaha startup di era digital saat ini.

Pemuda di Kota Makassar sendiri telah menikmati suasana kemajuan era industri 4.0. Percepatan dunia digital yang mempengaruhi sistem kehidupan mulai dari bangun hingga tidur kembali telah berdampak kepadanya. Ada yang memilih sebagai pelaku bisnis dan banyak juga sebagai konsumen. Ditengah kemajuan teknologi tentunya harus dimanfaatkan oleh pemuda mejadi pelaku-pelaku usaha di era digital saat ini.

Digital Innovation Longe (DILo) Makassar yang merupakan wadah atau tempat talent, startup & komunitas berkolaborasi membangun mimpi melalui dunia digital telah merilis data,

ada sekitar 3.452 orang yang telah menjadi member pada wadah tersebut untuk saling bertukar pikiran dalam mengembangkan bisnis startup di Makassar. Ini menunjukkan bahwa bisnis startup di Kota Makassar juga menjadi perhatian yang serius bagi generasi muda.

Namun permasalahan yang muncul khususnya di Kota Makassar adalah, Kota Makassar menjadi daerah kabupaten/kota tertinggi dalam tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Sabtu (7/12/2019), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2019 sebanyak 6.407.285 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.030.400 orang. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja (3.830.096 orang) dan pengangguran (200.304 orang). Dari data tersebut Kota Makassar menyumbang pengangguran mencapai angka 10,39%, setelahnya ada Kota Palopo 10,32%, Kota Parepare 6,42%, kabupaten Barru 5,79% dan Kabupaten Pangkep 5,41%. dari jumlah tersebut diketahui Makassar menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Sulawesi Selatan dari persentasi yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, data menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Kota Makassar mengalami peningkatan ditahun 2019, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menurut badan statistik mencapai 8,23 % mengalahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 7,07 % bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,15 % memunculkan persoalan baru.

Pendapatan per kapita Makassar yang menembus angka Rp 86,87 Juta per orang selama setahun terhitung tinggi dari kota-kota lain, namun tingkat kesenjangan juga ada pada angka 0,42 persen, angka itu juga tertinggi dibanding kota-kota lain. Jika dirata-ratakan perbulannya setiap warga Kota Makassar memiliki pendapatan sekitar Rp 7 juta/orang

dalam sebulan. Namun nyatanya hal demikian tidak terjadi secara riil di Kota Makassar yang menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar.

Seharusnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang merata, namun hal itu tak terjadi sebab tingginya angka kesenjangan. Olehnya itu perlu ada solusi terhadap permasalahan tersebut. Pemerintah seharusnya memanfaatkan potensi daerahnya termasuk kreatifitas anak muda yang membangun startup.

Dari pandangan ini diharapkan muncul ide-ide baru dalam dunia bisnis khususnya pada usaha rintisan atau startup yang didukung oleh pemerintah. Semakin banyaknya perusahaan rintisan yang muncul diharap mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dalam rangka menurunkan angka pengangguran yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemuda Startup

2.1.1 Pemuda

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Selain itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 juga menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab pemuda. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Lebih lanjut peran nyata pemuda dalam masyarakat adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan oleh pemuda di masyarakat (UU No. 40).

pemuda menjadi aset yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan suatu bangsa di masa depan.

Mempersiapkan kualitas pemuda saat ini akan memberikan jaminan terhadap terselenggaranya kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Pemuda harus disiapkan untuk selalu siap terhadap perubahan global yang dapat terjadi kapan saja (Scott, 2015).

Olehnya itu, kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan pemuda bahkan bukan saja untuk masa kini namun juga untuk masa depannya diantaranya kemampuan kreativitas. Disamping idealismenya anak muda memiliki daya imajinasi yang tinggi, sehingga anak muda bisa menjadikan bisnis startup sebagai lahan yang pas dalam hal aktualisasi diri. Tidak perlu lagi terpaut dengan peraturan dan ketentuan berkreasi yang terbatas saat terjun ke dunia pekerjaan konvensional. Inilah ajang mereka untuk memulai bisnis startup, ide cemerlang mereka kini memiliki wadah untuk berkembang. Dengan begitu, kreativitas yang diwujudkan bisa berguna untuk masyarakat luas.

2.1.2 Startup

Paul Graham mendefinisikan "*a startup is accompany designed to grow fast. The only essential thing is growth. Everything else we associate with start-ups follows from growth*" (Paul Graham, 2012). Maksudnya, startup adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan cepat. Satu-satunya hal yang esensial adalah pertumbuhan. Semua hal lain yang kami kaitkan dengan para pemula mengikuti pertumbuhan.

Defenisi lain tentang startup adalah "Bisnis startup merupakan suatu bisnis yang baru berkembang. Namun, bisnis startup ini lebih identik bisnis yang berbau teknologi, web, internet dan yang berhubungan dengan ranah tersebut". Startup bisnis, banyak yang mengartikan bahwa ini adalah sebuah system investasi bisnis yang akan menggerakkan bisnis secara otomatis. Namun startup itu lebih condong pada pembangunan sistem bisnis era digital yang mana mengkaitkan dengan dunia online. (Mudo, 2015).

Startup juga diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti tindakan atau proses memulai sebuah organisasi baru. Sederhannya, startup adalah sebuah bisnis rintisan. Istilah ini mulai dikenal setelah era internet. Faktornya adalah karena banyak perusahaan yang dimulai dari nol oleh satu atau beberapa orang saja kemudian menjadi besar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Startup adalah sebuah institusi yang diciptakan untuk membuat produk atau layanan baru dan inovatif dalam sebuah kondisi ketidakpastian yang tinggi (Kurniati, 2017).

Singkatnya, Startup adalah perusahaan atau bisnis yang belum lama terbentuk. Perusahaan ini biasanya masih dalam proses pengembangan dan riset untuk menemukan pasar yang tepat. Sehingga Startup tersebut dalam upaya pembentukan organisasi berbentuk perusahaan baru dalam bidang bisnis berbasis teknologi jaringan atau web dengan menghasilkan suatu produk yang inovatif.

2.1.3 Pemuda Startup

Dari beberapa penjabaran sebelumnya tentang pemuda dan startup dapat disimpulkan bahwa pemuda startup adalah satu identitas yang potensial yang merintis sebuah sistem bisnis digital dari nol dan mengembangkannya melalui media online.

Jika peran pemuda dalam dunia digital dikembangkan akan berdampak terhadap kemajuan hidup umat manusia secara umum dan juga bangsa. Contohnya adalah Facebook. Facebook merupakan salah satu cerita sukses dari kalangan anak muda yang memulai dari startup. Dia adalah Mark Zuckerberg dan kawan-kawannya. Facebook adalah jejaring sosial paling populer di dunia, pada Februari 2004 hingga saat sekarang ini mampu dirasakan manfaatnya oleh umat manusia dari berbagai negara.

Sementara di Indonesia Nadhim Makarim adalah sosok yang sangat fenomenal setelah mendirikan Gojek. Dia telah menciptakan perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbagai daring. Bisnisnya telah menjadi Unicorn

bahkan Decacorn pertama di Indonesia diusianya yang masih tergolong muda.

Artinya bisnis digital dalam bentuk startup banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Anak muda kreatif yang mampu melihat peluang dan masa depan dunia industri yang diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi dimasa-masa yang akan datang.

2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Selain itu, pembangunan ekonomi bermakna suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi (Sirojuzilam, 2008).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya pemerintah daerah dan masyarakatnya secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah dalam mengurangi angka pengangguran, menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dalam rangka mendorong ekonomi suatu daerah. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam

upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara berama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

2.3 Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Daerah

Menurut Hanly Fendy Djohar Siwu seorang pengajar disalah satu universitas di Indonesia mengatakan bahwa, Saat ini tidak suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial yang dapat membantu kita untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

1.) Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

2.) Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang

kerja (job creation). Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut. Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

2.4 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara umum tujuan strategi pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah lebih untuk memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik para pekerja baru. Kedua, mencapai stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha (misalnya: lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat. Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yaitu:

1.) Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan

pembangunan industri pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik/lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki basis pesona (amenity base) atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah.

2.) Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Beberapa alat untuk mengembangkan dunia usaha ini yakni: • Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan. • Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan, terutama mengetahui masalah perijinan, rencana pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah, ketersediaan lahan, ijin mendirikan bangunan, dan sebagainya • Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Selain peranannya yang penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan kewirausahaan, usaha kecil sering kali mengalami kegagalan atau tidak dapat berkembang dengan baik. Faktor penyebab utamanya adalah jeleknya manajemen usaha kecil. Oleh karena itu, perlu didirikannya suatu pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil yang siap untuk membantu para pengusaha kecil tersebut sehingga kinerjanya meningkat. • Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya

saing terhadap produk-produk impor, dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis. • Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Peningkatan persaingan di dunia yang berbasis ilmu pengetahuan sekarang ini menuntut pelaku bisnis dan pemerintah daerah untuk secara terus menerus melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, pengembangan teknologi baru, dan pencarian pasar- pasar baru. • Dan sebagainya.

3.) Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: • Pelatihan dengan sistem customized training. Sistem pelatihan seperti ini adalah sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja. • Pembuatan bank keahlian (skillbanks). Informasi yang ada pada bank keahlian berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di suatu daerah. Informasi ini bermanfaat bagi pengembangan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan para penganggur tersebut. Selain itu, informasi ini juga merupakan informasi cadangan keahlian yang pada akhirnya dapat juga diunakan untuk mengisi lowongan-lowongan kerja yang muncul di daerah tersebut. Pada akhirnya, bank keahlian ini dapat juga digunakan untuk pembentukan koperasi. • Penciptaan iklim yang mendukung bagi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan ketrampilan (LPK) di daerah. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan ketrampilan di suatu daerah secara tidak langsung bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah tersebut. Misalnya: lembaga kursus bahasa, lembaga kursus komputer, lembaga kursus perbengkelan, dan lembaga

kursus perhotelan, dan sebagainya. • pengembangan lembaga pelatihan bagi penyandang cacat. Hal ini penting bagi si penyandang cacat itu sendiri untuk meningkatkan rasa harga diri dan percaya dirinya. Selain itu, untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu kadang-kadang penyandang cacat mempunyai beberapa kelebihan. • Dan sebagainya.

4.) Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang ini sering juga dikenal dengan istilah kegiatan pemberdayaan (empowerment) masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang marak di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk

2.5 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi Daerah Secara Kualitatif

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah juga dapat dilakukan secara kualitatif. Pengamatan pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan pendekatan dari tiga aspek berikut:

1) Tingkat kesejahteraan masyarakat

Masyarakat yang sejahtera dan memiliki taraf hidup yang baik cenderung dapat menjadi konsumen potensial, sehingga berpotensi menjadi sumber konsumsi produk di suatu daerah. Peningkatan konsumsi produk, baik itu hasil barang, jasa, maupun industri dari daerah adalah satu diantara tolak ukur untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak hasil produksi yang dikonsumsi menunjukkan masyarakat mampu untuk menunjang kehidupannya.

2) Sumber produksi

Banyaknya konsumsi hasil produksi lokal juga harus diimbangi dengan banyaknya penawaran dari produk lokal itu sendiri. Tingkat konsumsi yang tinggi

tidak ada apa-apanya apabila produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk impor. Oleh karena itulah, inovasi juga harus seringkali dilakukan untuk mempertahankan produk dalam negeri agar tidak terasing di negeri sendiri.

Bukan hanya inovasi, penggunaan teknologi juga dinilai sebagai satu diantara kesuksesan dari suatu negara untuk mengembangkan sektor produksinya. Penggunaan teknologi dalam produksi jasa dan industri menunjukkan bahwa tenaga kerja dan pengembangan produk dari negara tersebut sudah memiliki kapabilitas yang mencukupi untuk melibatkan hal-hal baru dari segi industrinya.

3) Pendapatan Daerah

Sebagai faktor utama yang dihitung dalam rumus, harus ada bukti konkrit bahwa pendapatan daerah lebih tinggi daripada pendapatan pada periode sebelumnya. Jika disinyalir adanya kemunduran dalam aspek produksi dan penghasilan, maka sudah jelas bahwa laju pertumbuhan ekonomi menurun.

2.6 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan ekonomi, merupakan kondisi dimana masyarakat dalam kehidupan yang baik, terpenuhi kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan sosial, serta terjamin dari segi keamanan (Suciati, dkk, 2012). Sedangkan menurut Poerwadarmita kesejahteraan adalah 'aman, sentosa, dan makmur'. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi kemandirian, keselamatan dan kemakmuran (Sururi Ahmad, 2017).

Menurut Segel dan Bruzy "Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat". Dalam arti sempit, kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan, yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk

mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja (Sururi Ahmad, 2017). Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat memiliki arti kepada keadaan yang baik dari keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kemakmuran, banyak orang.

Dalam mencapai kesejahteraan kita perlu memperhatikan indikator kesejahteraan. Adapun indikator tersebut di antaranya adalah: Pertama: jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi. Kedua: pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka (Kompasiana, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode grounded theory. Barney Glaser dan Anselm Strauss pada tahun 1967 dalam bukunya *"The Discovery of Grounded*

Theory" menyebutkan bahwa penelitian ini merupakan salah satu pendekatan penelitian yang dikembangkan dalam bingkai methodology kualitatif sebagai upaya membangun dan atau menemukan suatu teori. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu membangun teori berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview). Responden adalah pelaku usaha startup khususnya kalangan pemuda yang ada di Kota Makassar.

Sampel yang digunakan adalah sampel teoritis, yaitu menentukan sampel berdasarkan kepentingan peneliti untuk menemukan suatu teori. Sampel dalam penelitian ini adalah partisipan sebagai sumber data dikalangan pemuda startup. Selain melalui wawancara, data diperoleh berdasarkan observasi dan kajian dokumen. Data tersebut dianalisis berdasarkan model analisis data konstruktivisme dengan melalui transkripsi data, interpretasi data melalui pengkodean terbuka (open coding), pengkodean beralas (axial coding), dan pengkodean terseleksi (selective coding). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: • Tahap 1: Membuat transkrip hasil wawancara yang disusun per pertanyaan sesuai dengan jawaban dari responden. • Tahap 2: Peneliti mencari makna dalam beragam kata dari responden untuk menentukan kategori. • Tahap 3: Membuat coding, yaitu: 1) open coding; 2) axial coding; dan 3) selective coding. • Pembentukan teori dilakukan dengan membuat analisis data komparatif berdasarkan tematis dan kategori inti yang dihasilkan dari proses pengkodean, dan komparasi berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membangun teori, Peneliti menggunakan metode Grounded theory untuk menjelaskan atau memahami suatu proses, dalam hal ini untuk memahami

teori tentang peranan pemuda startup yang dibangun dari pikiran, pengalaman, dan kegiatan mereka dalam menjalankan usaha dan dampaknya terhadap ekonomi daerah di Kota Makassar.

Dalam menjawab peranan tersebut peneliti mengumpulkan data dari wawancara mendalam, dan bila ada data yang dibutuhkan lagi maka peneliti melakukan wawancara lanjutan dan mengolahnya dengan menggunakan pendekatan *Open Coding*, *Axial Coding* dan *selective coding*,

4.1 Open Coding

Dalam tahap *open coding*, peneliti mempelajari transkrip wawancara, catatan lapangan, dan untuk memperoleh kategori informasi yang menonjol yang didukung oleh pengumpulan data tersebut. Peneliti berusaha menjenuhkan kategori, tujuannya adalah untuk menyajikan kategori itu dengan terus mengamati dan mewawancarai hingga informasi baru yang diperoleh tidak menyediakan pemahaman lebih lanjut ke dalam kategori itu. Kategori tersusun dari sebuah konsep hingga melahirkan beberapa sub kategori yang menyajikan beragam perspektif tentang kategori tersebut. Ini merupakan proses mereduksi data menjadi serangkaian kecil tema atau kategori yang mencirikan proses atau aksi yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

Berikut adalah *open coding* dari wawancara peneliti dengan pemuda startup.

Tabel 1. *Open Coding* Wawancara

No	KATEGORI	SUB KATEGORI	KODE
1.	Platform Usaha	startup penyedia	P3
		aneka jasa <i>on demand service</i>	P18 P44 P60
		berbasis socio entrepreneur	
		startup <i>E-commerce</i>	P33 P106
		startup pada bidang Kemanusiaan	P94
2.	Latar belakang mendirikan sebuah usaha	Memulai usaha	P1
		dikarenakan faktor	P112
		permasalahan sosial	P59
		dalam	P84
		memberdayakan masyarakat	P135 P105 P45
prasejahter melalui wirausaha sosial.			

		Memulai usaha dikarenakan faktor profit dan peluang usaha	P35 P19 P74
3.	Permasalahan dalam sebuah usaha	Paradigma masyarakat terhadap usaha yang baru tergolong lemah	P7 P138
		Ekosistem startup belum terbangun dengan baik	P77 P47
		Memiliki modal bisnis yang tidak jelas	P88
		Kerjasam Tim yang kurang solid	P22 P116
4.	Tindakan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha	Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas aplikasi	P4
		Membangun kepercayaan	P21
		Memperbanyak jaringan	P50 P61 P91
		Melakukan analisis dan pengkajian terhadap pasar dan peluang usaha	119 P140 P34
		Dalam mengembangkan usaha startup harus melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak ketiga.	P24
	Penghasilan perusahaan dan upah mitra/karyawan startup	Usaha Startup mampu meningkatkan omzet dari tahun ketahun.	P25 P38 P52 P67 P142
		Masyarakat prasejahtera yang menjadi mitra pada startup on demand service berbasis sociopreneur mampu menghasilkan penghasilan sesuai upah minimum kota makassar	P15 P71 P83 P148
		Penghasilan pada e_commerce di atas upah minimum	P42
		Karyawan yang bekerja pada startup sudah mendapatkan upah diatas upah minimum	P56 P101
	Perekrutan mitra dan karyawan	perkrutan karyawan dengan cara mengajak kenalan	P10
		perekrutan karyawan dan mitra dengan cara open recruitment	P96
		Sistem perekrutan karyawan dan tim dengan melihat kesamaan visi	P124

Jumlah mitra dan karyawan	Platform startup penyedia aneka jasa <i>on demand service</i> berbasis sociopreneur memiliki sedikit karyawan/tim sekitar 3-7 orang namun mampu mengurangi pengangguran dan membuka luas lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin mejadi mitra.	P12 P68 P53 P81 P125 144
	Untuk saat ini Platform startup E-commerce dan kemanusiaan masih memiliki sedikit karyawan/tim	P27 P97 P109
	Dengan adanya startup para pekerja mendapatkan pekerjaan yang jelas dan terukur penghasilannya.	P11 P82 P69 P110 P145
	Startup mampu membuka peluang kerja baru bagi orang yang punya kapasitas pada bidang tertentu namun terbatas oleh lapangan kerja yang tersedia.	P28 P54 P126
Tingkat usia mitra/karyawan	Pekerja atau mitra pada startup pada umumnya berada pada pada usia yang tergolong muda	P13
	Pekerja atau mitra pada startup on demand service kelas menengah kebawah berada pada usia 30-50 tahun	P13
Latar belakang pendidikan	Masyarakat yang latar belakang pendidikannya rendah mendapatkan pekerjaan yang jelas dan terukur penghasilannya	P14 P72 P82 P145
	Startup mampu membuka peluang kerja baru bagi orang yang berpendidikan tinggi namun terbatas oleh lapangan kerja terbatas.	P29 102 P130
Harapan masadepan	Rata-rata dari startup berkeinginan untuk melakukan penguatan brand dan peningkatan kualitas aplikasi untuk	P17 P58 P104 P73 P149 P31

		melakukan ekspansi ke seluruh daerah yang ada di Indonesia.	P43
--	--	---	-----

Peneliti menggunakan pendekatan Strauss untuk menjamin bahwa teori yang dihasilkan tidak tercampuri oleh teori-teori lain, maka digunakan open coding untuk menghasilkan kategori-kategori yang berasal dari data-data empiris. Kategori ditemukan dari analisis data awal mejadi sebuah konsep dengan membandingkan kode-kode yang telah ditemukan, dan mencari kemiripan (commonality), perbedaan, dan konsistensi dari kode-kode tersebut. Dari susunan tersebut lahirlah beberapa konsep lalu mebandingkannya dengan indikator indikator yang ada sehingga lahirlah beberapa sub kategori yang sesuai. Selanjutnya proses pembentukan kategori dilakukan dengan menyusun data sesuai dengan sifat dan ukurannya. Ketika serangkaian kategori telah dikembangkan, peneliti kemudian mengidentifikasi kategori tunggal dari daftar open coding sebagai fenomena sentralnya. Kategori tersebut adalah kategori yang banyak dibahas oleh para partisipan, dalam hal ini adalah faktor mendirikan usaha, tantangan, tindakan yang dilakukan dalam mengatasi masalah, penghasilan, jumlah mitra/karyawan, latar belakang pendidikan dan pekerjaan dan harapan masa depan.

4.2 Axial Coding

Setelah melakukan open coding, peneliti melakukan axial coding yaitu pemetaan terhadap gagasan utama. Dalam proses axial coding, peneliti mengulas data untuk menyediakan pengetahuan tentang pengodean kategori spesifik yang berkaitan dengan atau menjelaskan fenomena sentral. Informasi dari tahap axial coding ini kemudian diorganisasikan kedalam bagan yang menampilkan model teoritis dari proses usaha rintisan (startup) dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka pengangguran.

2.	Lapangan Kerja	dengan memanfaatkan digitalisasi. Beberapa startup lahir dari kegelisahan terhadap permasalahan pribadi dan sosial	6.	Peluang kerja	namun juga memberikan dampak positif bagi penghasilan masyarakat. Startup <i>on demand service</i> berbasis <i>sociopreneur</i> tidak hanya
3.	Kolaborasi	Rata-rata Bisnis startup dikelola oleh sejumlah orang namun startup <i>on demand service</i> berbasis <i>sociopreneur</i> mampu mempekerjakan masyarakat hingga ratusan pekerja sebagai mitra Tim yang dibentuk oleh startup berasal dari kenalan atau teman. Kolaborasi adalah cara untuk mempercepat tumbuhnya sebuah usaha	7.	Fleksibilitas	mempekerjakan masyarakat yang berpendidikan tinggi namun juga dapat mempekerjakan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah Perkembangan teknologi mampu dimanfaatkan oleh anak muda dalam membuka lapangan pekerjaan. Membangun startup digital tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu namun segala sesuatunya bisa dilakukan kapanpun hingga mampu merambah ke berbagai daerah lainnya.
4.	Penghasilan	Masyarakat yang menjadi mitra pada sebuah startup khususnya yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari sebelumnya terutama pada kalanga masyarakat prasejahter dengan tingkat pendidikan yang rendah			
5.	Simbiosis Mutualisme	Jenis Startup <i>on demand service</i> berbasis <i>sociopreneur</i> tidak hanya menghasilkan profit bagi perusahaannya			

4.4 Peran Pemuda Startup Terhadap Perekoniman Daerah

Pada umumnya startup hanya didirikan oleh segelintir orang namun mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ada banyak faktor yang melatar belakangi sehingga pemuda merintis suatu usaha diantaranya adalah faktor permasalahan sosial, kondisi masyarakat setempat, pengalaman pribadi, alasan profit dan juga permasalahan layanan publik. Sehingga dengan kreatifitas pemuda lahirlah sebuah startup dari berbagai sektor diantaranya adalah *e-commerce*, jasa layanan publik, dan Jasa layanan (*on demand service*) berbasis *sociopreneur*.

Dari berbagai jenis startup diatas peneliti menemukan startup pada jenis *on*

demand service berbasis *sociopreneur* (Mallsampah, Baruna Ocean, CleanUp, Helper dan Perawat.Id) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bila dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Rata-rata startup tersebut mendirikan usaha karena dilatar belakangi oleh permasalahan sosial dan kondisi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Diantara permasalahan tersebut adalah adanya pengangguran, hilangnya mata pencaharian seorang nelayan, penarik beca, pengepul sampah, picker sampah dan lain sebagainya.

Selain itu mereka melihat pentingnya pemberdayaan masyarakat dengan sistem kolaborasi dengan masyarakat yang mereka sebut dengan istilah mitra. sehingga meski startup tersebut dikelola oleh segelintir orang namun terjadi simbiosis mutualisme antara perusahaan dan mitra kerja. Dimana perusahaan mendapatkan profit sedangkan mitra mendapatkan penghasilan yang tinggi dan pekerjaan yang terukur.

Startup *on demand service* berbasis *sociopreneur* selain mendapatkan omzet yang meningkat setiap tahunnya, para mitra juga mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Makassar yakni Rp 2.941.270. Misalnya saja para mitra yang bekerja pada startup Mallsampah rata-rata penghasilan mereka adalah 3 sampai 5 juta dalam sebulan. Selain itu masyarakat pesisir pantai yang bergabung dengan mitra Baruna Ocean mendapatkan penghasilan 2.7 sampai 3 juta dalam sebulan. Dimana mereka dahulunya adalah para nelayan yang kehilangan mata pencaharian. Namun setelah mereka terdaftar sebagai mitra mereka mendapatkan edukasi dalam pengelolaan sampah.

Contoh lain adalah para picker sampah yang bergabung dengan startup Cleanup dimana sebelum mereka bergabung sebagai mitra, pendapatan mereka hanya 800 ribu dalam sebulan. Namun setelah bergabung sebagai mitra pada startup tersebut, mereka bisa

mendapatkan penghasilan hingga 3 juta dalam sebulan. Ini membuktikan bahwa dengan bergabungnya mereka dengan startup sebagai mitra maka kesejahteraan mereka dapat meningkat.

Pada aspek pengadaan lapangan kerja, mitra yang bergabung dengan startup on demand service berbasis *sociopreneur* jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun. Misalnya pada startup Mallsampah jumlah mitra pada tahun 2016 hanya 16 mitra, meningkat menjadi 50 mitra pada tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat menjadi 100 mitra, pada tahun 2019 meningkat menjadi 150 mitra dan pada tahun 2020 sudah mempekerjakan 200-an mitra. Untuk mitra Baruna Ocean sudah mencapai ratusan mitra meski startup ini masih berusia satu tahun. Sedangkan mitra yang bergabung dalam startup Helper sudah mencapai ratusan dalam usia 1 tahun juga. Contoh lain adalah mitra Perawat.Id sejak berdirinya pada tahun 2017 telah memiliki 300-an mitra hingga saat ini. Ini menunjukkan tiap tahun mitra startup pada sektor on demand service berbasis *sociopreneur* mengalami peningkatan.

Sehingga dari data yang didapatkan pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pemuda startup berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja yang luas dengan melihat dari kondisi dan permasalahan sosial yang terjadi ditengah tengah masyarakat.

Startup tersebut mampu mempekerjakan berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda beda. Dimana Startup tersebut menjadi platform yang dapat mempekerjakan seseorang dari berbagai usaha rintisan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga dengan cepat mampu meberdayakan masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas. Banyak startup seperti ini mampu mempekerjakan masyarakat pekerja sektor informal dan bahkan pengangguran dengan latar pendidikan yang rendah.

Maka teori yang dapat ditarik oleh peneliti adalah kesejahteraan dan Kesempatan kerja akan terbuka bagi masyarakat tidak hanya menggunakan teori “semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja” namun kesempatan kerja akan terbuka bagi masyarakat bila perusahaan atau startup membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi permasalahan sosial masyarakat suatu daerah. Teori ini sifatnya substantif, dimana hanya berlaku di wilayah tempat penelitian ini dilakukannya, namun tidak menutup kemungkinan dapat kita kembangkan menjadi teori formal.

5. PENUTUP

Penelitian *grounded theory* merupakan penelitian yang menggunakan analisis yang detil. *Grounded theory* terdiri dari tiga fase pengodean, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Penelitian ini juga memberikan pelajaran penting bahwa startup sebagai usaha masa depan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Teori yang muncul dalam penelitian ini adalah Kesempatan kerja akan terbuka bagi masyarakat tidak hanya menggunakan teori “semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja” namun kesempatan kerja akan terbuka bagi masyarakat bila perusahaan atau startup mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan: Edisi Ke-5*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Bank Indonesia. (2019). *Transaksi e-Commerce RI 2018 Capai Rp 77 T, Lompat 151%*. (online). cnbcindonesia.com. Diakses 11 Maret 2019.
- Budiasih, I. G. (2014). *Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif*. Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 23
- Charmaz, K. (2006). *Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis*. London: SAGE Publications
- Denscombe, Martyn. 2003. *The Good Research Guide*, 2nd ed. Philadelphia: Open University Press, 2003, 109-10.
- Kominfo. (2016). *Balitbang SDM Bahas Hasil Kajian Indikator TIK 2016*. (online). kominfo.go.id. Diakses 20 November 2016.
- Kompasiana. (2010). *Indikator Kesejahteraan* (online). Diakses dari <https://www.kompasiana.com/ica/i/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan>
- MENKOMINFO. (2018). *Menkominfo: Startup Indonesia Menunjukkan Tajinya di Dunia*. *antaranews* (24/09/18)
- MIKTI. (2018). *Mapping & Database Startup Indonesia 2018*.
- Mudo, Sutan. (2015). *Apa Itu Bisnis Startup? Dan Bagaimana Perkembangannya? Tech in Asia*.
- Paul, Graham, Coding (2012). *Startup=Growth*. Artikel On-line <http://www.paulgraham.com/growth.html>
- Saebani, A. (2019). *Startup Bisnis Generasi Milenial*. (online). Ayobandung.com. Diakses 02 Desember 2019.
- Salam, Muslim. (2012). *Grounded Theory Research: Suatu Model Penelitian Tanpa Teori*. Draft, tidak dipublikasikan.
- Scott, C. L. (2015). *The Futures of Learning 3: What Kind of Pedagogies for the 21st Century?* Paris: UNESCO Education Research and Foresight

- Suciati, D. A.P., Budhi, M. K.S., dan Jayastra, K. (2015). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan Dan Investasi Pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2007-2012. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. 20 (2).h:83-93.
- Sururi, Ahmad. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 03 No. 02
- Sirojuzilam, (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa Press
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, (USA: SAGE Publications, 1990) 17
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara RI
- . (2019). Mengenal Istilah Unicorn dalam 'Dunia' Startup. *CNN Indonesia*. Diakses pada tanggal 18/2/2019 pukul 07:35

ANALISIS KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2008-2018

Amriadi

Emai : Amriadi.trucking@gmail.com

Amik Lamappapoleonro Soppeng

Andi Umar

Emai : Andiumarr52@gmail.com

Amik Lamappapoleonro Soppeng

Abstract

This study aims: 1) Knowing the development and level of progress of economic development in each district in the period 2008-2018. 2) Knowing the effect of population and high school and tertiary education levels on the level of economic development inequality. 3) Knowing the effect of the number of poor families on the level of inequality in economic development. 4) Knowing the effect of population growth on the level of inequality in economic development. This research is a quantitative research. The data used in this research are secondary data from 8 sub-districts in Soppeng Regency in 2008-2018. The analysis technique used is quantitative analysis using panel data regression analysis model Fixed Effect. The results of this study indicate that: 1) The analysis using panel data regression shows that the regional share growth component variable is not included or removed from the model. 2) The population variable with high school and tertiary education levels has a significant and positive effect on inequality in economic development. 3) The variable number of poor families has a significant and negative effect on inequality in economic development. 4) The population growth variable does not have a significant effect on inequality in economic development.

Key words: *Inequality of economic development, education level, poor family, population growth*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui perkembangan dan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi tiap kecamatan pada periode 2008-2018. 2) Mengetahui pengaruh jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. 3) Mengetahui pengaruh jumlah keluarga miskin terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. 4) Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2008-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif digunakan analisis regresi data panel model *Fixed Effect*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Analisis menggunakan regresi data panel menunjukkan bahwa variabel komponen pertumbuhan *regional share* tidak dimasukan atau dihilangkan dari model. 2) Variabel jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. 3) Variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. 4) Variabel pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Kata kunci: ketimpangan pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, keluarga miskin, pertumbuhan penduduk.

1. PENDAHULUAN

Ketidaksetaraan di Kabupaten Soppeng memang sudah menunjukkan adanya ketimpangan secara sektoral. Selanjutnya program pembangunanpun mengalami ketidakmerataan dan telah berakibat pada kesenjangan pembangunan di tiap kecamatan. Dimana, program-program pembangunan lebih dikerahkan dipusat kota kabupaten.

Terjadinya kesenjangan program pembangunan seperti halnya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur, telah berdampak pada kemakmuran di tiap kecamatan. Dari adanya permasalahan di atas, ketimpangan bukan hanya sebagai kondisi umum yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Namun ketimpangan juga terbentuk karena

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi (Rahmat, 2013:1). Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income per-kapita*) dalam jangka panjang (Subandi, 2011:9).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan. Berdasarkan Jhingan (2012:338), salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia

direncana ataupun disengaja dan juga sebagai akibat dari suatu kondisi yang memang susah untuk dirubah. Untuk itu lah, mengapa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Soppeng penting untuk dianalisis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta.

2.2 Ketimpangan Pembangunan

Untuk mengukur adanya disparitas atau ketimpangan, perlu dibedakan terlebih dahulu antara mengukur ketimpangan dalam pembagian atau distribusi pendapatan dengan mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah. Secara umum untuk mengetahui besarnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan digunakan alat ukur seperti Gini Ratio

2.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kata kunci pembangunan adalah pembentukan modal. Sedangkan modal yang dibutuhkan selain modal fisik tetapi juga modal manusia. Modal manusia yang berkualitaslah yang nantinya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Berdasarkan hasil studi menunjukan bahwa pendidikan memberi kontribusi terhadap pengembangan sumber daya

manusia berkualitas, penguasaan, pengembangan sains dan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi (Mohammad Ali, 2009).

Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai jenjang SMA dan perguruan tinggi menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007, menyebutkan bahwa taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan antara lain diukur dari meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP atau MTs ke atas, meningkatnya rata-rata lama sekolah, dan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia.

2.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan maupun kemakmuran) masyarakat. Untuk dapat mengategorikan kesejahteraan masyarakat, setiap individu memiliki kategori tersendiri untuk bisa dikatakan sejahtera. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) telah

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti di bawah ini. Linggar Dewangga Putra (2011), melakukan penelitian terkait analisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan di

mengelompokkan tingkatan kesejahteraan keluarga menjadi 5 kategori yaitu: 1. Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin), 2. Keluarga Sejahtera Tahap I (Miskin), 3. Keluarga Sejahtera Tahap II

2.5 Tingkat Jumlah Penduduk

Faktor kependudukan menjadi bagian yang penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah, baik itu ditinjau dari kondisi kependudukannya maupun dalam perkembangannya. Sehingga memungkinkan apabila kondisi kependudukan yang berbeda di masing-masing daerah akan menghasilkan perbedaan pula pada kondisi pembangunan daerah bersangkutan. Seperti halnya jumlah penduduk, jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang terdapat di dalam suatu daerah. Besarnya jumlah penduduk suatu daerah dapat mempengaruhi pembangunan daerah itu sendiri.

Disatu sisi besarnya jumlah penduduk suatu daerah dapat menghambat pembangunan, karena berkaitan dengan kualitas yang dimiliki oleh penduduk seperti tingkat pendidikan, kesehatan maupun pendapatan yang dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah.

provinsi Sulawesi Selatan adalah adanya ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan pada tiap-tiap kabupaten/kota. Melalui analisis regresi diperoleh hasil bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. Penelitian Basuki Rahmat (2013), menyebutkan

bahwa Sulawesi Selatan lebih banyak bergantung pada sektor pertanian yaitu sekitar 33,54%. Selain itu perekonomian Sulawesi Selatan memiliki perkembangan PDRB yang pesat sekitar 7,28 persen per tahun. Namun terjadi ketimpangan yang cukup tinggi. Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa desentralisasi fiskal tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Tingkat pendidikan SMA tidak signifikan dan berpengaruh negatif sebelum adanya desentralisasi fiskal, sedangkan setelah adanya desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkait dengan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Soppeng. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* selama 10 tahun dan data *cross section* dari 8 kecamatan. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah trend perkembangan pembangunan ekonomi tiap kecamatan, ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat analisis

regresi data panel.

4. HASIL PENELITIAN

Perkembangan kemajuan perekonomian tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2008 hingga 2018, menunjukkan bahwa tidak semua kecamatan mengalami pertumbuhan yang positif. Terdapat beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng mengalami perkembangan yang berfluktuasi negatif dan mengalami kemunduran menjadi daerah yang relatif tertinggal.

Variabel komponen pertumbuhan *regional share* dikeluarkan dari model estimasi data panel, sebab memiliki korelasi yang tinggi terhadap variabel lainnya. Variabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk dengan pendidikan taraf yang lebih tinggi secara tidak langsung mempengaruhi daya beli.

Sedangkan daya beli masyarakat menunjukkan cerminan besarnya pendapatan perkapita daerah. Semakin tinggi pendapatan perkapita menunjukkan tingkat kemakmuran daerah atau kecamatan semakin baik. Bagi sejumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMA dan Perguruan Tinggi daya beli dapat terpengaruh oleh *income* sebagai hasil produktivitas yang tinggi, sedangkan yang masih menempuh pendidikan daya beli dipengaruhi oleh kebutuhan yang lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk yang menempuh pendidikan dibawahnya.

Variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut dikarenakan, hampir sebagian jumlah keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Soppeng merupakan keluarga miskin. Apabila jumlah keluarga miskin semakin bertambah berarti menunjukkan penurunan terhadap gap diantara keluarga sejahtera dan keluarga miskin, sehingga ketimpangan pun akan menurun.

Variabel pertumbuhan penduduk

tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut dikarenakan penambahan penduduk migrasi dengan migrasi penduduk yang keluar justru lebih banyak dibandingkan migrasi penduduk yang masuk. Sehingga penambahan penduduk yang terjadi belum dapat menciptakan kebutuhan akan barang dan jasa yang mempengaruhi tingkat perekonomian di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Soppeng

Tabel 1. Analisis Deskriptif Pembangunan Ekonomi tiap Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2008 - 2018.

Statistics

		Pembangunan Ekonomi_ Marioriw awo	Pembangunan Ekonomi_ Liliriaja	Pembangunan Ekonomi_ Lilirilau	Pembangunan Ekonomi_ Lalabata	Pembangunan Ekonomi_ Marioria wa	Pembangunan Ekonomi_ Donridonri	Pembangunan Ekonomi_ Ganra	Pembangunan Ekonomi_ Citta
N	Valid	11	11	11	11	11	11	11	11
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	6.9909	3.2582	5.2255	9.9427	4.7264	3.8755	2.9873	1.6882
	Median	7.0200	3.4000	5.2700	10.4000	4.5100	4.1900	2.9500	1.6800
	Minimum	6.07	2.44	4.55	8.54	4.18	2.90	2.72	1.61
	Maximum	8.05	3.54	5.62	10.70	6.07	4.51	3.26	1.82

Tabel di atas menunjukkan tingkat pembangunan ekonomi dari 8 (delapan) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pembangunan ekonomi yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Lalabata sebesar 9.9%, kemudian pada urutan kedua tingkat pembangunan ekonomi tertinggi terdapat pada Kecamatan Marioriwawo sebesar 6.9%, kemudian diurutkan ketiga terdapat pada Kecamatan

Lilirilau dengan tingkat pembangunan ekonomi sebesar 5.2%, kemudian pada urutan keempat terdapat pada Kecamatan Marioriwawo sebesar 4.7%, kemudian pada urutan kelima terdapat pada Kecamatan Donri-donri, kemudian pada urutan keenam terdapat pada Kecamatan Liliriaja sebesar 3.2%, kemudian pada urutan ketujuh terdapat pada Kecamatan Ganra sebesar 2.9% dan urutan terakhir dengan tingkat pembangunan ekonomi terendah yaitu

terdapat pada Kecamatan Citta sebesar 1.6%.

Tabel 2. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812 ^a	.660	.514	.57446

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Pertumbuhan_Penduduk, Tingkat_Kemiskinan, Tingkat_Pendidikan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai R² (R Square) sebesar 0.660 atau 66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentasi sumbangan pengaruh variabel independen (tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi, jumlah keluarga miskin, dan pertumbuhan penduduk)

terhadap variabel dependen (tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi) hanya sebesar 66%. Sedangkan selebihnya sebesar 34% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Tabel 3. Uji signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.477	3	1.492	4.522	.046 ^b
	Residual	2.310	7	.330		
	Total	6.787	10			

a. Dependent Variable: Tingkat_Ketimpangan

b. Predictors: (Constant), Tingkat_Pertumbuhan_Penduduk, Tingkat_Kemiskinan, Tingkat_Pendidikan

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($4.522 > 4.35$). Sesuai dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi), variabel X2 (jumlah

keluarga miskin), dan variabel X3 (pertumbuhan penduduk) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi).

Tabel 4. Uji signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.658	10.824		.985	.358
1 Tingkat_Pendidikan	-.208	.613	-.220	-.339	.745
Tingkat_Kemiskinan	7.847E-005	.000	.426	.682	.517

Tingkat_Pertumbuhan_Penduduk	3.918E-006	.000	.293	1.147	.289
------------------------------	------------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Tingkat_Ketimpangan

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0.339, jadi nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.339 < 1.894$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.

Pengujian pada variabel jumlah keluarga miskin diperoleh t_{hitung} sebesar 0.682, jadi nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.682 < 1.894$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. Pengujian pada variabel pertumbuhan penduduk diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.147, jadi nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.147 < 1.894$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Pembangunan ekonomi yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Lalabata sebesar 9.9%, kemudian pada urutan kedua tingkat pembangunan ekonomi tertinggi terdapat pada Kecamatan Marioriwawo sebesar 6.9%, kemudian diurutan ketiga terdapat pada Kecamatan Lilirilau dengan tingkat pembangunan ekonomi sebesar 5.2%, kemudian pada urutan keempat terdapat pada Kecamatan Marioriwawa sebesar 4.7%, kemudian pada urutan kelima

terdapat pada Kecamatan Donri-donri, kemudian pada urutan keenam terdapat pada Kecamatan Liliriaja sebesar 3.2%, kemudian pada urutan ketujuh terdapat pada Kecamatan Ganra sebesar 2.9% dan urutan terakhir dengan tingkat pembangunan ekonomi terendah yaitu terdapat pada Kecamatan Citta sebesar 1.6%.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai R^2 (R Square) sebesar 0.660 atau 66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentasi sumbangan pengaruh variabel independen (tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi, jumlah keluarga miskin, dan pertumbuhan penduduk) terhadap variabel dependen (tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi) hanya sebesar 66%. Sedangkan selebihnya sebesar 34% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($4.522 > 4.35$). Sesuai dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi), variabel X2 (jumlah keluarga miskin), dan variabel X3 (pertumbuhan penduduk) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. Pengujian pada variabel

pertumbuhan penduduk diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.147, jadi nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.147 < 1.894$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki Rahmat. 2013. "Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2011. *Skripsi*. Universitas Hasanudin Makassar.
- Jhingan M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Linggar Dewangga Putra.2011. "Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2000-2007". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Mohammad Ali. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Produk Regional Domestik Bruto Kabupaten Soppeng 2018*. Soppeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.
- Rahmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu Subandi.
2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung:Alfabeta
- Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan*. 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

PELUANG PENYERTAAN MODAL DAN DANA HIBAH PADA PDAM TIRTA WAESAI KABUPATEN BARRU (KAJIAN ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN KEMAMPUAN PDAM)

Adi Siswanto

Politeknik Informatika Nasional Makassar

Email: adiswanto@gmail.com

Lina Mariana

Politeknik Informatika Nasional

Email: linamariana90@yahoo.co.id

M.Dakhri

Politeknik Informatika Nasional

Email: mdakhri@gmail.com

Abstract

This type of research uses a combination research method. Namely by combining quantitative and qualitative research methods. Data analysis techniques are the SWOT analysis method, regional financial capacity analysis (KKD), regional capability level analysis and Full Cost Recovery (FCR) analysis. The results showed: 1) PDAM Barru Regency Program Plan after obtaining capital participation from the Regional Government of Barru Regency is a) plan for funding activities for urban drinking water grant, free water connection for low-income communities (MBR), b) provision of water meters, c) construction of intake wells, d) construction of pump housings, e) installation of 5lt / sec cap intake pumps, f) procurement of Ø 6 "GIP pipes, intake pumps and accessories, g) roof rehabilitation and additional space for Marolly installation operation houses and h) land acquisition Marolly intake well., 2) Regional Financial Capability of Barru Regency in distributing grant assistance in the form of Equity Participation to PDAM Barru Regency and 3) PDAM Barru Regency contribution to Regional Original Revenue is the contribution of PDAM Barru Regency to Barru Regency Government if Regional Government Capital Participation is implemented namely assisting the government in achieving Sdg's 100-0-100 targets and achieving SPM 100%. ak ses clean water.

Keywords: PDAM, Equity, Grant Funds, Study

Abstrak

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian kombinasi. Yaitu dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data adalah metode analisis SWOT, analisis kemampuan keuangan daerah (KKD), analisis tingkat kemampuan daerah dan analisis *Full Cost Recovery* (FCR). Hasil penelitian menunjukkan : 1) Rencana Program PDAM Kabupaten Barru setelah memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru adalah a) rencana kegiatan pendanaan hibah air minum perkotaan sambungan air gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), b) pengadaan *water* meter air, c) pembuatan sumur intake, d) pembuatan rumah pompa, e) pemasangan pompa intake kap 5lt/dtk, f) pengadaan pipa GIP Ø 6", pompa intake dan accesoris, g) rehabilitasi atap dan penambahan ruang rumah operasi instalasi Marolly dan h) pembebasan lahan sumur intake Marolly., 2) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru dalam menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk Penyertaan Modal ke PDAM Kabupaten Barru dan 3) kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pemerintah Kabupaten Barru apabila Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terlaksana yaitu membantu pemerintah dalam pencapaian target Sdg's 100-0-100 dan pencapaian SPM 100 % akses air bersih.

Kata kunci : PDAM, Penyertaan modal, Dana Hibah, Kajian

1. PENDAHULUAN

Air minum sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) TA 2015-2019, mulai tahun 2015 Pemerintah menggulirkan Program Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) dengan mengalokasikan dana sebesar Rp500 miliar pada APBN Perubahan TA 2015. Program Hibah Air Minum dari pendanaan rupiah murni ini diharapkan dapat mempercepat capaian pemenuhan 100% air minum dan mampu mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan investasi prasarana air minum melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM sebagai salah satu bagian terpenting dalam pemenuhan akses air minum, saat ini kondisinya banyak yang kurang baik.

Berdasarkan data dari Badan Pengembangan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 374 PDAM yang telah di audit hasilnya yaitu 223 PDAM berstatus sehat atau hanya 57%, 99 PDAM atau 25% berkinerja kurang sehat dan 52 PDAM atau 13% berkinerja sakit. Banyaknya PDAM yang terlilit utang dan yang selalu merugi tiap tahun berdampak pada kinerja PDAM. Tujuan dari Program Hibah Air Minum adalah untuk meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

PDAM Tirta Wesai kabupaten Barru termasuk kedalam salah satu PDAM di Indonesia dengan status berkinerja kurang sehat. Sehingga dibutuhkan beberapa langkah agar

PDAM bisa berkinerja sehat, salah satu yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan penyertaan modal dan dana hibah yang anggarannya dari APBN.

Sebagai tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Waisae, menyatakan bahwa penyertaan modal diberikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan ketersediaan air bersih pada masyarakat serta merupakan upaya pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Iwan Richard Butarbutar & Irfan Sofi, 2017, dalam jurnal yang berjudul Efektivitas Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri dalam Mencapai Target Sambungan Rumah Tangga. Tujuan penulisan ini : 1) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Perusahaan Daerah Air Minum. Efektivitas Hibah Air Minum tersebut diukur dari pencapaian target sambungan pelaksanaan Hibah Air Minum yang berasal dari Pendapatan Dalam Negeri; dan 2) Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Hibah Air Minum untuk mencapai target Sambungan Rumah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Metode penulisan kajian ini : 1) *Desk Study*; 2) Wawancara terhadap beberapa daerah penerima Hibah Air Minum; dan 3) *Focus Group Discussion* dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat. Hasil kajian ini menunjukkan beberapa kendala pemerintah daerah yang berdampak pada penyelesaian fisik proyek hibah, yaitu: a) Kendala debit air yang dialirkan; b) Kemampuan fiskal daerah yang berbeda; dan c) Keterlambatan terbitnya peraturan daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah. Namun demikian, program Hibah Air Minum yang berasal dari Pendapatan Dalam Negeri hasilnya lebih efektif dalam mencapai target Sambungan Rumah jika dibandingkan dengan program hibah lain sejenis yang berasal dari luar negeri. Selain itu, program hibah ini lebih mampu menstimulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Penyertaan Modal Daerah jika dibandingkan dengan program yang berasal dari hibah luar negeri. (Iwan Richard Butarbutar & Irfan Sofi, 2017).

Penelitian selanjutnya adalah Dewi Sartika, 2014, dengan judul Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha (Pd Pau) Kota Samarinda. Perusahaan daerah (PD) adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Saat ini terdapat dua arus utama paradigma (*mainstream*) dalam pengelolaan PD, di satu sisi, PD merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lokal menjadi investasi yang dapat meningkatkan pemasukan (profit) bagi pendapatan asli daerah (PAD) setempat. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) menuntut agar PD tidak hanya mengejar profit semata, tetapi lebih diharapkan supaya menjadi medium pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi

pelayanan kepada publik dan mengakselerasi proses pembangunan. Dalam perjalanan, PD PAU mengalami disorientasi bisnis dan krisis finansial sehingga menjadikan PD PAU diambang kebangkrutan dengan sejumlah kompleksitas permasalahan. Dalam rangka menyelamatkan bisnis PD PAU, langkah yang dapat dilakukan pemerintah Kota Samarinda adalah dengan melakukan penyehatan di tubuh PD PAU sehingga diperlukan langkah-langkah kebijakan penyehatan usaha, diantaranya adalah dengan merumuskan ulang visi bisnis, melakukan restrukturisasi manajemen pengelolaan, verifikasi neraca keuangan, membangun relasi bisnis, dan penambahan modal baru. (Sartika, 2014)

2.2 Penyertaan Modal Daerah

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang No 23, 2014)

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (Undang-undang No 23, 2014)

2.3 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD

Pemerintah Daerah sebagai pemilik perusahaan dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan. Pemberian dana penyertaan modal ini sebagai upaya bantuan keuangan bagi perusahaan daerah yang bersumber dari uang publik yang dikelola Pemerintah Daerah dalam keuangan daerah. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dicatat sebagai penyertaan modal dicantumkan dalam APBD dan dibuatkan perda tersendiri untuk mengaturnya. Pemerintah Daerah memberikan dana penyertaan modal harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan daerah itu sendiri sehingga dibutuhkan kajian perhitungan nominal. (Muslikah, 2015)

2.4 Hibah Air Minum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012

dinyatakan bahwa prinsip Hibah ke daerah adalah:

- a. Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. Mekanisme APBN dan APBD;
- d. Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan
- e. Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah.

Penetapan daerah penerima Hibah Air Minum tahun 2015 masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah utamanya Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1) Menteri Keuangan menetapkan alokasi Hibah dalam APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dengan prioritas untuk kegiatan investasi dan sarana pelayanan publik.

Ayat (2) Menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode analisis SWOT

- b. Analisis kemampuan keuangan daerah (KKD)
- c. Analisis tingkat kemampuan daerah
- d. Analisis *Full Cost Recovery* (FCR)

Setelah keseluruhan data dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya, yakni menganalisis data dengan menyusun, memilih, dan memilah data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh berupa tulisan yang bersifat ilmiah secara teratur dan sistematis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pembentukan PDAM Kabupaten Barru pada awalnya dibentuk dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru pada tahun 1973. Kemudian Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum membentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Barru pada tahun 1982. Setelah itu pada tahun 1991 dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barru.

Saat ini PDAM Kabupaten Barru memiliki 6 sistem penyediaan air minum yang terdiri dari 1 BNA (*basic need approach*) dan 5 IKK. Sumber air baku yang dimanfaatkan terdiri dari 5 sungai, satu mata air dan air tanah, fasilitas produksi terdiri dari 7 unit instalasi pengolahan air (IPA) lengkap, satu unit sumur dalam dan satu unit *broncaptering* mata air.

Sistem pengaliran pipa transmisi air baku sebagian besar dengan pemompaan sedangkan sistem pengaliran pipa distribusi sebagian besar gravitasi. Area pelayanan PDAM Kabupaten Barru meliputi 31 desa/kelurahan atau 56% dari total 55

desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barru.

Total kapasitas terpasang adalah sebesar 213,5 lt/dt dengan kapasitas produksi dimanfaatkan sekitar 132,4 lt/dt, sedangkan jumlah sambungan aktif adalah sebanyak 8.658 unit. Berdasarkan jumlah penduduk administrasi maka cakupan pelayanan sebesar 30,1% terhadap penduduk administrative atau 43,5% terhadap penduduk area pelayanan pada tahun 2017.

a. Kinerja Keuangan Perusahaan

1) Pendapatan dan Tarif

Pendapatan penjualan air meningkat 13 % dari sebesar Rp 4,6 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp 5.2 Milyar pada tahun 2017, peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan jumlah pelanggan dan konsumsi air / air terjual seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Air Terjual

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Jumlah Pelanggan (unit)	7.493	7.632	7.989	8.658
Air Terjual (M3)	892.133	747.203	862.335	955.733

Sumber : PDAM Tirta Waesai Kab Barru, 2020

Tarif yang berlaku di PDAM Kabupaten Barru berdasarkan pada Keputusan DPRD Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2009 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Barru tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Yang Baru pada PDAM Kabupaten Barru.

PDAM belum melakukan penyesuaian tarif sejak tahun 2009, menjadi salah satu penyebab perusahaan terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Rata-rata harga air untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 5.429/m3 belum

bisa menutupi rata-rata biaya O & M sebesar Rp 5.577/m³ bahkan masih jauh untuk menutupi biaya secara

keseluruhan (FCR) sebesar Rp 7.729/m³ atau hanya kisaran 70% dari FCR.

Tabel 2. Ringkasan APBD Kab. Barru Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	2019
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.477.469.320,00
	Pajak Daerah	20.392.597.333,00
	Retribusi Daerah	8.794.733.327,00
	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.434.009.603,00
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	65.248.798.234,26
2.	Dana bagi hasil	16.765.693.000,00
3.	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
4.	Dana alokasi khusus	251.164.210.910,00
5.	Belanja pegawai	427.647.405.425,00

Sumber : BKAD-LRA 2018 dan Proyeksi APBD

4.2 Pembahasan

a. Rencana Program PDAM Kabupaten Barru setelah memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

Dilihat dari aspek perencanaan penyertaan modal daerah ini diawali dari pertimbangan bahwa Pelayanan air minum di Kabupaten Barru, dari 7 kecamatan yang ada di Barru, hanya 6 Kecamatan yang telah mendapatkan pelayanan air minum melalui system perpipaan PDAM. Cakupan pelayanan air masih sangat rendah yaitu baru mencapai 30.1% dari total jumlah rumah tangga sebesar 172.769 jiwa pada Tahun 2017. Cakupan pelayanan ini masih sangat jauh untuk mencapai target universal access 100-0-100 pada tahun 2019 dan capaian ini masih jauh dari target SPM sebesar 100%.

Untuk mendukung capaian target *universal access* dan SPM maka PDAM menyusun program-program kerja, anggaran dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan perusahaan. Program-program dan perencanaan tersebut berguna untuk memberi arah terhadap perkembangan dan perbaikan perusahaan. PDAM Kabupaten Barru telah menyusun rencana kegiatan 5 (lima) tahun kedepan didalam *Business Plan*, dengan merumuskan program serta kerangka pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
 Tahun 2019**

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH UNIT /BUAH	LOKASI SUMBER INTAKE	KETERANGAN
1	Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	550 Unit	Tersebar	Penambahan Sambungan Rumah
2	Pengadaan Water Meter Air (Pergantian Meteran Air) Merek ONDA SNI	1.000 Buah	Pelayanan Kota	Untuk Meningkatkan Pendapatan Air
3	Pembuatan sumur intake	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
4	Pembuatan rumah pompa	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
5	Pemasangan pompa intake kap. 5 lt/dtk	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
6	Pengadaan/pemasangan pipa GIP Ø 6", pompa intake dan aksesoris	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
7	Rehabilitasi atap dan penambah ruang rumah operasi instalasi marolly	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
8	Pembebasan lahan sumur intake marolly	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku

Sumber : PDAM Tirta Waesai Kab. Barru

Berdasarkan pedoman pengelolaan hibah air minum APBN, Program Hibah Air Minum merupakan hibah dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

Dana Hibah yang diberikan merupakan penggantian atas investasi Pemerintah Daerah melalui PMP Daerah

kepada PDAM dalam rangka pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum. Dana Hibah yang diterima Pemerintah Daerah selanjutnya diharapkan dialokasikan kembali untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum yang dinyatakan dalam APBD kabupaten/kota, baik berupa dana PMP Daerah kepada PDAM.

b. Kemampuan Keuangan daerah Kabupaten Barru

Investasi yang akan direncanakan oleh suatu Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melihat kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan

bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat

dilakukan apabila APBD suatu Daerah diperkirakan surplus. Dalam hal ini surplus berarti jumlah pendapatan daerah melebihi belanja daerah.

Klasifikasi Klasifikasi indeks pengukuran diatas dilakukan dengan menetapkan kategori sebagai berikut.:

Tabel 4. Kategori Keuangan Daerah

PERUBAHAN (%)	PAD / TDP / DOF / IKR	RDAU / RK
< 10,00	Sangat Kurang	Sangat Baik
10,01 – 20,00	Kurang	Baik
20,01 – 30,00	Cukup	Sedang
30,01 – 40,00	Sedang	Cukup
40,01 – 50,00	Baik	Kurang
>50,01	Sangat Baik	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri 1991

Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 $KKD = (PAD + \text{Bagi Hasil} + DAU) - \text{Belanja Pegawai}$. Dari Rumus tersebut

dan Data APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 di peroleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.477.469.320,00
2	Dana bagi hasil	16.765.693.000,00
3	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
4	Belanja pegawai	427.647.405.425,00
Kemampuan Keuangan Daerah		209.574.455.895,00

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru sebesar Rp. **209.574.455.895** (dua ratus sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) berada antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) yang dikelompokkan pada

kemampuan keuangan daerah “**sedang**”. Angka KKD tersebut menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Dikategorikan pada kelompok sedang, Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru yang berarti bahwa Pemda Kabupaten Barru leluasa untuk berinovasi melakukan pembangunan daerah sesuai dengan yang direncanakan.

c. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

formula $TP\ PAD_t = \frac{(PAD_t - PAD_{t-1})}{PAD_{t-1}} \times 100\%$

1) Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dan APBD dilakukan melalui metode rata-rata tahunan, dengan

Seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan realisasi PAD pada APBD Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 5. Tingkat Pertumbuhan PAD

No	Uraian	Tahun		Rata2 Pertumbuhan
		2018	2019	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	104.627.706.924,57	109.477.469.320,00	4,63
1.1.1	Pajak Daerah	17.964.683.698,00	20.392.597.333,00	13,51
1.1.2	Retribusi Daerah	7.124.358.585,00	8.794.733.327,00	23,45
1.1.3	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.447.705.156,00	9.434.009.603,00	11,68
1.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	71.090.959.485,57	65.248.798.234,26	- 8,22

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Barru sebesar 4,63 %. Tingkat pertumbuhan ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Barru masuk dalam kategori sangat kurang untuk memberikan penyertaan modal kepada BUMD.

2) Derajat otonomi fiskal (DOF)

Derajat otonomi fiskal dihitung dengan fomula:

$$DOF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6. Derajat Otonomi Fiskal

No	Uraian	2019
1	Pendapatan	940.707.735.216,33
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.477.469.320,00
Derajat Otonomi Fiskal		11,64%

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal (DOF) pada Kabupaten Barru sebesar 11,64% Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dikategori kurang, yang berarti bahwa pendapatan yang diperoleh Pemda Kabupaten Barru sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat, atau masih diberi subsidi oleh Pemerintah Pusat.

3) Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD.

Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) dihitung dengan formula:

$$RDAU = \frac{DAU}{PENDAPATAN} \times 100 \%$$

Seperti yang dijelaskan di atas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD TA 2019, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 7. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap APBD

No	Uraian	2019
	Pendapatan	940.707.735.216,33
	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
	Rasio Dana Alokasi Umum	54,32 %

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap Pendapatan pada Kabupaten Barru sebesar 54,32 %. Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap Pendapatan ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori sangat kurang, yang berarti bahwa belanja daerah Pemerintah Kabupaten Barru mayoritas berasal dari bantuan Pemerintah Pusat.

4) Indeks Kemampuan Rutin (IKR).

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dihitung dengan formula:

$$IKR = \frac{PADt+DAU+Bagi\ Hasil}{Belanja\ Tidak\ Langsung} \times 100\%$$

Seperti yang dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD tahun 2019, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 8. Indeks Kemampuan Rutin

No	Uraian	2019
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.477.469.320,00
	Dana bagi hasil	16.765.693.000,00
	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
	Belanja Tidak Langsung	553.224.922.198,00
	Indeks Kemampuan Rutin	115,18 %

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa Indeks Kemampuan Rutin (IKR) pada Kabupaten Barru sebesar 115,18 %. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori Sangat Baik. IKR ini digunakan untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja tidak langsung, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barru masih memiliki anggaran lebih jika seluruh Pendapatan Asli Daerahnya digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung

adalah belanja rutin daerah yang merupakan belanja wajib, diantaranya untuk membiayai pegawai daerah dan operasional kantor rutin.

5) Rasio Ketergantungan (RK).

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana dari Pusat dihitung dengan formula: Rasio Ketergantungan = (DAU + DAK + Bantuan) / PENDAPATAN x 100%, seperti yang dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD TA 2017, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Rasio Ketergantungan

No	Uraian	2019
1	PENDAPATAN	976.487.009.383,00
2	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
3	Dana alokasi khusus	251.164.210.910,00
4	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	6.136.582.400,00
Rasio Ketergantungan		78,68 %

Hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Kabupaten Barru sebesar 78,68 %. Rasio Ketergantungan ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori Sangat Kurang. Rasio ini digunakan untuk mengukur ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat dalam membiayai belanja daerah. Hasil diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barru masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

d. Kontribusi PDAM Kabupaten Barru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Beberapa indikator keuangan yang dicapai oleh perusahaan untuk 5 tahun kedepan akan menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan dari program pengembangan ini. Pendapatan yang diperoleh perusahaan diharapkan dapat menutupi 92% biaya termasuk biaya operasi, pemeliharaan dan biaya penyusutan. Selanjutnya meskipun rasio lancar PDAM Kabupaten Barru sudah berada pada besaran lebih dari 1, besaran yang dianggap ideal, namun diharapkan dengan penambahan investasi PDAM tetap mampu menjaga rasio lancar pada besaran yang ideal.

Berikut proyeksi keuntungan yang akan diperoleh PDAM selama kurun waktu 5 (lima) tahunan.

**Tabel 10. Proyeksi Keuntungan PDAM Kabupaten Barru
 Tahun 2017-2022**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
% Tarif Full Cost Recovery (%)	70%	70%	77%	78%	87%	92%
Rugi/Laba (Rp. 000)	(1,507,201)	-835,164	-656,296	-60,266	1,120,233	1,964,520
Investasi (Rp. 000)	-	1,257,175	6,590,975	4,197,775	5,028,655	2,029,500
Saldo Kas (Rp. 000)	352,491	892,29	840,997	1,193,108	1,351,833	1,566,620

Dari tabel diatas menggambarkan tingkat keuntungan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun melalui berbagai investasi baik dari pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal maupun pemerintah pusat dalam bentuk hibah. Investasi yang terus bertambah akan memberikan peningkatan saldo kas dan keuntungan. Diawal pemberian penyertaan modal PDAM masih akan mengalami kerugian disebabkan penyertaan modal yang diberikan digunakan untuk memperbaiki system pengelolaan air bersih dengan tingkat kehilangan air yang cukup besar.

Tingkat kehilangan air ini dipengaruhi oleh tingkat NRW (Air Tidak Berekening) PDAM Kabupaten Barru pada tahun 2020 berada pada besaran yang masih tinggi yaitu 43.6% dari volume distribusi. Penyesuaian Tarif air minum dilakukan untuk mendukung program 5 tahunan ini juga untuk memperkuat kinerja PDAM itu sendiri. PDAM Kabupaten Barru sampai dengan tahun 2018 belum mencapai kondisi *Full Cost Recovery - FCR*, dengan besaran 70%, dimana pendapatan air hanya dapat menutupi 70% dari biaya usaha yang dibutuhkan (seperti biaya

pengeluaran gaji sebesar 43%, biaya oprasional 27%, dan biaya penyusutan 30%).

Kedepan, direncanakan kondisi FCR dapat dicapai dengan ukuran sedikitnya 92%. Penyesuaian tarif dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan biaya dan pendapatan yang saat ini terjadi. Juga, terjadinya inflasi atas biaya operasional dapat diatasi dengan dilakukannya penyesuaian tariff. Diharapkan kondisi full cost recovery dapat dicapai PDAM Kabupaten Barru dengan upaya ini. Program investasi yang akan terjadi mengakibatkan peningkatan biaya depresiasi atas aktiva yang digunakan. Juga, faktor inflasi atas biaya operasional yang setiap tahunnya terjadi akan menjadikan meningkatnya biaya operasional.

Beberapa upaya akan dilakukan PDAM agar mampu memberikan kontribusi secara langsung ke Pemerintah Kabupaten Barru dalam bentuk PAD setelah Penyertaan Modal diberikan kepada PDAM Kabupaten Barru melalui :

1. Pergantian Water Meter yang rusak sebanyak 1.000 unit/SR
2. Pemasangan Sambungan Baru sebanyak 800 unit/SR dengan rincian

sambungan rumah berbayar sebesar 300 unit dan sambungan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 500 unit

Melalui kedua program tersebut diharapkan akan memberikan tambahan pendapatan pada PDAM sehingga meningkatkan kemampuannya memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Barru. Dengan optimisme yang cukup besar terhadap pelaksanaan keseluruhan program PDAM yang telah direncanakan sampai selesai/rampung, dalam kurun waktu \pm 6 - 12 bulan setelah pencairan dana penyertaan modal

Menunggu penyelesaian berbagai program tersebut, kontribusi awal yang diberikan PDAM Kabupaten Barru dalam bentuk pajak air permukaan serta pajak bumi dan bangunan, seperti yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2018, PDAM Kabupaten Barru telah memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal/laba Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sedangkan realisasi nilai penyeteroran pajak kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp.24.917.361,00; yang berasal dari pajak air permukaan serta pajak bumi dan bangunan.

Adapun kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pemerintah Kabupaten Barru apabila Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terlaksana yaitu membantu pemerintah dalam pencapaian target Sdg's 100-0-100 dan pencapaian SPM 100 % akses air bersih.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Rencana Program PDAM Kabupaten Barru setelah memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru adalah a) rencana kegiatan pendanaan hibah air minum perkotaan sambungan air gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), b) pengadaan water meter air, c) pembuatan sumur intake, d) pembuatan rumah pompa, e) pemasangan pompa intake kap 5lt/dtk, f) pengadaan pipa GIP \varnothing 6", pompa intake dan accesoris, g) rehabilitasi atap dan penambahan ruang rumah operasi instalasi Marolly dan h) pembebasan lahan sumur intake Marolly.
2. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru dalam menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk Penyertaan Modal ke PDAM Kabupaten Barru berdasarkan analisis kemampuan daerah (KKD) termasuk kategori sedang. Pemda kabupaten Barru leluasa untuk berinovasi melakukan pembangunan daerah sesuai dengan yang direncanakan.
3. Kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pemerintah Kabupaten Barru apabila Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terlaksana yaitu membantu pemerintah dalam pencapaian target Sdg's 100-0-100 dan pencapaian SPM 100 % akses air bersih dalah dengan meningkatnya nilai penyeteroran pajak ke daerah yang berasal dari pajak air permukaan serta pajak bumi dan bangunan.

5.2 Saran

Di harapkan dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah, maka

PDAM dapat memberikan kontribusi lebih banyak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Barru.

Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Jurnal PubBis, Vol. 2 No.2, hal 218-231.

DAFTAR PUSTAKA

Iwan Richard Butarbutar, & Irfan Sofi. 2017. *Efektivitas Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri dalam Mencapai Target Sambungan Rumah Tangga.* Jurnal Defis, Vol. 1 No. 1, hal 48-61.

Undang-Undang No 23. (2014).
Tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558

Kemen-PUPR. 2014. *Perluasan Layanan Air Minum Berkelanjutan Bagi MBR,* Jakarta.

Muslikah, F. E. 2015. *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok.* Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272).

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK.07/2015. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1814).

Sugionor & Arif Budiman. 2018. *Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Di*

ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ismail Rasulong

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: ismail.rasulong@unismuh.ac.id

Muhammad Zaimuddin

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: muhammadzainuddin@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the shifting economic structure and find out the leading sektors in Soppeng Regency in 2013-2017. The type of research used is quantitative research. The data processed is the data of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Soppeng Regency and South Sulawesi Province on the basis of constant prices in 2010 in 2013-2017 in all sectors. The data analysis technique used to determine the shift in economic structure and leading sektors in Soppeng District is Location Quotient (LQ) Analysis, Shift Share (SS) Analysis and Klassen Typology analysis. The results of the Location Quotient (LQ) analysis show the agriculture, forestry and fisheries sectors; electricity and gas procurement sectors; construction; trade and repair of cars and motorbikes; providing accommodation and drinking meals; real estate; government administration, defense and social security; education services; and health services and social activities are the leading sektors in Soppeng Regency. The result of Shift Share analysis shows that the sector experiencing a shift is the processing industri sector; trade and repair of cars and motorbikes; providing accommodation and drinking meals; information and communication; financial services; health services and social activities; and other services with $PB > 0$. While the Klassen Typology analysis shows that the advanced and fast-growing sektors are agriculture, forestry and fisheries; and real estate.

Keywords: Shift Share, Location Quotient, Klassen Typology

Absrtak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi dan mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang diolah adalah data *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* Kabupaten Soppeng dan Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan 2010 pada Tahun 2013-2017 di semua sektor. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Soppeng yaitu Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Shift Share (SS) dan analisis Tipologi Klassen. Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan listrik dan gas; konstruksi; perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor unggulan di Kabupaten Soppeng. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor yang mengalami pergeseran yaitu sektor industri pengolahan; perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya dengan $PB > 0$. Sedangkan analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor maju dan tumbuh cepat yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan real estate.

Kata Kunci: Shift Share, Location Quotient, Tipologi Klassen

1. PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan ekonomi akan berdampak pada kemakmuran suatu negara, meskipun harus disadari bahwa kemakmuran memiliki konsekuensi munculnya kesenjangan ekonomi pada kelompok masyarakat kategori berpenghasilan tinggi dengan kelompok penduduk miskin (Rachim, 2015). Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kemampuan memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki.

Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan melakukan pelibatan seoptimal mungkin pada komponen masyarakat maupun sektor swasta melalui pola kemitraan dalam rangka menciptakan peluang kerja baru dan memastikan bahwa ekonomi bergerak positif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Dengan demikian, pembangunan daerah pada dasarnya menekankan pada kebijakan pembangunan yang mampu memanfaatkan kekhasan sumber daya yang dimilikinya baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, maupun infrastruktur fisik daerah. Hal ini tentu saja mengarahkan agar pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif yang kreatif untuk secara optimal memastikan agar kegiatan ekonomi bergerak untuk mengakselerasi pertumbuhan wilayah dan merangsang penciptaan kesempatan kerja.

Tolak ukur tingkat kesejahteraan daerah, salah satunya dapat dilihat dari aspek ekonominya dapat diukur dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Peningkatan pendapatan daerah

terjadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pembangunan ekonomi maka dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mensyaratkan adanya daya dorong yang kuat agar pengelolaan sektor-sektor ekonomi dapat menjamin adanya efek yang besar bagi Bergeraknya sektor-sektor ekonomi yang lebih luas.

Kabupaten Soppeng meliputi 8 (delapan) kecamatan dengan potensi wilayah, kondisi geografis maupun kekhasan wilayah lainnya yang berbeda dengan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan daerah tidak dapat serta merta hanya mengadopsi kebijakan nasional, kebijakan provinsi maupun daerah lainnya. Kebijakan pembangunan ekonomi mesti sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi daerah. Untuk memetakan dengan tepat potensi unggulan Kabupaten Soppeng berdasarkan data historis yang dimiliki maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji aspek pergeseran struktur ekonomi dan identifikasi sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan agar dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki daya saing yang kuat.

Berdasarkan data observasi diperoleh informasi tentang potensi masing-masing sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Secara makro mata dapat diketahui bahwa angka-angka yang dicapai memperlihatkan secara umum ada pertumbuhan tetapi juga nampak adanya pergeseran pada beberapa sektor ekonomi. Sebagai wilayah yang bercirikan agraris, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor yang dengan

kontribusi yang terbesar di Kabupaten Soppeng yaitu sekitar 29,02% paling tinggi dibanding sektor lain. Hal ini mengindikasikan bahwa peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih sangat vital dalam struktur ekonomi Kabupaten Soppeng sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil adalah sektor pengadaan air yang memberikan sumbangan terkecil yakni hanya 0,06%.

Merujuk pada fenomena awal yang diobservasi tersebut, maka fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan menjelaskan pergeseran struktur ekonomi dan melakukan pemetaan sektor-sektor unggulan yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat di Kabupaten Soppeng.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dimaksudkan adalah komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Nilai produksi sektor-sektor ekonomi tersebut memberikan gambaran struktur ekonomi suatu wilayah. Sektor ekonomi dengan nilai produksi terbesar biasanya diidentifikasi sebagai sektor utama yang dominan berkontribusi total produksi suatu daerah, sekaligus dapat dinyatakan sebagai sektor yang menjadi mata pencaharian utama dan pemberi lapangan pekerjaan yang tinggi. Walau hal ini tidak selalu mutlak, karena untuk perekonomian yang sudah maju dimana sektor yang mendominasi adalah sektor industri pengolahan, biasanya tidak selalu identik sebagai mata pencaharian utama penduduk. Sektor ekonomi dikatakan dominan jika sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar bagi

laju pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan.

Arsyad (2010) mengemukakan bahwa perubahan struktural adalah munculnya sektor-sektor baru dalam perekonomian, hilangnya sektor-sektor lama, dan bergesernya bobot kontribusi setiap sektor dalam perekonomian. Ada dua sisi yang dapat dilihat dari kegiatan perekonomian suatu negara, yaitu sistem ekonomi dan struktur ekonomi. Sistem ekonomi berkaitan dengan seluruh pranata seperti kelembagaan maupun faktor-faktor meta-ekonomi yang dapat mendukung pengelolaan sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, struktur ekonomi berarti seluruh komposisi sektor ekonomi yang terdapat di suatu wilayah atau negara tertentu.

2.2 Teori Basis Ekonomi

Menurut Tarigan (2005) teori basis ekonomi, biasa disebut analisis basis digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan yang berasal dari sektor basis. Perubahan pada sektor basis umumnya akan secara langsung menyebabkan perubahan pendapatan regional dan dalam jangka Panjang akan menyebabkan adanya perluasan kesempatan kerja. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan suatu daerah memproduksi barang dan jasa yang bisa diekspor ke luar wilayah atau daerah tersebut. Dengan kata lain tarikan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah memiliki hubungan yang searah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan. Barang dan jasa yang diproduksi dan dapat menyuplai kebutuhan di luar daerah menjadi ciri dari sektor basis, yaitu kegiatan perekonomian yang sudah bisa diekspor

keluar batas daerah bersangkutan (Ananda, 2018).

Dasar pemikiran teori basis adalah adanya barang dan jasa yang diproduksi untuk tujuan pasar di luar daerah dan bukan hanya untuk menyuplai atau memenuhi kebutuhan domestic semata. Surplus yang dihasilkan dikirim keluar daerah untuk memenuhi permintaan pasar sehingga menciptakan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan. Bertambahnya produksi sektor basis akan berpotensi menimbulkan volume produksi yang dengan sendirinya akan menciptakan tarikan positif bagi bergeraknya kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya termasuk akan menstimuli meningkatnya produktivitas tenaga kerja di daerah bersangkutan.

Muljarjadi (2011) mengemukakan beberapa kriteria sektor ekonomi unggulan yang ditentukan oleh besaran peran sektor-sektor ekonomi pada perekonomian daerah, meliputi (1) sektor unggulan tersebut memiliki laju pertumbuhan yang tinggi; (2) sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; (3) sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik kedepan maupun kebelakang; dan (4) dapat juga di artikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh naiknya kapasitas produksi barang dan jasa dalam jangka Panjang yang menyebabkan naiknya output perkapita maupun output total dari perekonomian (Kuznet, 2003; Todaro, 2011; World Bank, 2007). Kenaikan ini ditentukan oleh (1) faktor akumulasi modal berupa investasi pada infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia, (2) adanya kemajuan teknologi dengan

penggunaan cara-cara yang inovatif, dan (3) pertumbuhan penduduk sebagai penyuplai tenaga kerja (Todaro, 2011).

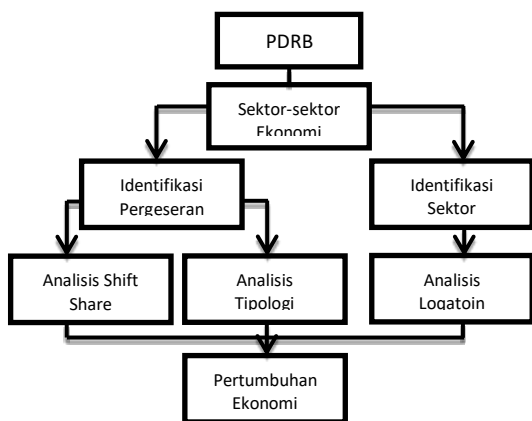
Selain ketiga faktor tersebut, Schumpeter (2008) mengemukakan pentingnya peran kewirausahaan dalam perekonomian. Menurutnya, para wirausaha menjadi pelopor inovasi dalam perekonomian. Adanya inovasi memungkinkan cara berproduksi yang lebih produktif, lebih efisien, dan menjangkau pasar yang lebih luas termasuk dapat ditemukannya sumber-sumber bahan baku yang lebih murah. Aktivitas para wirausaha dengan sendirinya akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya karena adanya kebutuhan modal yang memungkinkan perluasan investasi dan peningkatan kapasitas produksi dan pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Bergeraknya kegiatan ekonomi akibat inovasi dan kegiatan produksi yang dipelopori oleh kaum wirausahawan pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional suatu negara.

2.4 Kerangka Pikir

Perbedaan laju perkembangan ekonomi antar daerah satu dengan daerah lainnya merupakan fenomena yang sering di jumpai, terutama di negara berkembang. Kajian tentang sektor-sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar dalam produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang. Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis diklasifikasikan ke dalam sektor basis dan non basis sebagai informasi awal untuk mengidentifikasi

kegiatan ekonomi yang bersifat ekspor dan non ekspor. Selanjutnya analisis pergeseran sektor ekonomi dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan produksi masing-masing sektor dalam PDRB suatu daerah yang disandingkan dengan wilayah yang menjadi referensi. Apabila nilai penyimpangannya positif, maka dapat dinyatakan bahwa sektor dimaksud dalam PDRB mempunyai nilai kompetitif demikian pula sebaliknya.

Melalui pendalaman nilai-nilai produksi tiap-tiap sektor, dapat ditentukan sektor ekonomi mana yang termasuk kategori berkembang melebihi sektor ekonomi lainnya. Hal sekaligus menjadi ukuran bahwa sektor ekonomi yang dianalisis merupakan sektor yang unggul dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang diukur dari perubahan nilai produksi barang dan jasa dalam periode tertentu dikontribusi secara signifikan oleh pergerakan nilai produksi dari sektor-sektor unggulan di suatu daerah. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif dibanding sektor-sektor lainnya, baik yang dicerminkan di wilayah yang diamati maupun jika dibandingkan dengan wilayah yang menjadi referensinya.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang bersumber dari dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng berupa data Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha periode pengumpulan 2013-2017 dan sebagai daerah referensinya digunakan data Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha Sulawesi Selatan tahun 2013-2017.

3.2 Metode Analisis Data

a. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Soppeng. Metode ini membuat perbandingan terhadap besaran kontribusi masing-masing sektor di Kabupaten Soppeng terhadap besaran kontribusi masing-masing sektor di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Secara matematis untuk menghitung nilai LQ dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

Dimana :

Vi = PDRB setiap sektor Kabupaten Soppeng

Vt = Total PDRB semua Kabupaten Soppeng

Yi = PDRB setiap sektor Sulawesi Selatan

Yt = Total PDRB semua sektor Sulawesi Selatan

b. Analisis Shift Share

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi tenaga kerja pada suatu wilayah tertentu. Menurut Muljarijadi (2011). Adapun analisis *shift share* sebagai berikut: Menghitung perubahan indikator ekonomi.

- 1) PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dari setiap sektor pada tahun dasar analisis.

$$Y_i = \sum_{j=1}^m Y_{ij}$$

Keterangan :

Y_i = PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dari setiap sektor pada tahun awal analisis.

Y_{ji} = PDRB setiap sektor Kabupaten Soppeng pada tahun akhir analisis.

- 2) PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dari setiap sektor pada tahun akhir analisis.

$$Y'_{ij} = \sum_{j=1}^m Y'_{ij}$$

Keterangan :

Y'_i = PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dari setiap sektor pada tahun awal analisis

Y'_{ij} = PDRB setiap sektor wilayah Kabupaten Soppeng pada tahun akhir analisis.

- 3) Perubahan nilai PDRB dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\Delta Y_{ij} = Y'_{ij} - Y_{ij}$$

Keterangan:

ΔY_{ij} = Perubahan PDRB Kabupaten Soppeng.

Y'_{ij} = PDRB setiap sektor Kabupaten Soppeng pada tahun akhir analisis

Y_{ij} = PDRB setiap sektor Kabupaten Soppeng pada tahun dasar analisis.

- 4) Rasio PDRB yang digunakan untuk melihat perbandingan PDRB di suatu wilayah tertentu. Rasio PDRB terbagi atas r_i , R_i dan R_a , yaitu :

- a) r_i (Rasio PDRB setiap sektor pada wilayah Kabupaten Soppeng).

$$r_i = \frac{Y'_{ij}}{Y_{ij}}$$

Keterangan :

Y_{ij} = PDRB pada setiap sektor Kabupaten Soppeng pada tahun dasar analisis.

Y'_{ij} = PDRB pada setiap sektor Kabupaten Soppeng pada tahun akhir analisis.

- b) R_i (Rasio PDRB sektor i pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan)

$$R_i = \frac{Y'_i}{Y_i}$$

Keterangan :

Y'_i = PDRB Sulawesi Selatan setiap sektor pada tahun akhir analisis.

Y_i = PDRB Sulawesi Selatan setiap sektor pada tahun awal analisis.

- c) R_a (Rasio PDRB pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan)

$$R_a = \frac{Y'_{..}}{Y_{..}}$$

Keterangan :

$Y'_{..}$ = PDRB Sulawesi Selatan pada tahun akhir analisis.

$Y_{..}$ = PDRB Sulawesi Selatan pada tahun dasar analisis.

Dengan menggunakan notasi-notasi dan asumsi tersebut, maka pertumbuhan PDRB dan tenaga kerja sektor ke- i wilayah ke- j dapat di pisahkan dalam tiga komponen, yaitu :

1) Komponen pertumbuhan Provinsi / Nasional (PN)

$$PN = Yij (Ri - 1)$$

2) Komponen pertumbuhan proporsional (PP)

$$PP = Yij (Ri - Ra)$$

3) Komponen pertumbuhan daya saing wilayah (PPW)

$$PPW = Yij (Ri - Ra)$$

4) Pergeseran bersih (PB)

$$PB = (Yij (Ri - Ra)) + (Yij(ri - Ri))$$

komponen pertumbuhan provinsi.

$Yij (Ri - Ra)$ = Perubahan dalam PDRB yang di sebabkan oleh komponen pertumbuhan proporsional.

$Yij (ri - Ra)$ = Perubahan dalam PDRB / tenaga kerja yang di sebabkan oleh komponen pertumbuhan daya saing wilayah.

Dimana :

Yij = PDRB sektor ke-i, wilayah ke-j Kabupaten Soppeng tahun awal

Ra = Rasio PDRB wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Ri = Rasio PDRB sektor i pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

ri = Rasio PDRB sektor i pada wilayah Kabupaten Soppeng

$Yij (Ri - 1)$ = Perubahan dalam PDRB yang di sebabkan oleh

Hasil perhitungan Pergeseran Bersih (PB) dengan menjumlahkan komponen PP dan PPW, maka hasil yang di dapat apabila nilai $PB > 0$, berarti pertumbuhan di sektor i wilayah j termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Apabila $PB < 0$, berarti pertumbuhan di sektor tersebut termasuk lambat.

Tabel 1

Posisi relatif suatu sektor berdasarkan pendekatan Pertumbuhan Proporsional (PP) dan pertumbuhan Pangsa wilayah (PPW)

Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	Pertumbuhan Proporsional (PP)	
	Positif (+)	Negatif (-)
Positif (+)	Kuadran I Pertumbuhan Pesat	Kuadran II Berkembang
Negatif (-)	Kuadran IV Cenderung berpotensi	Kuadran III Terbelakang

c. Tipologi Klassen

Teknik Tipologi Klassen dapat digunakan melalui dua pendekatan, yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral dan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah. Menurut Tipologi Sektoral, sektor-sektor dibagi menjadi empat klasifikasi:

1. Kuadran I: sektor ekonomi yang maju dengan cepat dan tumbuh cepat
2. Kuadran II: sektor ekonomi yang maju tapi tertekan
3. Kuadran III: sektor ekonomi berkembang cepat
4. Kuadran IV: sektor ekonomi relatif tertinggal.

Tabel 2
 Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral

PDRB perkapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$Y_i > y$	$Y_i < y$
$R_i > r$	Kuadran I Sektor maju dan Tumbuh cepat	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan
$R_i < r$	Kuadran III Sektor berkembang cepat	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal

Dimana:

R_i = laju pertumbuhan PDRB di propinsi i

Y_i = Pendapatan perkapita propinsi i

R = Laju pertumbuhan PDRB

Y = Pendapatan perkapita rata-rata

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis *Shift Share*

Pergerakan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dalam satu kurun waktu tertentu dapat dilihat menggunakan Analisis *Shift Share* yang dalam kajian ini memanfaatkan nilai PDRB dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi di wilayah studi. Komponen yang diperhatikan adalah nilai tambah tiap sektor dalam PDRB yaitu merupakan penjumlahan dari komponen pertumbuhan Provinsi (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen daya saing wilayah (PPW).

Hasil analisis menjelaskan bahwa beberapa sektor yang masuk kategori sebagai sektor ekonomi yang maju dan tumbuh dengan cepat. Sektor dengan pertumbuhan cepat dan daya saing yang paling tinggi adalah sektor industri pengolahan dengan perubahan PDRB Rp 177.430,08 juta, kemudian pertumbuhan di tingkat wilayah Rp 145.644,79 juta dan perubahan yang terjadi akibat komponen proporsional Rp -2.181,10 juta. Sedangkan Rp 33.966,39 juta adalah perubahan yang terjadi karena komponen pertumbuhan daya saing wilayah (PPW).

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng termasuk dalam kelompok non progresif (lambat).

Tabel 3
Komponen Perubahan PDRB Kabupaten Soppeng Tahun 2013 dan 2017

Lapangan Usaha	Kab Soppeng (Juta Rp)		Komponen Perubahan			Pergeseran Bersih
	Tahun 2013 (Y _{ij})	Tahun 2017 (Y' _{ij})	PN Y _{ij} (R _a -1)	PP Y _{ij} (R _i -R _a)	PPW Y _{ij} (r _i -R _i)	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.329.292,91	1.761.123,29	435.704,13	-5.784,82	1.911,06	-3.873,75
Pertambangan dan Penggalian	138.273,80	189.228,39	45.322,19	-9.004,23	14.636,63	5.632,40
Industri Pengolahan	444.348,75	621.778,83	145.644,79	-2.181,10	33.966,39	31.785,29
Pengadaan Listrik, Gas	5.871,23	7.615,92	1.924,42	217,69	-397,42	-179,73
Pengadaan Air	3.031,06	3.391,54	993,49	-491,16	-141,86	-633,01
Konstruksi	597.977,95	726.283,66	196.000,04	4.527,74	-72.222,07	-67.694,33
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	627.616,22	863.541,26	205.714,62	49.767,33	-19.556,90	30.210,42
Transportasi dan Pergudangan	126.452,90	172.636,33	41.447,64	-8.214,91	12.950,70	4.735,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69.934,53	95.653,99	22.922,54	3.778,49	-981,56	2.796,92
Informasi dan Komunikasi	163.680,07	225.201,28	53.649,64	5.892,72	1.978,86	7.871,57
Jasa Keuangan	131.455,51	174.714,38	43.087,35	2.572,76	-2.401,24	171,52
Real Estate	224.420	290.107,21	73.558,45	-8.781,66	910,43	-7.871,24
Jasa Perusahaan	10.194,85	13.248,44	3.341,58	-56,91	-231,08	-287,99
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	322.637,34	369.224,46	105.751,28	-54.548,21	-4.615,95	-59.164,16
Jasa Pendidikan	260.258,10	342.203,37	85.305,15	-3.065,37	-294,50	-3.359,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80.318,88	113.580,04	26.326,23	7.543,62	-608,69	6.934,93
Jasa Lainnya	31.774,40	42.575,34	10.414,74	2.635,90	-2.249,70	386,20
PDRB	4.567.538,51	6.012.107,71	1.497.108,27	-15.192,13	-37.346,91	-52.539,04

Sumber: Data di olah, 2019

Hasil analisis menggambarkan adanya perubahan pada setiap komponen pertumbuhan yang tercermin dari nilai PDRB Kabupaten Soppeng. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang cepat adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan persentase pertumbuhan PDRB, yaitu sebesar 41,41 %, di distribusikan ke dalam pertumbuhan provinsi (PN) sebesar 42,00 %, pertumbuhan proporsional (PP) sebesar 9,00 %, dan pertumbuhan daya saing wilayah (PPW) sebesar 8,00 %.

Adapun sektor industri pengolahan memiliki nilai pertumbuhan PDRB sebesar 39,93%, di distribusikan ke dalam pertumbuhan provinsi (PN) sebesar 32,00 %, pertumbuhan proporsional (PP) sebesar minus 1,00 %, dan pertumbuhan daya saing wilayah (PPW) sebesar 7,00 %. Selain itu, sektor perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai pertumbuhan PDRB sebesar 37,59 %, di distibusiikan ke dalam pertumbuhan provinsi (PN) sebesar 41,00 %, pertumbuhan proporsional (PP) sebesar 8,00 %, dan pertumbuhan daya saing wilayah (PPW) sebesar 5,00 %.

Tabel 4
Perubahan dan Persentasi Perubahan PDRB Kabupaten Soppeng Tahun 2013 dan 2017

Lapangan Usaha	Kab Soppeng (Juta Rp)		Perubahan (ΔY)	Perubahan PDRB		Komponen Perubahan (%)	
	Tahun 2013 (Y _{ij})	Tahun 2017 (Y' _{ij})		Jumlah (Y' _{ij})-(Y _{ij})	ΔY %	PN%	PP%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.329.292,91	1.761.123,29	431.830,38	32,49	32,00	-1,00	-1,00
Pertambangan dan Penggalian	138.273,80	189.228,39	50.954,59	36,85	26,00	-7,00	4,00
Industri Pengolahan	444.348,75	621.778,83	177.430,08	39,93	32,00	-1,00	7,00
Pengadaan Listrik, Gas	5.871,23	7.615,92	1.744,69	29,72	36,00	3,00	-3,00
Pengadaan Air	3.031,06	3.391,54	360,48	11,89	17,00	-16,00	-21,00
Konstruksi	597.977,95	726.283,66	128.305,71	21,46	34,00	1,00	-12,00
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	627.616,22	863.541,26	235.925,04	37,59	41,00	8,00	5,00
Transportasi dan Pergudangan	126.452,90	172.636,33	46.183,43	36,52	26,00	-7,00	4,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69.934,53	95.653,99	25.719,46	36,78	38,00	5,00	4,00
Informasi dan Komunikasi	163.680,07	225.201,28	61.521,21	37,59	36,00	3,00	5,00
Jasa Keuangan	131.455,51	174.714,38	43.258,87	32,91	35,00	2,00	0,00
Real Estate	224.420	290.107,21	65.687,21	29,27	29,00	-4,00	-4,00
Jasa Perusahaan	10.194,85	13.248,44	3.053,59	29,95	32,00	-1,00	-3,00
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	322.637,34	369.224,46	46.587,12	14,44	16,00	-17,00	-19,00
Jasa Pendidikan	260.258,10	342.203,37	81.945,27	31,49	32,00	-1,00	-2,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80.318,88	113.580,04	33.261,16	41,41	42,00	9,00	8,00
Jasa Lainnya	31.774,40	42.575,34	10.800,94	33,99	41,00	8,00	1,00

Sumber : Data di olah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase efek bersih semua sektor, maka sektor yang mengalami penurunan dengan tanda minus meliputi sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebesar (-2 %); Pertambangan dan Penggalian sebesar (-3 %) Pengadaan Air sebesar (-

37 %); Konstruksi sebesar (-11 %); Transportasi dan Pergudangan sebesar (-3 %); Real Estate sebesar (-8 %); Jasa Perusahaan sebesar (-4 %); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar (-36 %); dan jasa pendidikan (-3 %).

Tabel 5
Komponen Perubahan dan Kenaikan aktual PDRB Kabupaten Soppeng
Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha	Komponen Perubahan (%)			Efek Bersih %	Kenaikan Aktual (%)	Rangking
	PN	PP	PPW			
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32	-1	-1	-2	32,49	10
Pertambangan dan Penggalian	26	-7	4	-3	36,85	5
Industri Pengolahan	32	-1	7	6	39,93	2
Pengadaan Listrik, Gas	36	3	-3	0	29,72	13
Pengadaan Air	17	-16	-21	-37	11,89	17
Konstruksi	34	1	-12	-11	21,46	15
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	41	8	5	13	37,59	4
Transportasi dan Pergudangan	26	-7	4	-3	36,52	7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38	5	4	9	36,78	6
Informasi dan Komunikasi	36	3	5	8	37,59	3
Jasa Keuangan	35	2	0	2	32,91	9
Real Estate	29	-4	-4	-8	29,27	14
Jasa Perusahaan	32	-1	-3	-4	29,95	12
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	16	-17	-19	-36	14,44	16
Jasa Pendidikan	32	-1	-2	-3	31,49	11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42	9	8	17	41,41	1
Jasa Lainnya	41	8	1	9	33,99	8

Sumber : Data di olah, hasil analisis dari tabel 4.7, 2019

Jika di rangking berdasarkan persentase kenaikan aktual, maka sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mendapat rangking pertama sebesar 41,41 % dan yang mendapat rangking

terakhir adalah sektor Pengadaan air sebesar 11,89 %. Selanjutnya komposisi sektor ekonomi menurut indikator PDRB dapat dilihat melalui empat kuadran.

Tabel 6
Analisis Kuadran Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Daya Saing Wilayah (PPW)

<p>KUADRAN I (PP+ dan PPW+) Pertumbuhan Pesat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi dan Komunikasi 	<p>KUADRAN II (PP- dan PPW+) Berkembang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • Transportasi dan Pergudangan • Real Estate
<p>KUADRAN III (PP- dan PPW-) Terbelakang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Air • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial • Jasa Pendidikan 	<p>KUADRAN IV (PP+ dan PPW-) Cenderung berpotensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Listrik, Gas • Konstruksi • Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Jasa Keuangan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya

Sumber : Data di olah, 2019

Berdasarkan Kuadran tersebut menunjukkan bahwa pada kuadran I (PP positif dan PPW positif), artinya hanya ada satu sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing yang cepat yaitu, sektor Informasi dan Komunikasi. Pada Kuadran II (PP negatif dan PPW positif), terlihat bahwa ada 5 sektor, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; dan Real Estate. Hal tersebut berarti kelima sektor tersebut memiliki kecepatan pertumbuhan yang tertekan, namun berkembang. Sektor tersebut di kategorikan memiliki laju pertumbuhan yang cepat, namun sektor tersebut tidak dapat bersaing dengan sektor ekonomi wilayah lain.

Pada Kuadran ke III (PP negatif dan PPW negatif), terdapat 4 sektor,

yaitu sektor Pengadaan Air; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; dan Jasa Pendidikan. Hal tersebut berarti peran terhadap wilayah rendah dan daya saing yang lemah. Sektor tersebut di kategorikan memiliki laju pertumbuhan yang tertekan dan tidak memiliki daya saing.

Pada kuadran ke IV (PP positif dan PPW negatif), terdapat 7 sektor, yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi (Bangunan); Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Hal tersebut berarti bahwa sektor tersebut memiliki kecenderungan sektor tertekan tapi berpotensi. Sektor-sektor ini memiliki tingkat daya saing yang

tinggi namun laju pertumbuhan yang lambat.

4.2 Analisis Location Quotient

Teknik analisis ini di gunakan untuk membandingkan tentang besarnya peranan pada sektor di suatu daerah (Kabupaten) terhadap besarnya peranan sektor di tingkat Provinsi. Jika nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis, $LQ < 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor non basis, sedangkan $LQ = 1$ maka sektor tersebut hanya mampu memenuhi permintaan di wilayahnya.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks LQ menunjukkan bahwa terdapat 7 sektor potensial yang di kembangkan di Kabupaten Soppeng dengan hasil perhitungan $LQ > 1$, yaitu sektor

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar; Konstruksi (Bangunan); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial; Jasa Pendidikan. Sedangkan sektor pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya memiliki nilai $LQ < 1$ yang berarti sektor tersebut kurang berpotensi di kembangkan di Kabupaten Soppeng.

Tabel 7

Indeks Location Quotient Kabupaten Soppeng Persektor Ekonomi Tahun 2013-2017

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ					Rata-rata LQ	KET
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,36	1,34	1,31	1,35	1,38	1,35	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0,50	0,49	0,49	0,53	0,54	0,51	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0,69	0,71	0,73	0,71	0,74	0,72	Non Basis
4	Pengadaan Listrik, Gas	1,40	1,27	1,42	1,37	1,34	1,36	Basis
5	Pengadaan Air	0,49	0,49	0,50	0,48	0,47	0,48	Non Basis
6	Konstruksi	1,09	1,06	1,05	1,02	1,00	1,05	Basis
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,99	0,99	1,01	1,00	0,98	0,99	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,71	0,77	0,81	0,79	0,78	0,77	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,15	1,16	1,15	1,13	1,14	Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,57	0,54	0,57	0,57	0,58	0,57	Non Basis
11	Jasa Keuangan	0,82	0,86	0,86	0,84	0,82	0,84	Non Basis
12	Real Estate	1,35	1,41	1,45	1,39	1,36	1,39	Basis
13	Jasa Perusahaan	0,52	0,51	0,52	0,52	0,51	0,52	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,49	1,52	1,51	1,51	1,49	1,50	Basis
15	Jasa Pendidikan	1,04	1,05	1,06	1,08	1,05	1,06	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,94	0,96	0,96	0,95	0,95	Non Basis
17	Jasa Lainnya	0,55	0,55	0,55	0,54	0,53	0,54	Non Basis
	Total	15,66	15,66	15,94	15,80	15,65	0,93	Non Basis

Sumber : Data di olah, 2019

4.3 Analisis Tipologi Klassen

Analisis tipologi kelas bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor ekonomi. Penggunaan analisis tipologi kelas dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda,

yaitu sektor yang maju dengan cepat dan tumbuh dengan cepat, sektor yang maju tapi tertekan, sektor berkembang cepat, dan sektor yang relatif tertinggal. Tipologi Kelas pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah.

Tabel 8
Analisis Tipologi Klassen Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha	Kabupaten Soppeng		Provinsi Sul-Sel		Kuadran
	Rata-rata pertumbuhan (Yi)	Rata-rata Kontribusi (Ri)	Rata-rata pertumbuhan (y)	Rata-rata Kontribusi (r)	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,12	29,21	8,09	21,31	1
Pertambangan dan Penggalian	9,21	3,10	6,57	5,92	3
Industri Pengolahan	9,98	10,08	8,07	14,01	3
Pengadaan Listrik, Gas	7,43	0,13	9,12	0,09	2
Pengadaan Air	2,97	0,06	4,14	0,13	4
Konstruksi	5,36	12,52	8,38	12	2
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,40	14,09	10,18	14,35	4
Transportasi dan Pergudangan	9,13	2,83	6,57	3,78	3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,19	1,57	9,55	1,39	2
Informasi dan Komunikasi	9,40	3,68	9,09	6,43	3
Jasa Keuangan	8,23	2,89	8,68	3,53	4
Real Estate	7,32	4,86	7,22	3,58	1
Jasa Perusahaan	7,49	0,22	8,05	0,43	4
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,61	6,54	3,97	4,39	2
Jasa Pendidikan	7,87	5,69	7,9	5,45	2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,35	1,83	10,54	1,92	4
Jasa Lainnya	8,50	0,70	10,27	1,3	4

Sumber : Data di olah, 2019

Hasil perhitungan tersebut diperoleh berdasarkan nilai rata-rata pertumbuhan Kabupaten Soppeng dan Provinsi Sulawesi Selatan, dan nilai rata-rata Kontribusi Kabupaten Soppeng dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya dapat dibuat klasifikasi sektor-sektor ekonomi berdasarkan tipologi kelas.

Pada kuadran 1 terlihat bahwa $Y_i > y$ dan $R_i > r$ pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Real Estate. Hal ini berarti sektor tersebut memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar dibandingkan dengan keadaan provinsinya secara keseluruhan.

Pada kuadran II terlihat bahwa $Y_i < y$ dan $R_i > r$ pada sektor Pengadaan

Listrik dan Gas; Kontruksi (Bangunan); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; dan Jasa Pendidikan. Hal ini berarti nilai pertumbuhan PDRB lebih rendah dibandingkan dengan pertmbuhan PDRB

Provinsi, tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB Kabupaten yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi, pada kuadran II di kategorikan kedalam daerah maju tetapi tertekan.

Tabel 9

Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Soppeng

PDRB Perkapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$Y_i > y$	$Y_i < y$
$R_i > r$	KUADRAN I Sektor maju dan tumbuh cepat <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Real Estate 	KUADRAN II Sektor maju tapi tertekan <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Listrik dan Gas • Konstruksi • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial • Jasa Pendidikan
$R_i < r$	KUADRAN III Sektor berkembang cepat <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • Transportasi dan Pergudangan • Informasi dan Komunikasi 	KUADRAN IV Sektor relatif tertinggal <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Air • Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Jasa Keuangan • Jasa Perusahaan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Pada kuadran III terlihat bahwa $Y_i > y$ dan $R_i < r$ pada sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini berarti bahwa nilai pertumbuhan PDRB Provinsi lebih besar dari PDRB Kabupaten Soppeng, namun kontribusi laju pertumbuhan PDRB Provinsi lebih besar dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten

Soppeng, artinya sektor ini berada pada sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat.

Pada kuadran IV terlihat bahwa sektro-sektor ini relative tertinggal, kuadran ini ditempati oleh sektor Pengadaan Air; Perdagangan Besar dan Repaasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa

Lainnya. Sektor ini memiliki nilai PDRB Provinsi (Yi) lebih kecil dari PDRB Kabupaten Soppeng (y), dan kontribusi laju pertumbuhan PDRB Provinsi lebih kecil dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Soppeng.

4.4 Diskusi

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang mengalami pergeseran yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Kedua sektor ini merupakan sektor dengan daya saing yang tinggi. Sedangkan apabila dilihat dari sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Soppeng yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa secara umum untuk daerah-daerah yang awalnya berbasis agraris berpotensi untuk mengalami pergeseran pada sektor-sektor yang memiliki daya saing regional. Untuk kondisi wilayah tertentu tampaknya sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan memberi kontribusi bagi perekonomian daerah. Hasil ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Supangkat (2002) bahwa sektor pertanian dan sektor industri pengolahan masih merupakan sektor yang potensial untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini tentu saja mengikuti karakteristik wilayah dari tiap daerah

yang ada di Indonesia (Tampubolon, 2001).

Tampaknya karakteristik wilayah akan sangat menentukan perubahan-perubahan dalam kapasitas produksi dan sumbangan masing-masing sektor dalam perekonomian. Hal ini semakin meneguhkan pandangan bahwa proses pembangunan mengarah pada berubahnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, membaiknya harga diri masyarakat, dan terbukanya secara luas kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihan ekonominya (Jhingan, 2012; Todaro, 2011).

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Hasil perhitungan shif share, sektor ekonomi yang mengalami pergeseran yaitu sektor pengadaan listrik dan gas; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan $PB > 0$, dan yang memberikan daya saing yang tinggi di Kabupaten Soppeng yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.
2. Sektor basis di Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) yaitu sektor sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Pengadaan Listrik dan gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

3. Hasil analisis tipologi kelas menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Soppeng dapat di klasifikasikan menjadi sektor maju dan tumbuh cepat adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan real estate.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Soppeng harus mampu memberikan prioritas pengembangan pada sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor basis, tumbuh cepat di tingkat Provinsi, memiliki daya saing yang tinggi, dan tergolong sebagai sektor progresif di Kabupaten Soppeng dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.
2. Program percepatan dan pengelolaan intensif pada sektor-sektor ekonomi yang masih cenderung terkebelakang sehingga dapat bergeser menjadi sektor yang relative maju dan berkembang.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan atau disarankan untuk menganalisis hingga ke level subsektor yang di arahkan pada penentuan komoditi unggulan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Alam, S. 2014. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Alfarabi, M. A., Hidayat, M. S., & Rahmadi, S. (2014). Perubahan Struktur Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif*

Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 1(3), 171-171.

- Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hajeri, H., Yurisinthae, E., & Dolorosa, E. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2), 253-269.
- Hidayat, W. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan*. UMM Press.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Muljarjadi, Bagdja. 2011. *Pembangunan Ekonomi Wilayah*. Bandung: UNPAD Press
- Rachim, Abdullah. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. CV Andi Offset : Yogyakarta
- Sari, N. R., & Pujiyono, A. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2010 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Stamboel, K, A. 2012. *Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*. PT. Gramedia: Jakarta
- Subandi. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Schumpeter, J. A. (2008). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. New Jersey: Transaction.

- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : LP FEUI.
- Sumarsono, Hadi, Nasikh, dan Siti Muslikah. 2017. *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*. Penerbit Gunung Samudera : Malang
- Susanti, Sussy. 2013. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan indeks Pembangunan Manusia terhadap kmiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel*. Jurnal Matematika Integratif. STIE Ekuitas : Bandung
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal*. CV Budi Utama : Yogyakarta
- Soetrisno. 1992. *Kapita Selektta Ekonomi Indonesia*. Ando Offset : Yogyakarta
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional-Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Tambunan, P. Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi kesebelas, Jilid 1. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Wahyuningsih, Y. E., & Zamzami, Z. (2014). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(1), 39-47.

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT BELI ONLINE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA STIE BIMA)

Esti purnamasari

Sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) bima
email: Estypurnamasarii16stiebima@gmail.com¹⁾

Ismunandar

Sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) bima]
email: Andar.stiebima@gmail.com²⁾

Abstract

This study aims to determine the effect of social media on online buying interest (case studies on senior students) with 50 respondents. The indicators of social media (x) consist of 2 namely trust and convenience while the indicators of buying interest (y) consist of 4 namely transactional interest, referential interest, preferential interest and explorative interest. The definition of this study uses 2 variables: the independent variable is social media (x) and the dependent variable is online buying interest (y). The research method is an associative research using a qualitative approach consisting of questionnaire data. Data analysis techniques used in this study are validity, reliability, simple linear regression, simple correlation coefficient, correlation, coefficient of determination and using the statistical t test. The results showed that the influence of social media significantly influenced online buying interest.

Keywords: [Social Media, And Minat Beli Online]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap minat beli online (studi kasus pada mahasiswa stie bima) dengan jumlah responden 50 orang. Indikator dari media sosial (x) terdiri atas 2 yaitu kepercayaan dan kemudahan sedangkan indikator dari minat beli (y) terdiri atas 4 yaitu minat transaksional, minat refrensial, minat preferensial dan minat eksploratif. Definisi dari penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel bebas adalah media sosial (x) dan variabel terikat adalah minat beli online (y). Metode penelitian merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang terdiri dari data kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas,realibilitas,regresi linier sederhana, koefisien korelasi sederhana, korelasi,koefisien determinasi dan menggunakan uji t statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh media sosial berpengaruh signifikan terhadap minat beli online.

Kata Kunci :[Media Social, Dan Minat Beli Online]

1. PENDAHULUAN

Internet dimulai sejak awal tahun 1990an di Indonesia dimana jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Seturut perkembangan internet, maka perkembangan internet di Indonesia menjadi lebih komersial dan individual, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Sekitar tahun 1994 mulai beroperasi INdonet yang merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Kemudian berkembang pada tahun 1995 dengan beberapa BBS (bulletin board system) di Indonesia menyediakan jaya akses telnet keluar negeri.

Perkembangan di Indonesia telah dipengaruhi stabilitas di era globalisasi, gaya hidup masyarakat selalu berubah-ubah. Berbagai *tren* berbelanja diadaptasi oleh masyarakat Indonesia, mulai dari *midnight shopping* sampai yang sedang *tren* sekarang adalah berbelanja melalui internet, (*e-commerce*) atau yang biasa disebut *online shop*. Dengan semakin populernya penggunaan internet, perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dilakukan oleh bisnis dengan berbagai ukuran. *E-commerce* di definisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang dan jasa lewat jejaringan internet atau media sosial. Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama *e-commerce* (perdagangan elektronik) yakni penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televisi atau jaringan komputer lainnya. (Nugroho, 2006).

Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan *e-commerce* yang menarik dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014, Euromonitor mencatat, penjualan online di Indonesia sudah mencapai US\$1,1 miliar. Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, industri *e-commerce* Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha *e-*

commerce mencapai 26,2 juta unit. Pada tahun 2018, *e-commerce* di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan sangat pesat, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya jumlah pengusaha dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air. Di samping data tersebut, potensi besar industri *e-commerce* di Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya belanja online, terutama oleh generasi milenial. Menurut Indonesia Millennial Report 2019, milenial sangat suka mencari perbandingan harga, fitur, program promo dan kualitas produk di beberapa *e-commerce* sebelum memutuskan membeli sebuah barang. Para milenial juga tidak segan untuk merekomendasikan *e-commerce* atau toko online favorit mereka kepada teman-teman mereka. (WE Online, Jakarta)

E-Commerce Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di era revolusi industri 4.0 telah mengubah perilaku masyarakat dalam berbelanja. Pola konsumsi konvensional--pembeli dan penjual bertransaksi tatap muka--mulai bergeser kepada cara yang lebih praktis dan cepat. Salah satunya, pemanfaatan internet melalui telepon pintar. Perilaku ini mengakibatkan menjamurnya toko-toko *online, e-commerce* dan *marketplace*. Perputaran uang lewat platform ini cukup fantastis. Bank Indonesia menyebutkan bahwa di tahun 2019 ini, jumlah transaksi *e-commerce* per bulannya mencapai Rp11 triliun-Rp13 triliun. (MediaIndonesia.com).

Kejadian tersebut merupakan peluang besar bagi para produsen yang menawarkan kemudahan kepada konsumen untuk menjual produknya melalui internet. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan internet sebagai media bisnis di dominasi oleh kalangan anak-anak muda. Pada saat melakukan transaksi jual beli menggunakan internet tidak perlu lagi keluar rumah jika ingin berbelanja sesuatu cukup hanya dengan *smartphone*, *laptop*, atau *notebook* yang

bisa menggunakan akses internet dan berbagai aplikasi sosial media seperti aplikasi facebook banyak digemari oleh anak-anak muda. (Mila setiawati¹, Yulfita' aini², Welven aida³).

Mengingat saat ini popularitas sosial media dapat mempermudah produsen untuk mempromosi produk-produknya. Apa lagi di media sosial seperti facebook menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan jual beli online, facebook sebagai sosial media marketing dalam aplikasinya juga bergantung pada empat indikator penting dalam bauran pemasaran marketing mix, yang meliputi 1) produk 2) harga 3) distribusi 4) promosi. Munculnya pemasaran online yang dilakukan oleh para pengguna berbagai media sosial seperti facebook menandakan bahwa semakin beragamnya jenis kebutuhan konsumen dalam masyarakat khususnya kalangan anak-anak muda yang paling banyak mendominasi situs jejaringan sosial facebook. (Mohammad Riki efendi¹, Sri Wahyuni², Mukhamad Zulianto³).

Berdasarkan total populasi indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% setengah penduduk RI telah merasakan akses ke duania maya. Presentase pengguna internet berusia 16-64 tahun yang memiliki masing" jenis perangkat, di antaranya mobile phone (96%) smartphone(64%), non smartphone mobile phone(21%), laphop atau komputer desktop (66%), table(23%), konsol game (16%), hingga firtual reality device (51%). Dalam laporan ini juga diketahui masyarakat indonesia yang phonsel sebanyak 338,2juta. Begitu juga data yang takkalah menariknya, ada 160 juta pengguna aktif media sosial (medsos). bila dibandingkan dengan 2019, maka pada tahun ini we are social menemukan ada peningkatan 10 juta orang yang aktif di media sosial. Adapun media sosial yang paling banyak "ditongkrongi" oleh pengguna internet di indonesia yang paling atas adalah youtube, whatsapt, facebook, instagram,

twitter, line, fb massenger, linkeld, pinterest, we chat, snapchat, skype, tik tok, tumblr, reddit, sina weibo.

Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang yang paling banyak terpapar sebaran informasi tentang suatu produk melalui media sosial facebook. Mahasiswa yang memiliki rentang usia 18-24 tahun adalah mereka yang berada pada masa remaja akhir dan dewasa awal atau berada diantara keduanya yakni masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa (Hurlock, 2016). Mereka memiliki waktu yang banyak untuk mengakses nformasi melalui media sosial, karena pada umumnya mereka tidak dibatasi dalam penggunaan ponsel untuk melakukan aktifitas daring di media sosial facebook dan memiliki banyak waktu luang karena bekerja dengan demikian hal ini menjadi suatu keuntungan dalam berbelanja di facebook, banyaknya keuntungan dan kemudahan di facebook menjadikanny suatu kegemaran bagi masyarakat terutaa mahasiswa dalam berbelanja, namun tidak hanya keuntungan berbelanja onlie juga memliki kerugian seperti terjadi penipuan dan tidak ada kesesuaian antara gambar yang dipromosikan dengan barang yang datang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE BIMA) mahasiswa semester III angkatan 2019-2020 mendapatkan bahwa mahasiswa lebih menyukai berbelanja pada media sosial seperti facebook karena aksesnya lebih mudah, tidak hanya itu kemudahan berbelanja di media sosial facebook seperti tidak mengharuskan berkeliling di toko tidak hanya itu dengan berbelanja online dapat membeli barang yang jauh dari Bima, Namun dalam berbelanja online tida selalu memberikan kemudahan ataupun keuntungan, maraknya kasus penipuan dalam berbelanja online di bima membuat masyarakat atau mahasiswa tidak selalu ingin menggunakan media sosial facebook sebagai tempat berbelanja.

Para pengguna facebook banyak sekali yang melakukan promosi dan berjualan di facebook namun banyak juga yang melakukan penipuan dengan berbagai macam, salah satu contohnya adalah setelah pembeli mentrasfer uang tetapi barang yang dibeli tidak sampai terkadang juga penjual langsung hilang kabar ataupun memblokir akun facebook dari pembelinya apalagi pada bagian daerah bima banyak yang terkena penipuan seperti ini karena berbelanja di media sosial facebook pada daerah lain tanpa melihat dan meneliti dengan baik akun penjual tersebut hanya karena barang yang dijual tidak ada di Bima ataupun harganya lebih murah. Hal-hal seperti menjadikan minat berbelanja di media sosial facebook berkurang.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap minat beli pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE BIMA).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 E-commerce

Awal perjalanan e-commerce di mulai dari tahun 1960,an ketika bisnis mulai menggunakan elektronik data interchange (EDI) untuk berbagi dokumen bisnis dengan perusahaan lain. Pada tahun 1969, American National standards institute mengembangkan ASC X12 sebagai standar universal bagi pebisnis untuk berbagai dokumen melalui jaringan elektronik. Setelah jaringan individu yang saling berbagi dokumen elektronik tumbuh pada tahun 1980-1990 munculnya ebay (www.ebay.com) dan Amazon (www.amazon.com) merevolusi industri e-commerce. Konsumen dapat membeli barang dalam jumlah tak terbatas secara online.

E-commerce menurut Laundon (1998) E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan

dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantar transaksi bisnis.

Ada beberapa Jenis-jenis e-commerce yaitu :

a. E-commerce business to business (B2B)

Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, dimana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Contohnya dari bisnis B2B adalah ketika dua belah perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online, begitu dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit.

b. E-commerce consumer to consumer (B2c)

Business to consumer di lakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Teransaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa.

c. E-commerce consumer to consumer (c2c)

Teransaksi di lakukan oleh konsumen ke konsumen. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi c2c disini menjadi perantara antara penjual dan pembeli.

d. Consumen to busines (C2B)

C2B adalah kebalikan dari B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli.

Manfaat E-commerce yaitu:

- Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun.
- Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang sesuai.
- Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setela melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce.

2.2 Media sosial

Menurut Chiris Brogran (2010), media sosial adalah seperangkat alat

komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Adapun menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2016) media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara dan video, informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan dan vice versa.

Menurut (Van Dijk 2013) (Nasrullah, 2015:11) media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Menurut Tracy L. Tulen dan Michael R. Solomon (2014) adalah sarana untuk komunikasi, kolaborasi, serta penanaman secara daring diantara jaringan orang-orang, masyarakat, dan organisasi yang saling terkait dan bergantung dan diperkuat oleh kemampuan dan mobilitas teknologi.

Menurut Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes (2015) media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak yang mendorong nilai dari user-generated content dan persepsi interaksi dengan orang lain.

Menurut (Benito aditio, 2011) Indikator-indikator dari media sosial yaitu:

a. Kemudahan

Ketika seseorang ingin berbelanja di media sosial, hal yang menjadi pertimbangan bagi pembeli *online* adalah faktor kemudahan penggunaan. Kemudahan juga digunakan sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu teknologi dapat digunakan dengan mudah. Kemudahan dalam mencari informasi pada *online*

shop sebaiknya mencakup informasi berkaitan dengan produk dan jasa pada *online shop*.

b. Kepercayaan

Kepercayaan pembeli terhadap *website online shop* terletak pada popularitas *website online shop* tersebut. Semakin popularitas suatu *website*, maka pembeli lebih yakin dan percaya terhadap reliabilitas *website* tersebut. Biasanya pada situs *online shopping*, situs akan menampilkan informasi tentang penjual-penjual yang sering diakses oleh orang.

Adapun menurut Mark Hopkins (2008) media sosial adalah yang mencakup media platform media baru tetapi juga menyiratkan dimasukkannya sistem seperti friendfeed, facebook, dan lain-lain pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial.

Berikut ini ada beberapa karakteristik dari media sosial yaitu:

- 1) Keikutsertaan yaitu media sosial memberikan kontribusi dan umpan balik bagi orang-orang yang tertarik.
- 2) Keterbukaan sebagian besar media sosial terbuka untuk menerima suatu umpan balik dan partisipasi.
- 3) Percakapan media sosial menggunakan cara berkomunikasi yang lebih baik, yaitu menggunakan metode percakapan komunikasi dua arah.
- 4) Masyarakat, media sosial memungkinkan komunikasi untuk terbentuk dengan cepat dan dapat berkomunikasi dengan efektif.
- 5) Menghubungkan, sebagian besar jenis media sosial berkembang karena keterhubungan mereka. Dari karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pengguna media sosial dituntut untuk berpartisipasi dalam suatu komunitas dan jaringan dalam lingkup yang luas, tidak hanya skala nasional tetapi merambat skala global.

2.3 Minat beli

Menurut Kotler & Keller, (2012:131) minat beli adalah sebuah

perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk.

Menurut (schiffman. Kanuk 2004:25), menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen.

Menurut (Abzari, et al. 2014) minat beli adalah proses yang ada diantara evaluasi alternatif dan keputusan pembeli. Setelah konsumen melakukan evaluasi terhadap alternatif yang ada, konsumen memiliki minat untuk memberi suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

Menurut (Rizky Amalina Bachriansyah 2011) indikator dari minat beli yaitu:

- 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- 2) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk
- 3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensial utama pada produk tersebut.
- 4) Minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

2.4 Perkembangan hipotesis

- H_0 = tidak ada pengaruh media sosial terhadap minat beli online di Sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) Bmia.
- H_1 = ada pengaruh media sosial terhadap minat beli online di Sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) Bima. Menurut Mila setiawati¹, Yultifa' aini², welven aida³, media sosial sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa program studi

manajemen universitas pasir pengairan.

Menurut Cahyaning Raheni media sosial terdapat pengaruh terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah palu. Menurut Febian risa¹, Herrie lutfi² media sosial berpengaruh signifikan secara persial terhadap minat beli konsumen.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif (sugiyono 2016).

3.2 Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:126). populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada mahasiswa stie bima semester 3 tahun akademik 2019/2020 berjumlah 285 orang, sampel yang digunakan adalah 50 orang. sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Soehartono, 2004:57). Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah teknik non probability sampling yaitu purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133). Adapun alasan menggunakan teknik pengambilan sampel itu yaitu, 50 responden sudah dianggap baik dan cukup mewakili responden yang intens menggunakan media sosial facebook.

3.3 Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner dengan skala likert yang terdiri dari 1 sampai 5 skala dan sejumlah pertanyaan.

Instrumen penelitian di jabarkan dalam bentuk indikator agar penelitian ini mempunyai arah dalam menyusun pertanyaan. Instrumen penelitian adalah aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Hasil instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisis sesuai dengan metode penelitian.

3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi merupakan aktifitas meninjau suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang bertujuan mendapatkan informasi.
- b. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan dengan cara menyebarkan angket yang berisi sejumlah pertanyaan tersebut memiliki bobot nilai yang berbeda yang lebih mendalam dalam jumlah responden sedikit atau kecil.
- c. Studi pustaka merupakan tahap yang penting dalam kegiatan penelitian untuk menghipun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.

3.5 Lokasi penelitian

Sekolah tinggi ilmu ekonomi (stie) bima. Jl. Wortel mongisidi kompleks tolobali kota bima.

3.6 Jenis dan sumber data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung atau diukur dengan angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden pada obejek penelitian.

3.7 Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu:

- a. Uji validitas
Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (cintent) dari suatu instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian (sugiyono, 2006).
- b. Reliabilitas
Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi dilapangan (sugiyono dan sitinjik, 2006).
- c. Regresi linier sederhana
Regresi linier sedarhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independent (x) dengan variabel independent (y).
- d. Koefisien korelasi sederhana
Koefisien korelasi sederhana adalah nilai yang menunjukan kuat atau tidaknya hubungan linier antara variabel.
- e. Koefisien determinasi
Koefisien determinasi adalah seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjalankan varians dari variabel terikatnya.
- f. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji validitas

Tabel 1
Hasil analisis uji validitas

variabel (pertanyaan)	r (hitung)	r (tabel)	keterangan
variabel X (media sosial)			
pertanyaan 1	0,759	0,230	Valid
pertanyaan 2	0,753	0,230	Valid
pertanyaan 3	0,783	0,230	Valid
pertanyaan 4	0,714	0,230	Valid
pertanyaan 5	0,708	0,230	Valid
pertanyaan 6	0,612	0,230	Valid

Data olahan 202

Ujireabilitas
Tabel 2

variabel (pertanyaan)	r (hitung)	r (tabel)	keterangan
variabel Y (minat beli)			
pertanyaan 1	0,588	0,230	Valid
pertanyaan 2	0,448	0,230	Valid
pertanyaan 3	0,662	0,230	valid
pertanyaan 4	0,693	0,230	valid
pertanyaan 5	0,687	0,230	valid
pertanyaan 6	0,719	0,230	valid
pertanyaan 7	0,697	0,230	valid
pertanyaan 8	0,634	0,230	valid

Data olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai r hitung setiap item > r tabel maka dinyatakan setiap item dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas variabel penelitian

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Deleted
item_1	19.10	10.704	.622	.771
item_2	19.36	11.337	.639	.770
item_3	19.52	10.867	.670	.761
item_4	19.98	10.632	.534	.795
item_5	19.40	11.551	.575	.782
item_6	18.94	11.935	.433	.812

Data olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui indikator memiliki nilai lebih besar dari 0,60, Maka instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliabel atau konsisten.

Uji normalitas tabel 3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean .0000000 Std. Deviation 3.76365996
Most Extreme Differences	Absolute Positive .106 Negative -.062
Kolmogorov-Smirnov Z	.752
Asymp. Sig. (2-tailed)	.624

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel output spss tersebut, diketahui bahwa nilai signifikan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.624 lebih besar dari 0.005. maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalita Kolmogorov-smirnov diatas, dapat disimpulkan bahawa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam regresi sudah terpenuhi.

Uji multikolinieritas

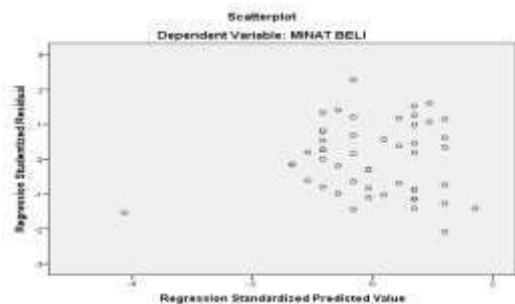
Tabel 4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.637	3.254		3.883	.000		
1 MEDIA SOSIAL	.717	.138	.600	5.199	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: MINAT BELI

Berdasarkan tabel output "Coefficients" pada bagian "collinearity Statistics" diketahui nilai tolerance untuk variabel media social (x) adalah 1.000 lebih besar dari 0.10. sementara nilai VIF untuk variabel media social (x) 1.000 maka mengaku pada dasar keputusan dalam uji multikonearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas das model regresi.

Gambar 1



Berdasarkan output Scatterplots di atas dapat diketahui:

1. Titik-titik penyebaran di atas dan bawah atau disekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas dan dibawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit.
4. Pembyebaran titik-titik tidak berpola. Dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastista.

Analisis regresi

Tabel 5
Persamaan regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	12.637	3.254
	media social	.717	.138

a. Dependent Variable: minat beli online Dataolahan 2020

Berdasarkan hasil uji statistic 1 yang ditunjukan pada tabel 5 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli online hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikasi kurang dari 0,05 dan nilai t hitung adalah sebesar 5,199 dengan nilai t tabel sebesar 2,010. Nilai t hitung kurang dari t tabel artinya Ha diterima Ho ditolak dengan demikian dapat dikatakan media sosial berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli online.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang pengaruh media social terhadap minat beli online (studi kasus pada mahasiswa stie bima) sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Media social berpengaruh terhadap minat beli online (studi kasus pada mahasiswa stie bima) terbukti dengan banyaknya pembeli hal ini terlihat dari t hitung sebesar 0,5199 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,000 sehingga nilai di bawah 0,005.
2. Terdapat pengaruh yang kuat antara variabel media sosial terhadap minat beli online. Hal ini terlihat dari nilai R sebesar 0,600.
3. Variabel media sosial mempengaruhi minat beli online hanya sebesar 0,36% sedangkan sisanya sebesar 64% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini hal ini dapat terlihat R square sebesar 0,36%

5.2 Saran

1. Saran bagi mahasiswa stie bima lebih teliti dalam berbelanja melalui media social sehingga mampu menumbuhkan rasa minat beli terhadap suatu barang.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil variabel penelitian yang sama diharapkan untuk lebih menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas sudjiono, 2010. Pengantar statistik pendidikan. Jakarta: Rajawali press.
- Chiris dan Brogran 2010, social media 101: *tactis and tips to develop your business online*. Jhon Wiley & sons
- kevin lane keller (2016). *Marketing managemen*, 15th Edition, pearson Education,Inc
- Kotler dan keller, 2012 Marketing management, thirteenth Edition. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, 2006 *E-commerce* (memahami perdagangan modern didunia maya). Informatika bandung.
- schiffman. Kanuk (2004:25) Perilaku konsumen . Edisi 7 *prentice Hall*. Jakarta

Sugiyono,sitinjak, (2006). *LISREL*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, 2012. " metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D ". Cetakan ketiga belas, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono,sitinjak, 2006. *LISREL*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

van dijck 2013 . *The culture of connectivity:A critical history of social media*. UK.Oxniversity press Yogyakarta

PENGARUH KEPEMIMPINAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PERPUSTAKAAN UTSMAN BIN AFFAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

Fhara

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
fhara@iainmakassar.ac.id

Muh Najib

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
najib@iainmakassar.ac.id

Hamzah Hasan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
hamzahhasan463@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the influence of leadership, quality of human resources and organizational culture on employee performance at the Utsman Bin Affan Library of UMI Makassar. The population of this research is the total number of employees within the Utsman Bin Affan library at UMI Makassar, totaling 30 people. The research approach used is descriptive quantitative. Data collection was carried out by distributing questionnaires and literature study. Processing and data analysis using the latest version of the SPSS application. The results of this study indicate that based on partial testing, leadership variables, human resource quality, and organizational culture have a positive and significant effect on employee performance at the Utsman Bin Affan UMI Makassar Library. This can be seen from the value of $t\text{-count} > t\text{-table}$, namely 2.98 which is obtained from $df_2 = 26$; $\alpha = 0.05$ and it can also be seen from the significance level value < 0.05 , namely the leadership variable with the $t\text{-test } 3.121 > 2.98$ or the significance $0.004 < 0.05$ (significant effect), the variable quality of human resources with $t\text{-test } 3.566 > 2.98$ or a significance of $0.001 < 0.05$ (significant effect), and the organizational culture variable with $t\text{-count } 3.006 > 2.98$ or a significance of $0.002 < 0.05$ (significant effect).

Keywords: leadership, human resource quality, organizational culture and employee performance.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar. Populasi penelitian ini adalah seluruh jumlah pegawai lingkup Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar yang berjumlah 30 orang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi terbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian secara parsial, variabel kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar. Hal ini terlihat dari nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu 2,98 yang diperoleh dari $df_2 = 26$; $\alpha = 0,05$ dan juga dapat dilihat dari nilai tingkat signifikansi $< 0,05$ yaitu variabel kepemimpinan dengan uji- t $3,121 > 2,98$ atau signifikansi $0,004 < 0,05$ (berpengaruh signifikan), variabel kualitas sumber daya manusia dengan $t\text{-test } 3,566 > 2,98$ atau signifikansi $0,001 < 0,05$ (pengaruh signifikan), dan variabel budaya organisasi dengan $t\text{-hitung } 3,006 > 2,98$ atau signifikansi $0,002 < 0,05$ (pengaruh signifikan).

Kata kunci: kepemimpinan, kualitas SDM, budaya organisasi dan kinerja karyawan.

1. PENDAHULUAN

Perpustakaan dituntut dapat bertransformasi sesuai dengan tuntutan zaman yang dinamis, agar perpustakaan tetap eksis dan menjalankan fungsinya dengan baik salah satunya ialah dapat menyediakan dan memenuhi permintaan informasi secara cepat dan tepat.¹

Upaya menghadapi berbagai tantangan perubahan lingkungan agar perpustakaan dapat bertransformasi dan melaksanakan fungsi perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dalam pembangunan sumber daya manusia, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja pegawai agar dapat merespon kebutuhan masyarakat yang kian kompleks. Setiap organisasi diharapkan memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dengan prinsip efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang visioner dan memiliki optimisme membawa organisasi pada puncak keberhasilan melalui peningkatan kinerja pegawai.

Ada tiga hal yang harus dikembangkan oleh seorang pemimpin yakni seorang pemimpin harus mampu memimpin diri sendiri (*managing self*), memimpin orang (*managing people*), dan memimpin tugas (*managing job*).² Efektivitas dalam melaksanakan kepemimpinan harus dimulai dari diri sendiri. Tidak mungkin seorang pemimpin yang gagal membuat dirinya efektif akan berhasil dalam mengefektifkan orang lain ataupun pekerjaannya. Kepemimpinan merupakan modal dasar yang harus dimiliki seseorang dalam mengarahkan perilaku orang lain untuk tujuan tertentu. Untuk mewujudkan sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan kepemimpinan yang dapat memotivasi pegawai untuk berkinerja profesional dan

produktif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

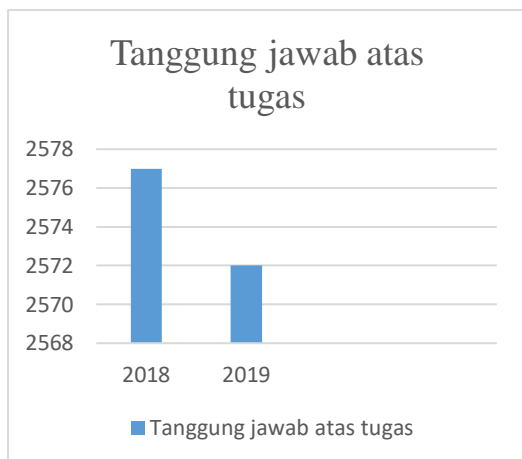
Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah Swt berfirman dalam QS. Al Mukminun /23:8.

Selain kepemimpinan, pada dasarnya sumber daya manusia adalah suatu sumber daya juga sangat dibutuhkan oleh organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan. Karena bagaimanapun juga, manusialah yang akhirnya memprediksi kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi organisasi.

Untuk melakukan perubahan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan asset utama yang tidak ternilai harganya karena dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada satuan kerja secara efektif dan efisien. Sebaik apapun sistem yang diterapkan dalam organisasi jika tidak didukung sumber daya manusia yang berkualitas maka sistem tersebut tidak akan berjalan baik. Sebaliknya, seburuk apapun sebuah sistem jika didukung sumber daya manusia yang memadai maka sistem tersebut akan berusaha diperbaiki.

Rendahnya rasa tanggung jawab pegawai terhadap waktu kerja dan tanggung jawab atas tugas pokok menjadi salah satu indikator kualitas sumber daya manusia dalam menilai kinerja pegawai. Berikut dukungan data grafik hasil rekapitulasi penilaian tanggung jawab atas tugas tahun 2018-2019

Diagram 1
Rekapitulasi Penilaian Tanggung Jawab
Pegawai Perpustakaan Utsman Bin Affan
UMI Makassar



Sumber: Rekapitulasi DP3 tentang Penilaian Tanggung Jawab

Data diatas menunjukkan bahwa, dari hasil rekapitulasi DP3 tentang penilaian tanggung jawab atas tugas pegawai terjadi penurunan tanggung jawab dari tahun 2018 dengan nilai rekapitulasi 2577 dan tahun 2019 dengan nilai 2572. Hal ini sekaligus megindikasi kinerja pegawai dalam satu tahun terakhir menurun.

Selain kepemimpinan dan sumber daya manusia, suatu organisasi juga perlu memperhitungkan budaya organisasi yang kuat dan sejalan dengan beberapa batasan-batasan yang berlaku. Selama memiliki budaya organisasi yang kuat, berdampak baik dan dapat diterapkan dengan baik oleh pegawai, maka dapat memperlancar aktivitas organisasi. Budaya organisasi yang kuat tidak serta merta akan berjalan dengan mudah, sehingga perlu ada penyesuaian di dalamnya.

Integritas menciptakan keyakinan dan kepercayaan yang akan mendukung pencapaian kerja pada perusahaan tanpa tekanan dan paksaan, namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pegawai Perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar kurang dilibatkan dalam penyusunan

program kerja, dan anggaran yang berbasis kinerja serta program evaluasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa pegawai dan pimpinan tidak memiliki kerjasama dan komunikasi yang kuat dalam membangun perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar yang lebih partisipatif. Padahal Kerja sama adalah salah satu modal untuk membangun organisasi. Dengan kerja sama, pegawai akan saling bertukar pikiran dan menetapkan satu keputusan yang berdampak penting bagi masyarakat atau mahasiswa dalam hal ini.

2. KAJIAN TERDAHULU

Tesis dengan judul “Pengaruh kualitas sumber daya manusia, motivasi kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Aceh Tengah” oleh Maswani tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, motivasi kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 93 responden. Data analisis menggunakan uji statistik regresi linier berganda. Hasil pengujian membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia, motivasi kerja dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah secara simutan, namun secara parsial hanya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dari segi variable serta jumlah sampe yang digunakan.

Penelitian ini membahas tentang “pengaruh lingkungan kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja: studi pada pegawai Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga” oleh Tri Widodo

tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh factor lingkungan kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau pegawai Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, yang mempunyai golongan kepangkatan minimal II, yang berjumlah 60 orang, sampel dalam penelitian ini semua anggota populasi sebagai sampel. Data analisis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan masing-masing variabel terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dari segi variable serta jumlah sampe yang digunakan.

Tesis dengan judul “Pengaruh kepemimpinan, kualitas SDM dan budaya organisasi terhadap optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional RI Jakarta” oleh Diana Toyang tahun 2007. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi terhadap optimalisasi kinerja pegawai secara empiris. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Perpustakaan Nasional RI yang berjumlah 693, sedangkan responden yang diteliti sebanyak 120 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Dari hasil pengujian tersebut terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap optimalisasi kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa jika kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi secara bersama-sama ditingkatkan, maka optimalisasi kinerja pegawai akan meningkat pula. Selanjutnya dapat diinterpretasikan bahwa optimalisasi kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh

faktor kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi sebesar 65% sedangkan sisanya 35% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kenaikan pangkat, motivasi, kesejahteraan, dan lain-lain. Untuk penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan adalah jumlah sampel dimana Diana Toyang menggunakan sampel berjumlah 120 orang.

Penelitian ini membahas tentang “analisis pengaruh kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja dosen dan karyawan di Universitas Pwiyatan Daha Kediri” oleh Ari Cahyono tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja dosen dan karyawan di Universitas Pwiyatan Daha Kediri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen dan karyawan yang berjumlah 100 orang, sedangkan sampel yang digunakan adalah keseluruhan dari jumlah populasi tersebut. Data analisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen dan karyawan di Univeristas Pwiyatan Daha Kediri. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dari segi variable serta jumlah sampe yang digunakan.

Tesis dengan judul “Pengaruh kepemimpinan, motivasi, insentif, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Semarang” oleh Hentry Sukmasari tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi, insentif, lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan, insentif, dan lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai, motivasi dan kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dari segi variable penelitian serta jumlah sampe yang digunakan.

3. METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sampel dari populasi dan studi kepustakaan, selanjutnya data kuesioner diolah dan dianalisa menggunakan aplikasi SPSS versi terbaru.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI dengan jumlah populasi sebanyak 30 orang. Mengingat

populasi sedikit, maka teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh yang berarti sampel yang mewakili jumlah populasi. Sampel ini dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian analisis parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar. Hasil pengujian dapat diketahui melalui nilai t-hitungnya, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka beta atau *standardized coefficient*. Adapun hasil pengujian secara parsial (t-hitung) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Pengujian Hipotesis secara Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.174	.788		1.838	1.410
	Kepemimpinan	.350	.112	.477	3.121	.004
	KualitasSDM	.543	.152	.683	3.566	.001
	BudayaOrganisasi	.242	.157	.300	3.006	.002

Sumber: hasil analisis diolah pada tanggal 27 Maret 2020

Berdasarkan pengujian secara parsial seperti pada tabel 8 menunjukkan variabel kepemimpinian, kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar. Hal ini dapat diketahui dari nilai t-hitung > t-tabel yakni 2,98 diperoleh dari $df_2=26$; $\alpha=0,05$ dan juga dapat diketahui dari nilai tingkat signifikansi < 0,05 yaitu variabel kepemimpinan dengan t-

hitung 3.121 > 2,98 atau signifikansi 0.004 < 0.05 (berpengaruh signifikansi) dan menempati urutan kedua variable yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Hal ini menunjukkan bahwa ditahun 2020 variabel kepemimpinan (X1) mengalami peningkatan yang signifikan dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 30 orang dan didukung dengan kebijakan-kebijakan baru

kepala perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar yang dibahas pada rapat kerja Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar 2020-2023.

Variabel kualitas sumber daya manusia dengan t-hitung $3,566 > 2,98$ atau signifikansi $0,001 < 0,05$ (berpengaruh signifikansi) dan menempati urutan pertama sekaligus menjawab hipotesis keempat yakni hipotesis yang paling dominan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pada tahun 2020 seluruh pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan telah mengikuti ujian kompetensi pustakawan yang diselenggarakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pustakawan yang mengikuti ujian kompetensi dinyatakan lulus dan kompeten pada bidangnya. Bukan hanya itu, seluruh pegawai yang ada di perpustakaan telah mengikuti pencerahan qalbu di pondok pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas berilmu amaliah dan beramal ilmiah serta berakhlakul karimah. Memiliki karakter yang islami dalam mengemban misi Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Variabel budaya organisasi dengan t-hitung $3,006 > 2,98$ atau signifikansi $0,002 < 0,05$ (berpengaruh signifikansi) dan menempati urutan ketiga variable yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dapat dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 30 orang, pada indikator kedisiplinan dan keterbukaan rata rata responden menjawab tidak setuju sebanyak 26.67 % dan untuk indikator kerjasama rata-rata responden memberikan jawaban setuju atau sekitar 80%.

Selanjutnya hasil persamaan regresi linear berganda dari model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$
$$Y = 0,174 + 0,350 X_1 + 0,543 X_2 + 0,242 X_3$$

Selanjutnya, hubungan fungsional variabel bebas X_1 dan variabel terikat Y dilihat dari koefisien *standardized beta*, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_{\text{beta}} = 0,477 X_1 + 0,683 X_2 + 0,300 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut diatas, maka dapat diinterpretasi sebagai berikut:

- Konstanta (b_0) = 0,174, yang menunjukkan bahwa jika tidak ada upaya peningkatan kinerja pegawai melalui kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi, maka kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar akan konstan yang jika dianggakan adalah 0,174.
- Nilai koefisien kepemimpinan (β_1) = 0,350, yang menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar. Hal ini berarti semakin baik kepemimpinan, maka kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar semakin baik pula. Besarnya pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar dapat diketahui melalui angka beta atau *standardized coefficient* 0,477 atau 47,7 %.
- Nilai koefisien kualitas SDM (β_2) adalah 0,683, yang menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas SDM, maka kinerja pegawai cenderung meningkat. Besarnya pengaruh variabel kualitas SDM terhadap kinerja pegawai dapat diketahui melalui angka beta atau

standardize coefficient yaitu 0,683 atau 68,3%.

- d. Nilai koefisien budaya organisasi (β_3) adalah 0,300 menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar. Hal ini berarti semakin tinggi budaya organisasi, maka kinerja pegawai cenderung meningkat. Besarnya pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dapat diketahui melalui angka beta atau *standardize coefficient* yaitu 0,300 atau 30,0 %.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel yang berpengaruh signifikan tersebut, ternyata variabel kualitas sumber daya manusia (X2) yang berpengaruh dominan dalam meningkatkan kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar, karena memperoleh angka beta atau *standardize coefficient* yang lebih besar dari variabel lainnya.

4.1 Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai

Adanya pengaruh signifikansi kepemimpinan terhadap kinerja pegawai sangat ditentukan oleh besarnya peran dari setiap indikator yang membentuknya, yakni: Kepemimpinan Operasional, mampu menjabarkan visi dan misi kedalam kegiatan operasional lembaga; Kepemimpinan Organisasi, memahami tata kerja antar unit dalam organisasi; Kepemimpinan publik, mampu menjalankan kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Ketiga indikator tersebut telah diberdayakan secara maksimal untuk mendukung kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar.

Kepemimpinan menekankan pada keberhasilan dalam mempengaruhi bawahan agar bekerja profesional. Menurut Yukl Gary dalam Pius Nalang, kepemimpinan

adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi orang lain agar mampu berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan keberhasilan organisasi.³

Jadi pemimpin itu sesungguhnya mempunyai tanggung jawab, baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan setiap orang tidak mempunyai kesamaan dalam menjalankan kepemimpinannya. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar.

4.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai

Adanya pengaruh signifikan kualitas SDM terhadap kinerja pegawai sangat ditentukan oleh besarnya peran dari setiap indikator yang membentuknya, yakni; Kecerdasan Intelektual (*knowledge*) kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan; Keterampilan (*Skill*), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan; Sikap Prilaku yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Bukti empiris yang mengaitkan kualitas sumber daya manusia dengan kinerja pegawai menunjukkan hasil yang konsisten dengan studi ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Diana Toyang (2007) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, temuan empiris yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara

kualitas sumber daya manusia dengan kinerja pegawai.

4.3 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai

Adanya pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai sangat ditentukan oleh besarnya peran dari setiap indikator yang membentuknya, yakni: Disiplin, perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku didalam maupun diluar organisasi. Disiplin meliputi ketaatan terhadap peraturan, prosedur, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan sebagainya; Keterbukaan, kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada semua mitra kerja untuk kepentingan organisasi; Kerja sama, kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target organisasi.

Bukti empiris yang mengaitkan budaya organisasi dengan kinerja pegawai menunjukkan hasil yang konsisten dengan studi ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tri Widodo (2010) dan Ari Cahyono (2012) bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, temuan empiris yang dihasilkan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai.

Berdasarkan analisa di atas, maka dapat diketahui variabel budaya organisasi merupakan faktor penting dan menempati urutan ketiga dalam peningkatan kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar. Oleh karena itu, budaya organisasi masih ditingkatkan lagi terutama pada indikator yang membentuknya agar kinerja pegawai dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang ditunjukkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar, artinya semakin efektif pimpinan mengakomodir bawahannya, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat pula. Besarnya pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar dapat diketahui melalui angka beta atau *standardized coefficient* 0,477 atau 47,7 % penting dan menempati urutan kedua dalam peningkatan kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar.
2. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar, artinya semakin efektif kualitas sumber daya manusia, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat pula. Besarnya pengaruh variabel kualitas SDM terhadap kinerja pegawai dapat diketahui melalui angka beta atau *standardize coefficient* yaitu 0,683 atau 68,3% penting dan menempati urutan pertama dalam peningkatan kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan.
3. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar, artinya semakin meningkat budaya organisasi, maka kinerja pegawai juga akan semakin meningkat pula. Besarnya pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dapat diketahui melalui angka beta atau *standardize coefficient* yaitu 0,300 atau 30,0 % dan menempati urutan ketiga

dalam peningkatan kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar. Oleh karena itu, budaya organisasi masih ditingkatkan lagi terutama pada indikator yang membentuknya agar kinerja pegawai dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

4. variabel kualitas sumber daya manusia (X2) yang berpengaruh dominan dalam meningkatkan kinerja pegawai di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar, karena memperoleh angka beta atau *standardize coefficient* yang lebih besar dari variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Nalang, Pius. (2013). *Kepemimpinan Transformasional: Konsep, Teori, dan Realitas*, Cet, 1; Makassar: Masegana Press.
- NS, Sutarno. (2005). *Tanggung Jawab Perpustakaan dalam Mengembangkan Masyarakat Informasi*. Jakarta: Pantai Rei.
- Taulus, Afny. D. (2018). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro*. JAP: UNSRAT.

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

Asdar

Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: asdar@unismuh.ac.id

Naidah

Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: naidah@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of government spending and population on local revenue in Makassar City. The analysis method used in this research is multiple linear regression. Based on the results of the calculation of SPSS version 2.3, it shows that government spending has a positive and significant effect on Regional Original Income (PAD) in Makassar City, where the regression coefficient is 1.108 with a significant level of 0.011 ($0.011 < 0.05$). Meanwhile, the population has a negative and significant effect on Regional Original Income (PAD) in Makassar City, where the regression coefficient is -5.861 with a significant level of 0.003 ($0.003 < 0.05$).

Keywords: Government Expenditure, Total Population and Regional Original Income (PAD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 2.3 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar, dimana koefisien regresi sebesar 1,108 dengan tingkat signifikan sebesar 0,011 ($0,011 < 0,05$). Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar, dimana koefisien regresi sebesar -5,861 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 ($0,003 < 0,05$).

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah, kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia UU RI Nomor.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU RI Nomor.32 tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintah, juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu, ada 16 kewenangan yang dimiliki oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri. Pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Dalam mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal, maka diberlakukannya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini di atur dalam UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Desentralisasi fiskal yang di atur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam yaitu pajak daerah (*tax assigment*), dana bagi hasil (*revenue sharing*) dana alokasi umum sertadana alokasi khusus. Desentralisasi fiskal ini pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan

dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah, seperti diatur dalam UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan dalam UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 2 di jelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsisten keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan. Dalam UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 3 tentang perimbangan keuangan dijelaskan dana pemerintah dan pemerintah bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini dari terdiri dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Soleh dan Rochmansjah (2010:20) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat). Menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk

dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Adanya dana perimbangan melalui DAU ini ternyata justru menjadi ketergantungan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang di gali dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain. Pendapatan Asli Daerah juga digunakan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah (Darise, 2009: 48).

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan resmi daerah yang terus diupayakan untuk ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang semakin nyata, dinamis dan bertanggungjawab dan dapat terwujud.

Peran pemerintah dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu perekonomian yang dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah terutama dalam sektor pelayanan publik. Sebagian pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pembangunan infrastruktur suatu wilayah atau daerah, oleh sebab itu pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, disamping itu pemerintah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya (Deliamov 2008: 168).

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termaksud anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lainnya untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan dan tingkat kegiatan ekonomi. Meningkatnya kegiatan ekonomi maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka peneliti akan mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yaitu "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung diakui oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak, Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus

dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada anggaran daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan di gunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Rindu K (2009 ; 23) dalam struktur yang baru, sisa lebih APBN tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun di masukan sebagai pembiayaan daerah, sedangkan anggaran belanja rutin dan pembangunan yang ada pada struktur APBN sebelumnya di arahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasikan dalam belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik, dengan struktur yang baru akan lebih mudah mengetahui surplus dan defisit dari anggaran dan pendapatan belanja daerah sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik).

Wanimbo (2013;11) pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja pun memiliki pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian yang di lakukan oleh Amuna (2012;11), menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK), pendapatan asli daerah (PAD), dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kewenangan ekonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintah, seperti perencanaan, perizinan, pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi di tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau belum di laksanakan daerah otonom kabupaten dan kota, serta kewenangan pemerintah lainnya.(safitri 2009 : 20).

Halim Abdul & Mujib Ibnu (2009: 19) menjelaskan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu berupa sistem keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembangian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintah sesuai dengan peraturan UU tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi ruang lingkup pengaturan dari :

1. Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintah di daerah

2. Sumber-sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggung jawab daerah yang meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman
- d. Pembiayaan pelaksanaan asas dekonsentrasi bagi provinsi
- e. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
- f. informasi keuangan daerah

Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dana pemerintah daerah pasal 27 jumlah dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dilaksanakan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Yang dimaksud celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurang dengan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 28 yang dimaksud kebutuhan fiskal daerah adalah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan yang dimaksud kapasitas fiskal daerah adalah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.

2.3 Belanja Daerah

Pajak daerah yang identik dengan pajak memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yaitu pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah disamping retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten /kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang di tetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Mardiasmo (2008:12-13) istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

- a. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang,

termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas, sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam permendagri No 13 tahun 2006 pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Yang termaksud urusan wajib adalah sebagai berikut: pendidikan, kesehatan, pekerja umum, perumahan rakyat, penataan ruangan, perencanaan pembangunan, perhubungan, pertahanan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, sosial, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik luar negeri, pemerintah umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, komunikasi dan informatika. Sedangkan yang termaksud urusan pilihan sebagai berikut: pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, transmigrasi.

Belanja menurut urusan pemerintah penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undang di jabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklarifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

- 1) Pelayanan umum
- 2) Ketertiban dan ketentraman
- 3) Ekonomi
- 4) Lingkungan hidup
- 5) Perumahan dan fasilitas umum
- 6) Kesehatan
- 7) Pariwisata dan budaya
- 8) Pendidikan
- 9) Perlindungan sosial

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) permendagri No. 13 tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Yang termaksud belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja bunga
- 3) Belanja subsidi
- 4) Belanja hibah
- 5) Bantuan sosial
- 6) Belanja bagi hasil
- 7) Bantuan keuangan
- 8) Belanja tidak tertuga

Kegiatan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang termaksud belanja langsung sebagai berikut:

1) Belanja modal

Belanja modal untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja dan jasa barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dsan kegiatan pemerintah daerah.

2.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat di pengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang di tarik juga akan meningkat (simanjuntak 2011 :732). Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah menurut Population Reference Bureau (PRB 2011).

Penduduk adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia (UU No. 24 tahun 2013). Jumlah penduduk merupakan faktor penentu adanya disparitas

pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan, dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Jaya dan Widanta 2014: 202).

Anata (2008:37) menjelaskan bahwa, penduduk adalah yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif. Penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin penduduk produktif maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, selain itu juga jumlah penduduk kota yang diimbangi dengan SDM yang telah terdidik akan membantuh membangun pamarintah daerah.

Oleh karena itu penduduk sangat menentukan perekonomian di pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jadi penduduk diharapkan, tetapi di imbangi dengan kesempatan kerja serta perekonomian baru yang kemudian pada jangka panjang akan lebih mengarah pada pembangunan pemerintah.

Adapun hukum Wagner (dalam Mangkoesobroto, 2010:171) mengutarakan bahwa dalam suatu perekonomian di dalam masyarakat, apabila jumlah pendapatan meningkat perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat karena disebabkan adanya penerimaan pendapatan yang melalui

pajak dan retribusi didalam kegiatan ekonomi.

Adam Smith (dalam Santoso dan Retno, 2010: 16) berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris tentang pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar, dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk yang tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat di tarik juga meningkat.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga digunakan sebagai sumber penerimaan yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan kegiatan rutin maupun pembangunannya yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,

bagian laba usaha milik daerah, dan lain lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2014:16).

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU RI No.33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah), pendapatan daerah berasal daerah penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sistem bambagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembaruan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU RI No. 28 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain serta penerimaan keuangan tersebut di atur oleh daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008:10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat

berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin terlalu tergantung dari APBN, kemajuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan PAD yang positif disisi penerimaannya dan peranannya dari tahun ke tahun makin meningkat.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun bangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pratiwi, 2008:16).

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. (Safitri, 2009:24).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan hasil yang di peroleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelola APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Yani (2008 :73).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah

- 3) Hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan dan

- 4) Lain lain pendapatan daerah yang sah

b. Pendapatan transfer

- c. Lain lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Yani (2008 : 74) PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. Jenis jenis pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Pendapatan denda pajak.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang pemungut retribusi. (Prakaso, 2010: 20). Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi kan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 3) Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi aras kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan: pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas, tertentu guna melindungikepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan undang-undang RI No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang No 17 tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai bagi hasil penerimaan pajak penghasilan (PPH) pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi, selain itu dana reboisasi yang semula termaksud bagian dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diahlikan menjadi DBH.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksimalkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formulah yang mempertimbangkan

kebutuhan dan potensi daerah, DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Dalam undang-undang ini ditugaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah potensi fiskalnya, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Jadi Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya M Ribai subhanda lubis (2009; 9).

c. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan jumlah

penduduk. Sementara itu pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk merupakan hubungan fungsional.

1) Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran pemerintah
Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tertentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagainya lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur pembangunan yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

2) Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk
Adriani dan Handayani (2008:79) melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD yang hasilnya menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruh tidak signifikan secara persial terhadap PAD, tetapi secara bersamaan kedua variabel tersebut pengaruhnya adalah signifikan PDRB dan jumlah penduduk sangat kuat dengan PAD.

Santoso dan Rahayu (2008: 18) dengan dukungan bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam maupun luar Negeri. Santoso dan Rahayu (2008:18) mengatakan, penambahan penduduk

tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat di tarik juga meningkat.

2.6 Tinjauan Empiris

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa pedoman atau tinjauan empiris yang akan mendukung karena adanya kesamaan metodologi penelitian dan objek penelitian guna tercapainya hasil yang diharapkan, diantaranya:

Putu Lia Perdana Sari (2010) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat investasi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 2010-2014. Jenis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Peneliti ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat investasi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali periode 1991-2009 dan aspek perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

Harry A.P. Sitianiapessy (2011) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD. Peneliti menggunakan

regresi berganda dan regresi sederhana. Peneliti ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah Periode 2005-2011 dimana peneliti lebih memfokuskan pada tiga sektor yaitu sektor pengeluaran pemerintah yaitu sektor pertanian, perikanan serta perindustrian dan perdagangan karena ketiga sektor tersebut memiliki pengeluaran yang lebih besar dibanding sektor-sektor lain dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdukung.

Erma dan Yuliana Florentina (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor ekonomi yaitu produk domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan variabel PDRB dan investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Kapuas Hulu.

Khilyati Zam Zam (2016) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Solo Raya periode 2000-2014. Penelitian ini

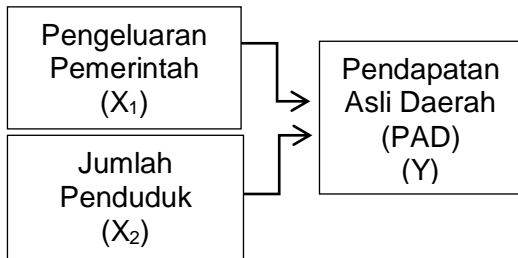
menggunakan regresi data panel. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Solo Raya.

Arman dan Junaidi (2014) meneliti tentang pengaruh pendapatan (PAD), dana alokasi umum, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Peneliti ini menggunakan regresi data panel. Peneliti ini bertujuan bahwa dapat dilihat PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di Jambi dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien.

2.7 Kerangka Konsep

Berdasarkan pada uraian tinjauan pustaka, penelitian ini mengacu antara pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pengembangan menggunakan studi empiris penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk merupakan fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep

3. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk di Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini menggunakan *metode analisis regresi berganda*. Analisis regresi berganda adalah suatu metode hubungan secara linier antara dua variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Dwi Priyatno 2011: 73).

Untuk menguji dua atau lebih variabel independen terdapat satu variabel dependen. Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- X_1 = Pengeluaran Pemerintah

- X_2 = Jumlah Penduduk
- A = Konstan
- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Variabel
- M = Error Term

3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis *regresi linear berganda* yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi *logistik* atau *regresi ordinal*. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cross sectional*.

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut *homoskedastisitas*. Deteksi uji hetero dapat dilakukan dengan metode *Uji Glejser* yaitu dengan melihat nilai signifikansi nilai di atas tingkat $\alpha = 0.05\%$ sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah

sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section* seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serentak pada saat yang bersamaan.

Model regresi yang baik tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengdiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, maka dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson. Menurut Siggih Santoso (2010:215), Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

- 1) Jika nilai DW antara nilai DU dan $(4-DU)$ atau $DU < DW < (4-DU)$ berarti bebas dari autokorelasi.
- 2) Jika nilai DW $> DL$ atau $> (4-DL)$ berarti terdapat autokorelasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar dalam usaha untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya

3.2 Uji Statistik

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Penafsiran ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat di bebaskan oleh variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi (*determination coefficient*) yang disimbolkan dengan R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$).

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikannya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%), 0,05 (5%), 0,10 (10%). Uji F penulisan menggunakan taraf signifikan 0,10 (10%), jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan yang terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terdapat terikat. Namun probabilitas nilai $f < 0,05$, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

c. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil Uji t dapat dilihat dari tabel *coefficients* pada kolom sig (significance), jika probabilitas nilai $t < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan.

tersebut dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berikut ini adalah rincian beberapa sumber penerimaan daerah yang bisa dibilang dominan atau berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar pada tahun 2013-2017.

Tabel 4.3
Rincian Penerimaan Daerah yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Kota Makassar Tahun 2013-2017

Penerimaan	2013	2014	2015	2016	2017
	Satuan Rupiah				
Bagian Pendapatan Asli Daerah	345.350.562.825	556.202.758.215	621.247.679.844	742.448.756.714	828.871.892.852
Pajak Daerah	266.065.576.931	388.445.926.266	518.703.083.895	561.697.247.681	635.674.206.877
Retribusi Daerah	58.015.145.863	69.257.410.559	79.650.936.626	135.776.884.790	115.220.022.385
Penerimaan lain-lain	14.914.639.885	20.820.918.675	22.532.217.115	33.138.980.058	64.615.641.548
Dana Perimbangan	905.316.278.541	1.105.463.603.654	1.161.279.547.759	1.836.090.960.671	1.402.787.592.484
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	470.533.278.541	455.689.010.688	578.831.348.309	62.738.013.240	720.970.425.400

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas terlihat pajak daerah adalah sumber terbesar terhadap penerimaan daerah yang memang sumbernya didapat dari daerah itu sendiri, itu disebabkan secara keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada tidak lepas dari pemungutan pajak. Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa kota Makassar belum bisa menjadi kota yang mandiri dan masih tergantung kepada pemerintah pusat dikarenakan Dana Perimbangan yang meningkat setiap tahunnya.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar, berikut penulis menyajikan data tentang perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2013 sampai tahun 2017. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Perkembangan Jumlah Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Satuan Rupiah)	Perkembangan (%)
2013	621.247.679.844	0,10
2014	742.448.756.714	16,32
2015	828.871.892.852	10,43
2016	971.859.753.606	14,71
2017	1.337.231.047.257	27,32

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)KotaMakassar Tahun 2017

Berdasarkan Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar secara keseluruhan dapat dikatakan terus mengalami peningkatan namun secara persentase fluktuatif. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah sebesar 621.247.679.844 (0,10%), kemudian pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 742.448.756.714 (16,32), selanjutnya di tahun 2015 meningkat Rp.828.871.892.852 (10,43%). Pada tahun 2016 sebesar Rp. 971.859.753.606 (14,71%) dan pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.337.231.047.257 (27,32%).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar setiap tahunnya tidak lepas dari peran pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan. Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya misalnya, melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan sedangkan cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber penerimaan

dengan cara menjangkau wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan.

4.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar

Pengeluaran Pemerintah Daerah merupakan kebijakan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan instruksi Menteri dalam Negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah

dilakukan. Disisi lain anggaran dapat pula menjadi bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Berikut adalah rincian beberapa kegiatan yang bisa dikatakan berpengaruh atau dominan terhadap pengeluaran pemerintah:

Tabel 4.5
Rincian Kegiatan Yang Berpengaruh Terhadap Pengeluaran Pemerintah Tahun 2013-2017

Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
	(Satuan Rupiah)				
B.Pegawai	1.072.077. 237.541	1.076.398. 167.309	1.119.417.5 64.276	1.416.545.8 67.596	1.519.242.6 82.140
B. Barang	403.634.28 0.721	535.515.01 8.617	541.234.56 1.112	559.346.63 1.714	621.313.26 7.412
B.Pemeliharaan	168.460.02 6.058	318.062.31 2.409	341.217.12 7.887	359.318.21 7.817	421.213.31 5.817
Subsidi	27.177.912 .236	8.315.550. 000	9.523.345.6 61	10.612.412. 653	18.318.650. 875

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Tabel 4.5 di atas adalah tabel dari rincian beberapa kegiatan pengeluaran pemerintah Kota Makassar yang bisa dibilang berpengaruh terhadap pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan juga mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara keseluruhan belanja terbesar pemerintah Kota Makassar adalah belanja pegawai, itu dikarenakan oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru.

Pada umumnya di negara yang sedang berkembang, keuangan pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena pemerintah dianggap mampu mengelola sumber daya lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan daerah.

Berikut adalah data jumlah total perkembangan pengeluaran Kota Makassar tahun 2013-2017 :

Tabel 4.6
Perkembangan Jumlah Total Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar
Tahun 2013-2017

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Satuan Ribu)	Perkembangan (%)
2013	2.026.737.762	1,11
2014	2.396.879.800	15,44
2015	3.062.274.394	21,73
2016	3.691.385.484	17,04
2017	3.820.105.599	3,37

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Pada Tabel 4.7 tahun 2013 jumlah pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 2.026.737.762 (1,11%), sedangkan di tahun 2014 jumlah pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.396.879.800(15,44%) dan ditahun 2015 pengeluaran pemerintah sangat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3.062.274.394 (21,73%), sedangkan ditahun selanjutnya yaitu di tahun 2016 perkembangan pengeluaran pemerintah menurun dari jumlah 21,73% menjadi 17,04% yakni sebesar 3,691.385.484 dan pada tahun 2017 jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 3.820.105.599 (3,37%).

Meningkatnya pengeluaran pemerintah Kota Makassar setiap tahunnya disebabkan oleh tingkat belanja pegawai yang terus meningkat dapat dilihat pada tabel 4.5 yang dimana belanja pegawai meningkat disebabkan oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru. pengeluaran pemerintah yang cenderung semakin meningkat ini sering

dengan meningkatnya juga Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar oleh pemerintah daerah. Dari tahun ke tahun pembiayaan pembangunan daerah kota Makassar oleh pemerintah daerah semakin meningkat sehingga memicu meningkatnya pengeluaran Pemerintah di Kota Makassar.

4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan perubahan penduduk merujuk kepada semua spesies, tapi selalu kepada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Di Kota Makassar sendiri laju pertumbuhan penduduknya sangat pesat, itu dikarenakan oleh kencangnya laju urbanisasi ke kota dimana banyak

alasan mereka untuk pindah ke kota metropolitan seperti Makassar. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat dengan menggunakan teori dimana ketika orang mengeluarkan pendapatannya untuk melakukan konsumsi maka akan menaikkan pendapatan orang lain, Maka dari itu berikut akan disajikan perkembangan total jumlah penduduk di Kota Makassar:

Tabel 4.7
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kota Makassar
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
2013	1.408.072	1,49
2014	1.429.422	1,48
2015	1.449.401	1,39
2016	1.469.601	1,37
2017	1.769.920	16,97

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Pada Tabel 4.7 tahun 2013 jumlah penduduk Makassar bertambah 1,49% sebesar 1.408.072 jiwa, kemudian pada tahun 2014 jumlah penduduk bertambah 1,29% sebesar 1.429.422 jiwa, selanjutnya ditahun 2015 meningkat lagi 1,39% sebesar 1.449.401 jiwa, pada tahun 2016 jumlah penduduk bertambah 1,37 % atau sebesar 1.469.601 jiwa, dan di tahun 2017 jumlah penduduk semakin meningkat sebesar 16,97% sebesar 1.769.920 jiwa. Secara Keseluruhan perkembangan jumlah penduduk di Kota Makassar mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Salah satu penyebab kenaikan tersebut dikarenakan oleh kencangnya laju urbanisasi di Kota Makassar.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara Variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial. Serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian disajikan dalam rekapitulasi hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Hasil Regresi
Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T	Sig
Pengeluaran Pemerintah	1,108	9,613	0,011
Jumlah Penduduk	-5,861	-17,404	0,003

Konstanta = 37.537
 R = 0,997
 R square = 0,994
 F hitung = 156,430
 Signifikan F = 0,006

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 37,537 + 1,108 X_1 - 5,861 X_2 + e$$

**Tabel 4.10 Hasil Estimasi Model Pendapatan Asli Daerah
 Model Summary^b**

Mo del	R	R Squar e	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin- Watson
					R Square Change	F Chang e	df1	df2	Sig. F Change	
1	.997 ^a	.994	.987	.02003	.994	156.4 30	2	2	.006	3.243

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: PAD

1. Nilai konstanta sebesar 37,537, maka apabila pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk bernilai konstan, maka nilai dari Pendapatan Asli Daerah 37,537.
2. Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sebesar 1,108, maka apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,108 satuan sedangkan yang lainnya konstan.
3. Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar -5,861, maka apabila jumlah penduduk meningkat 1satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun sebesar 5,861 satuan sedangkan yang lainnya konstan.

4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi uji R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel

terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X.

Hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai R sebesar 0,997. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X_1) dan jumlah penduduk (X_2) mempunyai keeratan hubungan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,997. Pada penelitian ini untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan besaran angka R square. Hasil R square di dapat 0.994. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar sebesar 99,4% sisanya 0,6% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4.6 Analisis Uji Simultan (Uji F)

Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hasil perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Uji F (Secara Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.126	2	.063	156.430	.006 ^b
Residual	.001	2	.000		
Total	.126	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk

Hasil analisis regresi berganda, variabel pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan atau bersama-sama menunjukkan hasil nilai F hitung adalah sebesar 156,430 dengan signifikansi F sebesar 0.006^b atau lebih dari 0,05 (5%) sehingga menolak H₀. Hasil ini menyatakan bahwa secara simultan semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah dan jumlah

penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.6 Analisis Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel independent terhadap variabel dependent, sementara itu secara parsial pengaruh kedua variabel independent tersebut terhadap variabel dependent ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan Uji t (Secara Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.537	1.552		24.179	.002
	Pengeluaran Pemerintah	1.108	.115	.743	9.613	.011
	Jumlah Penduduk	-5.861	.337	-1.346	-17.404	.003

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan uji parsial melalui analisis regresi berganda. Diperoleh hasil variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X₁) dan jumlah penduduk (X₂) terhadap variabel Pendapatan Asli

Daerah (Y) secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis regresi menunjukkan

koefisien regresi (B) sebesar 1,108 terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan signifikan 0.011. Berdasarkan probabilitasnya, jika probabilitasnya lebih kecil 0.05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak atau variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dari hasil perhitungan diketahui signifikansi sebesar 0.011 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (0,011<0,05) dengan demikian pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis regresi menunjukkan koefisien regresi (B) sebesar -5,861 terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan signifikansi 0.003. Berdasarkan probabilitasnya, jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak atau variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dari Hasil perhitungan diketahui signifikansi sebesar 0.003 bila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05, menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (0,003<0,05), dengan demikian jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.7 Pembahasan

a. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar 1,108 dengan tingkat signifikan sebesar

0,011 (0,011<0,05) dengan nilai t hitung > t tabel (156>9,6130). Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan belanja terbesar pemerintah Kota Makassar adalah belanja pegawai, itu dikarenakan oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru.

Pada umumnya di negara yang sedang berkembang, keuangan pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena pemerintah dianggap mampu mengelola sumber daya lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan daerah.

b. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar -5,861 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 (003<0,05). Di Kota Makassar sendiri laju pertumbuhan penduduknya sangat pesat, itu dikarenakan oleh kencangnya laju urbanisasi ke kota dimana banyak alasan mereka untuk pindah ke kota metropolitan seperti Makassar. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat dengan menggunakan teori dimana ketika orang mengeluarkan pendapatannya untuk melakukan konsumsi maka akan menaikkan

pendapatan orang lain. Namun pada tahun 2013-2017 jumlah penduduk Kota Makassar memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan setelah melakukan uji empirik, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar 1,108 dengan tingkat signifikan sebesar 0,011 ($0,011 < 0,05$).
2. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar -5,861 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 ($0,003 < 0,05$).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan biaya pemerintah tidak terlalu besar.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas atau memperbanyak sampel selain di Kota Makassar
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang

diharapkan dapat lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani 2008. "*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*", Raja Grafindo Persada
- Anonim 2010, "*Pendapatan Asli Daerah*" Erlangga, Jakarta
- Anata 2008, "*Analisis Kependudukan*". Erlangga, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kota Makassar
- Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
- Darise, Nuraini. (2009). "*Pengelolaan Keuangan Daerah*". Jakarta : Indeks
- Deliarnov. (2007). "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Edisi Revisi*". Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul dan Mujib Ibnu 2009. "*Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*". Tesis, Yogyakarta: Sekola "prombel Desentralisasi dan Perimbangan Pascasarjana UGM.
- Hasibun, Nurimmansya 1991. "*Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah*". Jakarta : Prisma
- Handayani, Andani. "*Pengaruh Pajak Daerah dan PAD Terhadap Belanja Daerah di Indonesia*" Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hirawan, Susiyati 1997. "*Penengaruh Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*" Skripsi. Yogyakarta : BPFE UGM

- Junaidi dan Arman 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi". *Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.2.No.2.
- Mardiasmo 2009, "Pajak Daerah". Yogyakarta :BPFE
- Prakosa 2010. "Pajak dan Retribusi Daerah". Yogyakarta: UII Press
- Rindu K 2009. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Makassar". Skripsi. Makassar Fakultas Ekonomi Hasanuddin
- Santoso dan Rahayu 2005. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri". *Dinamika Pembangunan* Vol.2.No.1.
- Sugiono 2012. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods". Bandung : Alfabeta
- Safitri 2009. "Otonomi Daerah". Jakarta: Penerbit Kencana.
- Simanjuntak 2011. "Kependudukan". Yogyakarta : BPFE
- Srasati El Rani, F.T, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan" Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sholeh dan Rochmasjah Heru, 2010. "Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Kelolah Pemerintah yang Baik" Bandung: Fokusmedi.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004. "Otonomi daerah". <https://core.ac.uk>
- UU No 33 Tahun 2004. "Perimbangan Keuangan". <https://core.ac.uk>
- Winambo 2013. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Bali". *Analisis Pendapatan* Vol.2.
-

PENGARUH CAR, FDR, NPF, GEARING RATIO DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH

Ghamal Irwana Suteja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
email: ghamalirwanasuteja@student.telkomuniversity.ac.id

Majidah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
email: majidah@telkomuniversity.ac.id

Abstract

Sharia Commercial Bank has quite good growth in Indonesia as the country with the largest Muslim population in the World and it's time to be a pioneer in the development of the sharia industry. Therefore it is necessary to increase bank performance in accordance with sharia principles. Bank performance can be measured using profitability ratios which are proxied using Return on Assets (ROA). The purpose of this study is to determine the profitability of Islamic banks and the factors that influence it. The population in this study is Sharia Commercial Banks in Indonesia. The samples produced were 60 samples using purposive sampling. Data in this study were analyzed with descriptive statistics and panel data regression. The results showed that CAR, FDR, NPF, gearing ratio and corporate governance had a simultaneous effect on profitability. Partially, CAR and NPF affect profitability. Although the results of the study state that gearing ratios and corporate governance do not affect profitability, gearing ratios and corporate governance are the renewal variables in this study.

Keywords : CAR, FDR, NPF, Gearing Ratio, Corporate Governance

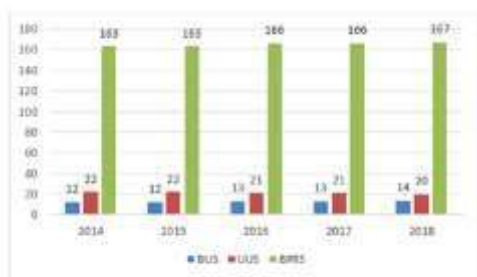
Abstrak

Bank Umum Syariah memiliki pertumbuhan yang cukup baik di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia dan sudah saatnya menjadi pionir dalam pengembangan industri syariah. Oleh karena itu maka perlu adanya peningkatan kinerja bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Kinerja bank dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas yang diproksikan menggunakan Return On Assets (ROA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profitabilitas bank syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel yang dihasilkan sebanyak 60 sampel dengan menggunakan purposive sampling. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, FDR, NPF, gearing ratio dan corporate governance berpengaruh simultan terhadap profitabilitas. Secara parsial, CAR dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas. Meskipun hasil penelitian menyatakan gearing ratio dan corporate governance tidak memengaruhi profitabilitas, gearing ratio dan corporate governance merupakan variabel pembaruan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : CAR, FDR, NPF, Gearing Ratio, Corporate Governance

1. PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia terus meningkat hingga saat ini terdapat 14 BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri yang mempunyai daya tarik tinggi terhadap masyarakat, selain untuk menghindari riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah masyarakat juga ingin memperoleh keuntungan dari tabungan dengan sistem yang digunakan oleh bank syariah yaitu bagi hasil.



Gambar 1. Perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK), Desember 2018

Peningkatan jumlah BUS ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Indonesia agar dapat menikmati layanan syariah pada perbankan. Pencapaian pendapatan BUS yang terus meningkat tidak terlepas dari beberapa ancaman pembiayaan bermasalah serta risiko kecukupan modal dalam menaungi jumlah pembiayaan yang besar, maka BUS harus dapat mempertimbangkan berbagai faktor-faktor tersebut dengan mengukur tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF). CAR adalah aspek kecukupan permodalan yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko pembiayaan dan mengembangkan usaha bank, NPF adalah rasio keuangan yang

dilakukan untuk mengukur dan meninjau risiko pembiayaan bermasalah agar dapat mengantisipasi kerugian yang kemungkinan terjadi (Iskandar & Laila,



Gambar 2. Persentase laba (ROA), CAR, dan NPF (dalam persen)

2016).

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK), Desember 2018

Peningkatan laba di bank syariah Indonesia mampu menunjukkan hasil yang baik, namun beberapa kinerja perbankan syariah masih mengalami perlambatan, perlambatan ini yang membuat kondisi perbankan syariah menjadi bermasalah, terutama masalah penguatan modal, likuiditas dan efisiensi. Salah satu kasus yang masih terjadi adalah permasalahan yang dialami oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang muncul karena kekeliruan dalam mengoperasikan strategi bisnis perusahaan yang dinilai terlalu fokus untuk mendapatkan profitabilitas besar dari pendanaan korporasi dibandingkan ritel. Pada tahun 2017, rasio CAR turun menjadi 11,58%. Pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Muamalat juga terus melonjak naik di atas 5% melebihi ketentuan pemerintah berdasarkan peraturan OJK Nomor 15 /POJK.03/2017. Hal ini berdampak kepada profitabilitas yang hanya mencatatkan Rp 6,57 miliar periode Januari-Agustus 2019. Padahal pada tahun sebelumnya Bank Muamalat mampu meraih laba sebesar Rp 110,9

miliar. Dalam 8 bulan pertama tahun 2019, laba bersih perusahaan anjlok hingga 94,1% (Saragih, 2019). Pada tahun 2017, salah satu Bank Umum Konvensional yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan CAR 22%, NPL sebesar 2,2% dan meraup laba bersih Rp 29,04 triliun. Hal ini sangat berbeda secara signifikan dengan Bank Muamalat (Sugianto, 2018).

Faktor penting untuk membangun pertumbuhan bisnis dan meminimalisasi resiko kerugian adalah modal, dapat dilihat bahwa tingginya nilai CAR bank maka semakin mampu dan kuat bank untuk menyalurkan pembiayaan. Dengan tingkat CAR yang tinggi, Bank Syariah mampu menciptakan profitabilitas dari bagi hasil penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Begitu juga dengan FDR yang memperlihatkan tingkat kinerja bank syariah untuk dapat menjaga dana pihak ketiga agar tetap kokoh melalui keuntungan pembiayaan. Bank harus mampu menyeimbangkan antara pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan dana yang diterima oleh bank guna mempersiapkan dana cadangan apabila deposit mengambil dananya sewaktu-waktu. Faktor-faktor lain seperti NPF, *gearing ratio* dan *corporate governance* juga ikut mempengaruhi profitabilitas. Terdapat inkonsistensi pada beberapa hasil penelitian terkait profitabilitas bank syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara simultan maupun parsial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio untuk menilai tiap rupiah yang akan dijamin menggunakan modal sendiri terhadap aktiva yang berpotensi

memiliki risiko kredit, penyertaan dan tagihan utang lainnya. Rasio ini juga diproyeksikan untuk melihat kecukupan modal bank yang dimiliki guna menjaga risiko pembayaran kembali atas bagi hasil pembiayaan yang akan berdampak kepada profitabilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Irfandi & Mahardika, 2019). Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Parsaoran & Noviarini (2014) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Besarnya tingkat CAR sudah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 yang harus dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah tentang penyediaan modal minimum dengan ketentuan paling rendah sebesar 8%, namun hal ini kembali dijelaskan secara detail tingkat CAR sesuai profil risiko dari Bank Umum Syariah yaitu:

- 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1;
- 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2;
- 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau
- 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.

Dengan adanya regulasi ini diharapkan Bank Umum Syariah mampu untuk menjaga stabilitas permodalan agar dapat meningkatkan penyaluran dana serta menjadi batasan evaluasi kinerja manajemen lebih baik. Menurut Surat Edaran BI No.13/30 DPNP 2011,

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat CAR adalah:

2.2 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR adalah rasio yang membandingkan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan dana yang berhasil dihimpun menjadi dana pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga likuiditas bank syariah terhadap dana penarikan kembali oleh nasabah sewaktu-waktu (Mahmudah & Harjanti, 2016). Rendahnya rasio FDR menggambarkan bahwa bank syariah kurang efektif dalam menyalurkan pembiayaan sehingga keuntungan yang akan dihasilkan dari pembiayaan juga tidak optimal. Rasio FDR Bank Umum Syariah di Indonesia pada umumnya berada dibawah 100% yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia (Irfandi & Mahardika, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Iskandar & Laila (2016) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Menurut Surat Edaran BI No.13/30 DPNP 2011, rumus yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat FDR:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.3 *Non Performing Finance (NPF)*

NPF adalah rasio keuangan yang memperlihatkan seberapa besar pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank syariah, yaitu pembiayaan yang pengembaliannya tertunggak atau melebihi batas waktu yang telah disepakati diawal akad (Notoadmojo & Rahmawaty, 2017). Untuk menjaga dana deposan, bank sentral membuat kebijakan agar bank syariah wajib menyediakan cadangan penghapusan

pembiayaan bermasalah guna mengatasi permasalahan likuiditas bank syariah (Khadija, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (Hakiim & Rafsanjani, 2016). Berdasarkan Surat Edaran BI No.13/30 DPNP 2011, rumus yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat NPF:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.4 *Gearing Ratio*

Gearing Ratio merupakan rasio yang mengukur tingkat modal yang dimiliki bank syariah untuk menjamin utang terhadap risiko ketika bank syariah mengalami perlambatan ekonomi dan masalah likuidasi bank syariah (Putri, 2016). *Gearing ratio* dihitung secara persentase yang memperlihatkan seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan agar tidak melebihi kapasitas modalnya (Akhtar & Ali, 2011).

Regulasi dari pemerintah telah mengatur dan menilai gearing ratio yang baik bagi bank syariah yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, rasio dianggap masih berada di batas aman yaitu dibawah 1000% sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional maupun kesulitan pembayaran bunga pinjaman. Rasio ini menjadi batas bagi perusahaan agar terus memantau peningkatan ataupun pengurangan jumlah utang dari tahun ke tahun karena meningkatnya utang seharusnya cenderung meningkatkan profitabilitas karena adanya penambahan nilai ekonomi dari perusahaan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang

menyatakan bahwa *gearing ratio* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (Putri, 2016)

Rumus yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat

$$GR, DER = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total modal}} \times 100\% \quad \text{gearing ratio}$$

adalah *debt to equity ratio* atau total utang dibandingkan dengan total modal yang dijabarkan sebagai berikut:

2.5 Corporate Governance

Menurut Bank Indonesia, *corporate governance* merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip, mekanisme dan struktur sistem tata kelola perusahaan. *Corporate governance* bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memantau perkembangan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi memberikan informasi yang akuntabilitas kepada para pemegang saham dan yang berkepentingan (Desiana, 2016). Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Desiana (2016) yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

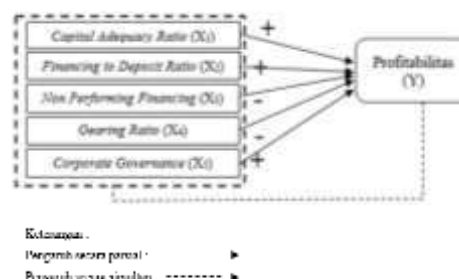
Implementasi prinsip, mekanisme dan struktur *corporate governance* yang baik membuat kinerja perusahaan menjadi efektif, dengan melaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance* bank syariah akan mampu menghasilkan profitabilitas yang bagus melalui kinerja bank syariah yang baik. Maka penting bagi bank syariah mengupayakan agar prinsip-prinsip *corporate governance* dapat diterapkan ke seluruh lapisan organisasi (Utari, 2014). Implementasi *corporate governance* bank syariah diukur berdasarkan *Checklist of corporate governance disclosure* (Darmadi, 2013) sebanyak 72 item

dimana langkah pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengisi item *checklist* dengan melihat data pada *annual report* bank syariah
2. Menghitung skor dibandingkan total skor dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CG = \frac{\text{Skor}}{\text{Total skor}} \times 100\%$$

2.6 Kerangka Pikir



Sumber: Olahan Penulis (2020)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun untuk meneliti pengaruh CAR, FDR, NPF, *Gearing Ratio* dan *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas. *Purposive sampling* merupakan metode sampling yang digunakan dalam penelitian dan diperoleh data sebanyak 60 sampel terdiri dari 12 Bank Umum Syariah.

Sumber data diperoleh dengan data sekunder melalui laporan keuangan dan laporan tahunan yang tercantum pada *website* resmi masing-masing BUS. Data dari hasil laporan keuangan akan diolah menggunakan bantuan *software Eviews* versi 10.

Analisis statistik deskriptif data variabel dan regresi data panel digunakan dalam penelitian ini. Persamaan regresi dapat dibentuk sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \epsilon$$

Keterangan:

β_0 = koefisien intersep

β_X = koefisien *slope*

Y = profitabilitas

i = Jenis perusahaan

t = Waktu

X₁ = *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

X₂ = *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

X₃ = *Non Performing Finance (NPF)*

X₄ = *Gearing Ratio*

X₅ = *Corporate Governance*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif variabel Profitabilitas Bank Syariah (Y) sebesar 0,1%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan bank umum syariah yang ada di Indonesia tahun 2014-2018 dalam menciptakan laba dari total asetnya sebesar 0,01 atau sebesar 1%.

Hasil uji statistik deskriptif variabel CAR sebesar 0,17 atau 17%. Dengan kata lain tingkat kecukupan modal bank umum syariah yang dapat menanggung risiko pembiayaan, surat berharga dan tagihan bank adalah sebesar 0,17 atau sebesar 17%. Nilai ini berada diatas tarif yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 8-11%, maka terdapat cadangan modal yang baik untuk menjaga pengelolaan operasional bank syariah tetap lancar.

Hasil uji statistik deskriptif variabel FDR sebesar 0,88 atau 88%. Nilai tersebut mencerminkan bank syariah mampu mengelola dana pihak ketiga dengan baik dan dapat memberikan tingkat bagi hasil yang relatif stabil dengan tetap memperhatikan likuiditas.

Hasil uji statistik deskriptif variabel NPF sebesar 0,03 atau 3%. Nilai ini berada dibawah tarif yang telah ditetapkan pemerintah yaitu tidak melebihi 5%, sehingga menunjukkan

bahwa bank umum syariah mampu menjaga tingkat pembiayaan bermasalah agar tidak terjadi kesulitan perolehan laba dan pembayaran bagi hasil dengan dana pihak ketiga.

Hasil uji statistik deskriptif variabel *Gearing Ratio* sebesar 4,15 atau 415%. Hasil ini menunjukkan bahwa bank syariah masih berada dibawah maksimal yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 1000%, sehingga bank syariah masih mampu untuk mendorong tingkat pembiayaan sebagai utang dan masih mampu mengendalikan kontrol utang dengan tingkat modal yang dimiliki.

Hasil uji statistik deskriptif variabel *Corporate Governance* sebesar 0,78 atau 78%. Nilai ini mencerminkan bahwa bank umum syariah cukup baik dalam menerapkan tata kelola perusahaan, maka hal ini akan berdampak pada nilai perusahaan karena akan memberikan persepsi yang bagus dari masyarakat maupun investor. Hal tersebut menjadi nilai tarik bagi masyarakat untuk menitipkan dana di bank syariah (sebagai dana pihak ketiga).

4.2 Pengujian Secara Simultan

Pengujian secara simultan untuk mengukur nilai koefisien determinasi (R²) dan uji statistik F sebagai berikut:

Tabel 1.
 Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Simultan

R-squared	0.923228	Mean dependent var	0.013909
Adjusted R-squared	0.870700	S.D. dependent var	0.042566
S.E. of regression	0.015306	Akaike info criterion	-5.224743
Sum squared resid	0.004451	Schwarz criterion	-4.589861
Log likelihood	100.2083	Hannan-Quinn criter.	-5.011125
F-statistic	17.57593	Durbin-Watson stat	2.045210
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-view 10, 2020

Tabel 1 menunjukkan adjusted r-squared sebesar 0.870700 dengan nilai probabilitas (f-statistic) sebesar $0,000000 < \alpha = 0,05$, berarti CAR, FDR, NPF, *gearing ratio* dan *corporate governance* dapat menjelaskan atau mempengaruhi profitabilitas sebesar

87% dan selebihnya sebesar 13% dijelaskan oleh faktor lain di luar yang diteliti. Dengan demikian, CAR, FDR, NPF, *gearing ratio* dan *corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas bank umum syariah tahun 2014-2018.

4.3 Pengujian Secara Parsial

Uji parsial menjelaskan pengaruh parsial masing-masing variabel independen yaitu CAR, FDR, NPF, *gearing ratio* dan *corporate governance* terhadap profitabilitas. Hasil uji parsial dijelaskan pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2.
Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.144116	0.107116	-1.345421	0.1943
CAR	0.236286	0.072388	3.264137	0.0041
FDR	0.140824	0.087318	1.612765	0.1233
NPF	-1.117420	0.406035	-2.752030	0.0127
GR	0.001302	0.000904	1.440904	0.1659
CG	0.022832	0.052753	0.432805	0.6700

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-view 10, 2020

Koefisien regresi pada CAR sebesar 0,236286 menunjukkan hubungan positif dengan profitabilitas. Berdasarkan nilai probabilitas (*t-statistic*) CAR sebesar 0,0041. Kurang dari 0,05 maka CAR secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun hasil ini tidak didukung oleh data yang tercantum pada tabel 3 yang menunjukkan CAR di atas rata-rata maupun dibawah rata-rata, profitabilitas tetap berada di bawah rata-rata, maka tidak menunjukkan pengaruh CAR terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini pun didukung oleh penelitian dari (Parsaoran & Noviarini, 2014).

CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas, karena pada umumnya bank umum syariah mampu untuk memenuhi tingkat minimum CAR yang

telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 yaitu sebesar 8%, bahkan bank umum syariah juga mampu memenuhi kriteria kecukupan modal untuk perusahaan dengan profil risiko peringkat 4 atau 5 yaitu 11%. Secara garis besar dengan tingkat CAR bank umum syariah yang tinggi dapat mengatasi risiko permodalan, sehingga mampu menjaga kelancaran operasional bank umum syariah untuk menciptakan profitabilitas yang optimal.

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa hubungan *capital adequacy ratio* dan profitabilitas tidak memiliki keterkaitan.

Tabel 3.

Keterkaitan CAR dan Profitabilitas

Capital Adequacy Ratio (CAR)	Profitabilitas (ROA)		Jumlah
	Di atas rata-rata (0,01)	Di bawah rata-rata (0,01)	
Di atas rata-rata (0,17)	4	14	18
Di bawah rata-rata (0,17)	1	14	15
Jumlah	5	28	33

(Sumber: Data Diteliti oleh Penulis)

Koefisien regresi sebesar 0.140824 menunjukkan hubungan positif dengan profitabilitas. Nilai probabilitas (*t-statistic*) FDR sebesar 0,1233 lebih dari 0,05, maka FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Jika dikaitkan dengan data pada tabel 4 menunjukkan FDR di atas rata-rata maupun dibawah rata-rata, profitabilitas tetap berada di bawah rata-rata, hal ini tidak menunjukkan pengaruh FDR terhadap profitabilitas.

Semakin besarnya jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki akan semakin besar pula kemampuan bank umum syariah dalam menyalurkan pembiayaan serta membayar dana tabungan dan simpanan nasabah yang telah jatuh tempo. Namun bank umum syariah juga harus menjaga FDR agar tidak terlalu rendah dan terlalu tinggi, sesuai peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 batas bawah sebesar 78% dan batas atas sebesar 92% menjadi patokan bahwa bank umum

syariah tidak melampaui batas. Hal tersebut dikarenakan jika bank umum syariah memberikan seluruh dana yang dimiliki tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian akan mengakibatkan kesulitan likuiditas karena tingginya pembiayaan bermasalah yang timbul. Begitu juga penggunaan dana yang belum optimal akan menurunkan laba. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sehingga penelitian tidak didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Iskandar & Laila, 2016).

Data tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan FDR dan profitabilitas tidak memiliki keterkaitan.

Tabel 4.
Keterkaitan FDR dan Profitabilitas

Financing to Deposit Ratio (FDR)	Profitabilitas (ROA)		Jumlah
	Di atas rata-rata (0,01)	Di bawah rata-rata (0,01)	
Di atas rata-rata (0,88)	3	17	20
Di bawah rata-rata (0,88)	2	11	13
Jumlah	5	28	33

(Sumber: Data Diolah oleh Penulis)

Koefisien regresi sebesar -1.117420 menunjukkan hubungan negatif dengan profitabilitas. Nilai probabilitas (*t-statistic*) NPF sebesar 0.0127 kurang dari 0,05, maka NPF secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun jika dikaitkan dengan data pada tabel 5 menunjukkan NPF di atas rata-rata maupun dibawah rata-rata, maka profitabilitas tetap berada di bawah rata-rata, hal ini tidak menunjukkan pengaruh NPF terhadap profitabilitas.

NPF memiliki pengaruh yang tidak searah dengan profitabilitas. Kecilnya rasio NPF dapat meminimalisasi kerugian dan meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dan dibawah tingkat yang telah ditetapkan

pemerintah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2017 yaitu sebesar 5%. Dengan demikian, pembiayaan yang diterima oleh bank besar dan risiko yang ditanggung sedikit dapat menciptakan profitabilitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Hakiim & Rafsanjani, 2016) yang menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Data tabel 5 menunjukkan bahwa hubungan *non performing finance* dan profitabilitas tidak memiliki keterkaitan.

Tabel 5.
Keterkaitan NPF dan Profitabilitas

Non Performing Finance (NPF)	Profitabilitas (ROA)		Jumlah
	Di atas rata-rata (0,01)	Di bawah rata-rata (0,01)	
Di atas rata-rata (0,03)	1	18	19
Di bawah rata-rata (0,03)	4	10	14
Jumlah	5	28	33

(Sumber: Data Diolah oleh Penulis)

Nilai koefisien regresi sebesar 0.001302 yang memiliki nilai positif, terdapat perbedaan hasil koefisien dengan hipotesis penelitian yang menunjukkan hubungan negatif dengan profitabilitas. Nilai probabilitas (*t-statistic*) *gearing ratio* adalah sebesar 0.1659 lebih dari 0,05, maka *gearing ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.. Data yang tercantum pada tabel 6 menunjukkan *gearing ratio* di atas rata-rata maupun dibawah rata-rata, maka profitabilitas tetap berada di bawah rata-rata, hal ini tidak menunjukkan pengaruh *gearing ratio* terhadap profitabilitas.

Rasio ini mengukur jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Namun pada kasus *gearing ratio* bank, utang akan menjadi sangat besar karena bank sebagai intermediasi keuangan menjadikan tabungan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang berhasil dihimpun

sebagai utang bank yang harus dikembalikan keuntungan atas bagi hasil yang diperoleh kepada nasabah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 ditetapkan batas maksimal *gearing ratio* yaitu sebesar 10 kali dari jumlah modal perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan *gearing ratio* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari (Putri, 2016) yang menyatakan bahwa *gearing ratio* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Data tabel 6 menunjukkan bahwa hubungan *gearing ratio* dan profitabilitas tidak memiliki keterkaitan.

Tabel 6.
Keterkaitan *Gearing Ratio* dan Profitabilitas (ROA)

<i>Gearing Ratio</i>	Profitabilitas (ROA)		Jumlah
	Di atas rata-rata (0,01)	Di bawah rata-rata (0,01)	
Di atas rata-rata (4,14)	3	10	13
Di bawah rata-rata (4,14)	4	18	22
Jumlah	7	28	35

(Sumber: Data Diolah oleh Penulis)

Koefisien regresi sebesar 0.022832 menunjukkan hubungan positif dengan profitabilitas. Nilai probabilitas (*t-statistic*) *Corporate Governance* sebesar 0,6700 lebih dari 0,05, maka *corporate governance* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Keterkaitan data pada tabel 7 menunjukkan *corporate governance* di atas rata-rata maupun dibawah rata-rata, maka profitabilitas tetap berada di bawah rata-rata, hal ini tidak menunjukkan pengaruh *corporate governance* terhadap profitabilitas.

Prinsip tata kelola perusahaan atau *corporate governance* menghadapkan bank agar dapat memperlihatkan pertanggungjawaban atas pencapaian dan kewenangannya kepada yang berkepentingan. Dalam hal ini masih banyak bank umum syariah yang belum mampu mengungkapkan

corporate governance dengan baik karena pembentukan bank umum syariah masih baru di Indonesia dan sulit untuk mencapai kualitas manajemen dengan bank konvensional. Mayoritas pengungkapan tata kelola yang baik dipegang oleh PT Bank Syariah Mandiri hasil leburan PT Bank Mandiri konvensional pada tahun 1999 sehingga unggul dalam pengalaman serta didukung oleh organisasi induk menjadikan PT Bank Syariah Mandiri lebih baik dibandingkan bank syariah lainnya. Sedangkan PT Bank Mega Syariah menjadi paling sedikit dalam mengungkapkan *corporate governance*. Dengan demikian penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, sehingga tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan (Desiana, 2016) yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Tabel 7.
Keterkaitan *Corporate Governance* dan Profitabilitas (ROA)

<i>Corporate Governance</i>	Profitabilitas (ROA)		Jumlah
	Di atas rata-rata (0,01)	Di bawah rata-rata (0,01)	
Di atas rata-rata (0,78)	3	16	19
Di bawah rata-rata (0,78)	4	18	22
Jumlah	7	28	35

(Sumber: Data Diolah oleh Penulis)

Data tabel 7 menunjukkan bahwa hubungan *corporate governance* dan profitabilitas tidak memiliki keterkaitan.

5. PENUTUP

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa CAR, FDR, NPF, *gearing ratio* dan *corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Secara parsial CAR berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menguji kembali variabel independen yang tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, seperti FDR, *gearing ratio* dan *corporate*

governance. Untuk variabel dependen yaitu profitabilitas, peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan indikator yang lain seperti *Return On Equity (ROE)*. Sedangkan, *gearing ratio* sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut pada industri perbankan khususnya perbankan syariah.

Bagi bank umum syariah di Indonesia, sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas, seperti CAR dan NPF. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk bank umum syariah agar membuat target dalam memperoleh profitabilitas.

Bagi regulator, penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan rumusan untuk mencanangkan regulasi baru terkait aturan tentang kualitas aset bank umum syariah serta melakukan pengawasan terhadap bank umum syariah di Indonesia agar industri perbankan syariah tetap berjalan sesuai pedoman-pedoman yang berlandaskan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, M. F., & Ali, K. (2011). *Factors Influencing the Profitability of Islamic Banks of Pakistan*, 66(66), 1-8.
- Darmadi, S. (2013). *Corporate governance disclosure in the annual report An exploratory study on Indonesian Islamic banks*. Emerald Group Publishing Limited 0828-8666, Vol. 29 No. <https://doi.org/10.1108/08288661311299295>
- Desiana, L. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015* Volume, 2(2), 1-20.
- Hakiim, N., & Rafsanjani, H. (2016). *Pengaruh Internal Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional*. MASHARIF AL-SYARIAH Jurnal Perbankan Syariah, 1(1), 60-74.
- Irfandi, F., & Mahardika, D. P. K. (2019). *Pengaruh NPF, CAR, FDR, Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah (Studi Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2013-2017)*. Open Library Universitas Telkom.
- Iskandar, B. A., & Laila, N. (2016). *Pengaruh Komponen Risk-Based Bank Rating Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2014)*, 173-186.
- Mahmudah, N., & Harjanti, R. S. (2016). *Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013*. Seminar Nasional Iptek Terapan, 1(1), 134-143.
- Notoadmojo, I., & Rahmawaty, A. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Financial Sustainability Ratio Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010 - 2014*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 20. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1836>
- Parsaoran, H. O., & Noviarini, D. (2014). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return On Assets (ROA), (Studi Pada Bank Umum Go Public Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008 - 2011)*, 9(1), 56-66.
- Putri, M. (2016). *Pengaruh debt to equity ratio (DER), BOPO, dan corporate social responsibility (CSR) terhadap return on asset (ROA) studi empiris*

*pada bank umum syariah periode
2013-2016, 2016(x), 1-10.*

PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PADA PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK)

Putri Yani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima

Email: Putriyanistiebima@gmail.com

Nurul Huda

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima

Email: Nurulhuda.stiebima@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of dividend policy on stock prices (a case study at PT totalangun persada Tbk). The population of this research is the financial statements of dividend policy and share prices (case study at PT totalangun persada Tbk), for 10 years, namely 2009 - 2018. angun persada Tbk), for 5 years, namely 2014 - 2018. This research is an associative study with a sampling technique, namely purposive sampling. The test results show that there is a significant influence between dividend policy on stock prices (a case study at PT totalangun persada Tbk). With a R2 value of 10.8%.

Keywords: Stock Price, Dividend Policy

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan deviden terhadap harga saham (studi kasus pada PT total bangun persada Tbk). Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan kebijakan deviden dan harga saham pada (studi kasus pada PT total bangun persada Tbk), selama 10 tahun yaitu tahun 2009 - 2018. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan kebijakan deviden dan harga saham pada (studi kasus pada PT total bangun persada Tbk), selama 5 tahun yaitu tahun 2014 - 2018. Peneliiian ini merupakan penelitian asosiatif dengan tehnik sampling yaitu purposive sampling. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan deviden terhadap harga saham (studi kasus pada PT total bangun persada Tbk). Dengan nilai R2 sebesar 10,8%.

Kata Kunci : Harga Saham, Kebijakan Deviden

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif membutuhkan keikutsertaan para pelaku usaha untuk lebih aktif dalam menarik investor domestik dan mancanegara. Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak yang memerlukan modal dengan pemilik modal baik perorangan maupun kelompok. Pasar modal mempunyai peranan penting untuk dapat memenuhi kebutuhan modal bagi dunia usaha agar tetap eksis dalam perekonomian global. Pasar modal menduduki posisi yang sangat strategis, karena dapat menjadi sarana yang handal untuk mobilitas dana dari masyarakat dan dapat berperan sebagai modal penyerta yang besar.

Khusus sebagai dana penyertaan akan dapat memperbaiki struktur modal bagi perusahaan, dan mempunyai kelonggaran dalam menggunakan dana, karena keterikatan dana tidak ada jatuh temponya. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi perusahaan yang penting bagi keberhasilan usaha suatu perusahaan. Dikatakan penting karena fungsi inilah yang melakukan usaha untuk mendapatkan dana. Baik perusahaan besar maupun kecil membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh baik melalui pembiayaan dari dalam perusahaan (Internal financing) maupun pembiayaan dari luar perusahaan (External financing). Sumber pembiayaan external diperoleh perusahaan dengan melakukan pinjaman kepada pihak lain atau menjual sahamnya kepada masyarakat (go public) dipasar modal. Sedangkan sumber pembiayaan modal internal adalah berupa pemanfaatan laba yang ditahan (retained earnings), yaitu laba yang tidak dibagikan secara dividen. Keuntungan yang diperoleh perusahaan

seluruhnya digunakan untuk keperluan pendanaan operasionalnya.

Perusahaan harus memeriksa relevansi antara laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali (retained earnings to be reinvested) dengan laba yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Pertumbuhan perusahaan dan dividen adalah kedua hal yang diinginkan perusahaan tetapi sekaligus merupakan suatu tujuan yang berlawanan. Kebijakan dividen sangat penting karena mempengaruhi kesempatan investasi perusahaan, harga saham, struktur finansial, arus pendanaan dan posisi likuiditas. Dengan perkataan lain, kebijakan dividen menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan menetapkan kebijakan dividen yang berbeda-beda, karena kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan khususnya PT Total Bangun Persabda Tbk dalam membayar dividen kepada para pemegang sahamnya, maka perusahaan mungkin tidak dapat mempertahankan dana yang cukup untuk membiayai pertumbuhannya dimasa mendatang. Sebaliknya, maka saham perusahaan PT Total Bangun Persabda Tbk menjadi tidak menarik lagi.

Kebijakan dividen menyangkut tentang apakah laba yang diperoleh pada saat ini akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen ataukah sebaliknya ditahan untuk membiayai kegiatan yang lebih besar untuk diinvestasikan kembali. Kebijaksanaan dividen mempunyai dua implikasi yang pertama pada sisi pemenuhan kebutuhan dana dan yang kedua pada sisi pendapatan para pemegang saham. Pertumbuhan perusahaan dan keuntungan investor adalah kedua hal yang diinginkan perusahaan tetapi sekaligus merupakan

suatu tujuan yang berlawanan. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut maka perusahaan PT Total Bangun Persabda Tbk harus menetapkan kebijakan deviden, yaitu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk menetapkan proporsi pendapatan yang akan dibagikan sebagai dividen dan pendapatan yang akan ditahan sebagai laba ditahan untuk reinvestasi.

Tabel dividen dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 :

Tahun	Kebijakan Dividen	Laba Perlembar Saham
2014	Rp 119.350.000	Rp 48,00
2015	Rp 102.300.000	Rp 56,13
2016	Rp 136.400.000	Rp 65,40
2017	Rp 153.450.000	Rp 71,71
2018	Rp 170.500.000	Rp 61,19

SUMBER : WWW.IDX.COM

Kebijakan dividen pada PT Total Bangun Persada Tbk 2014 - 2018 mengalami fluktuatif namun pada tahun 2015 mengalami penurunan dividen tetapi terjadi peningkatan pada laba perlembar saham pada tahun 2015 yang tidak disertai pada peningkatan dividen sehingga keadaan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga saham karena nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayarkan dividen, karena semakin besar dividen harga saham semakin tinggi karna harga saham merupakan present value dari dividen yang akan diterima oleh pemilik saham, sehingga kemakmuran pemegang saham akan meningkat dan nilai perusahaan naik begitupun sebaliknya kalau dividen rendah maka harga saham akan menurun.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Dividen

Riyanto (2011), kebijakan dividen (dividend policy) adalah kebijakan yang

bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan (earning). Dalam perhitungan kebijakan deviden menggunakan dividend payout rasio merupakan indikasi atau persentase jumlah pendapatan yang di peroleh yang didistribusikan kepada pemilik atau pemegang saham dalam bentuk kas. DPR dapat dihitung dengan membandingkan dividen kas per lembar saham terdapat laba yang diperoleh perlembar saham (Marlina dan clara, 2009).

2. Harga Saham

Darmadji dan Fakhruddin (2011) menyatakan saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau peseroan terbatas.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif, karena diajukan untuk menggambarkan atau melukiskan secara sistimatis dan akurat mengenai pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan kebijakan dividen dan harga saham pada PT Total Bangun Persada Tbk, selama 10 tahun mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan kebijakan dividen dan harga saham pada PT Total Bangun Persada Tbk, selama 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu tehnik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka.

3.1 Tehnik analisi data

a. Regresi sederhana

Analisis Regresi Sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk

pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya.

1) Analisis koefisien korelasi

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel, (Nugroho, 2005). Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sifat nilai koefisien korelasi adalah plus (+) atau minus (-). Hal ini menunjukkan ini arah korelasi.

2) Analisis koefisien determinasi

Koefisien Determinasi R Kuadrat (R^2) Menurut Imam Ghozali (2009) Koefisien Determinasi pada intinya mengukur

seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel Dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara nol dan satu.

3) Uji t

Uji T (Test T) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. (Sudjiono, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2,136	1,012		2,110	,000
	Kebijakan Deviden	,267	,443	,328	,601	,005

a. Dependent Variable

Persamaan regresi linear sederhana

$$Y = 2,136 + 0,267X$$

Konstanta a = 2.136, Menunjukkan bahwa besarnya harga saham PT Total Bangun Persada Tbk sebelum dipengaruhi oleh Kebijakan Deviden atau sama dengan saat kebijakan deviden bernilai 0, maka harga saham masih tetap ada sebesar 2.136 satuan.

Koefisien Variabel = 267, artinya jika kebijakan deviden naik maka pada PT Total Bangun Persada Tbk akan naik sebesar 267.

Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2,136	1,012		2,110	,000
	Kebijakan Deviden	,267	,443	,328	,601	,005

a. Dependent Variable

Berdasarkan hasil olahan data olahan data maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

Nilai t hitung yaitu sebesar $2,110 > t$ tabel ($dk = n-k$, k adalah jumlah variabel bebas dan variabel terikat) dalam persamaan dengan alpha (α)/2 yaitu sebesar 2,110 dan tingkat signifikan (sig) $< 0,05$ yaitu $0,00 < 0,05$, artinya t terdapat pengaruh secara signifikan antara Kebijakan Deviden terhadap Harga Saham pada PT Total Bangun Persada Tbk. Yang berarti H_0 diterima. Kebijakan Deviden berpengaruh

terhadap Harga Saham. Nilai korelasi bertanda positif, ini berarti terdapat hubungan antara Kebijakan Deviden dengan

Harga Saham. Sehingga pada penelitian ini Kebijakan Deviden tidak akan terlalu berdampak besar terhadap Harga Saham pada PT Total Bangun Persada Tbk, hal ini berarti bahwa setiap perubahan pada Kebijakan Deviden dapat mempengaruhi prolehan Harga Saham perusahaan.

4.2 Analisi koefisien korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,328 ^a	,108	-,109	,33233

a. Predictors: (Constant), kebijakan deviden

Koefisien korelasi linear sederhana yaitu sebesar 0,328 artinya bahwa tingkat keeratan hubungan antara kebijakan deviden terhadap harga saham PT Total Bangun Persada Tbk rendah sebesar 0,328. menurut sugiyono (2017) berada pada interval 0,20 - 0,399 termaksud kategori

“rendah” dengan nilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara Kebijakan Deviden terhadap Harga Saham artinya kenaikan Kebijakan Deviden akan diikuti pula oleh kenaikan Harga Saham.

4.3 Analisis koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,328 ^a	,108	-,109	,33233

a. Predictors: (Constant), kebijakan deviden

Nilai koefisien Determinasi linear sederhana yaitu 0,108 atau 10,8% artinya kontribusi pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Harga Saham pada PT Total Bangun Persada Tbk yaitu sebesar 10,8% sedangkan sisanya 80,2% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

5. PENUTUP

Kebijakan Deviden berpengaruh terhadap Harga Saham. Nilai korelasi

bertanda positif, ini berarti terdapat hubungan antara Kebijakan Deviden dengan Harga Saham. Sehingga pada penelitian ini Kebijakan Deviden tidak akan terlalu berdampak besar terhadap Harga Saham pada PT Total Bangun Persada Tbk, hal ini berarti bahwa setiap perubahan pada Kebijakan Deviden dapat mempengaruhi prolehan Harga Saham perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrayani, 2013 *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Alih Bahasa: Ali Akbar Yulianto. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus Sartono (2010) *Kebijakan Pendanaan dan Restruksi Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Agus Sartono, (2013) *How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An International Comparison. The Journal of Financial Research*. Vol. XXII, NO.2 Pages 161-18.
- Elfianto Nugroho (2012) *Analisis Pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Perputaran Modal Kerja, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada BEI pada Tahun 2007 - 2011)*.
- Fabozzi (2011) *Understanding Profitability*. IOWA State University.
- Harahap (2008) *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, 2011 *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, 2013 *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. Basic Econometrics. 5th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Inta Budi Setyanusa (2013) *Pengaruh Likuiditas dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2012)*.
- Irham Fahmi (2012) *Manajemen Investasi*. Alih Bahasa: Tim Alih Bahasa Salemba Empat. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- kasmir, (2014) *Manajemen Keuangan. Jilid 2. Edisi 9. Binarupa Aksara*
- Keown.A . J., petty, J. W., martin, J. D., dan scott Jr., D. F. 2016. Basic financial management; seventh edition, prentice-hall. Inc. USA. Diterjemahkan oleh Chaerul D.
- Djakman dan Dwi sulisyorini . 2012. penerbit salemba empat. Jakarta. Martin,J,D., Keown. A.J., Petty, J.W., Dan scott Jr., D. F. 1996. basic financial Management; fifth edition.
- Rahma Rizal (2014). Pengaruh arus kas dan kebijakan deviden terhadap harga saham : studi kasus di bursa efek indonesia . Jurnal manajemen dan akuntansi vol. 3 no.3.
- Wijaya puspo,R.L., Wibawa, Anas, bandi, 2010. Pengaruh keputusan investasi,keputusan pendanaan , dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Simposium nasional akuntansi XIII purwokerto.
- Wilianto, Arief. 2012. pengaruh kebijakan dividen, leverage keuangan dan profitabilitas terhadap harga saham perusahaan manufaktual di BEI. Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi vol. 1 No. 2, maret.
- Kennedy dkk., (2013) *Dasar dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi 4. Yogyakarta : Bagian Penerbitan FE.
- Myers dan Majluf (2017) *Pengaruh Tangibility, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Keuangan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi . Vol 10 No. 1.
- Pagano dan Schivardi, 2013 *Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aset dan Tingkat Pertumbuhan Terhadap Struktur Modal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 3 No 7.

Rudianto (2014) Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Pertumbuhan Perusahaan, Likuiditas, Dan Pajak Terhadap Struktur Modal Pada Sektor Pariwisata. E Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5 No 6

Sudjiono, (2010) Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi 11 Buku 2. Jakarta : Salemba Empa

IMPLEMENTASI K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT.LEIGHTON CONTRUCTION INDONESIA SITE SOROAKO

Suriyanti¹

Universitas Muslim Indonesia

Email: suriyanti.mangkona@umi.ac.id

Wahyudi²

Universitas Islam Negeri Alauddin

Email: wahyudi.wahyudi@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This research aims to determine whether there is influence in the application of occupational safety and health on the productivity of employees at PT. Leighton construction Indonesia site soroako. occupational health and safety is one maintenance form of human resources, in this case maintenance employees means retain employees to remain loyal to the company, improve employee motivation and discipline, improve safety and peace of mind of employees in perform the work, and improve employee performance. The data used in this experience were obtained from questionnaires (primary) and some observations and interviews with employees of PT. Leighon construction Indonesia site soroako. The analysis method used is linear regression analysis using hypothesis test, the F test and t test. The results of this study are the results of the regression equation and test data on occupational health and safety on the productivity of the work of the PT.Leighon construction, the regression coefficient results and date tests for occupation health and safety variable on the productivity performance of PT. Leighon this can be proven by the regression coefficient and data test

Keywords: Occupational Safety, Occupational Health, Employee Productivity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas karyawan pada Pt.Leighton construction Indonesia site soroako. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk pemeliharaan sumber daya manusia, dalam hal ini pemeliharaan karyawan yang berarti mempertahankan karyawan agar tetap loyal terhadap perusahaan, meningkatkan motivasi dan disiplin kerja karyawan, meningkatkan rasa aman dan ketenangan jiwa karyawan dalam melakukan pekerjaannya, serta meningkatkan kinerja karyawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan karyawan PT.Leighton construction Indonesia site soroako. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan uji hipotesis yaitu uji F dan uji T. Hasil penelitian ini adalah hasil persamaan regresi dan uji data mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap produktifitas kerja karyawan PT leighton, maka diperoleh hasil koefisien regresi dan uji data untuk variabel Kesehatan dan Keselamatan kerja terhadap produktivitas kinerja karyawan PT.leighton. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi dan uji data

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Produktivitas Karyawan.

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini persaingan industri energi yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan kinerja yang berkualitas tinggi agar dapat bertahan dalam persaingan. Salah satu cara mempertahankan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan yaitu dengan memberi perlindungan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan karyawan.

Perusahaan perlu memelihara kesehatan para karyawan, kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik maupun mental. Program kesehatan kerja dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga secara tidak langsung akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas karyawan. Program keselamatan kerja yaitu sarana untuk mencegah kecelakaan, cacat bahkan kematian sebagai akibat kelalaian kerja. Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, meskipun dalam penerapan memiliki perbedaan namun dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap karyawan.

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan kewajiban pengusaha melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapi karyawan. Perusahaan wajib menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja ataupun adanya karyawan yang mengalami sakit akibat kerja sehingga produktivitas kerja cenderung menurun bahkan perusahaan akan mengeluarkan dana lebih untuk mengulangi hal tersebut.

Rusli, dan Achmad.(2017) mengatakan bahwa riset yang dilakukan badan dunia *Internasional Labour Organization (ILO)* setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 12 detik atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jumlah pria yang meninggal dua kali lebih banyak dibandingkan wanita, karena mereka lebih mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan berbahaya. Secara keseluruhan kecelakaan di tempat kerja telah menewaskan 350.000 orang. Sisanya meninggal karena sakit yang diderita dalam pekerjaan seperti membongkar zat kimia beracun.

Saputra, dan Adam. (2017) keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas sangat erat hubungannya bagi tenaga kerja, penyakit yang diakibatkan pekerja dapat menurunkan produktivitas kerja yang berakibat menurunkan pendapatan organisasi atau perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan berakibat menurunnya jumlah produksi serta memberikan citra yang kurang baik terhadap kualitas dan kapasitas perusahaan. Pekerja yang kesejahterannya buruk tidak hanya menyebabkan kekecewaan terhadap perusahaan tetapi produktivitas mereka akan turun, kurangnya motivasi dalam bekerja, apatis dan loyalitas mereka terhadap perusahaan akan berkurang pula.

Tujuan dan sasaran penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada setiap perusahaan adalah menciptakan sesuatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam ruang lingkup perusahaan dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan

kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat bekerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

Artikel ini menguraikan, beberapa risiko yang akan ditanggung PT. Leighton construction jika tidak melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sebagai komitmen menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja, dan sebagai suatu bentuk tindakan dalam manajemen risiko, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas baik secara mikro dan makro PT. Leighton. Lebih lanjut, PT. Leighton construction Indonesia site soroako, adalah salah satu kantor Leighton yang hadir di Soroako Luwu-Timur untuk memenuhi kebutuhan supply jasa dibidang konstruksi yang terikat client dengan PT.Vale, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Penelitian ini memfokuskan pada keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT Leighton construction site Soroako karena PT.Leighton salah satu perusahaan penyuplai jasa dibidang construction yang berada di Soroako Luwu-timur Sulawesi-selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program Keselamatan Kerja

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan kerjanya sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pekasanaan. Pengertian

program keselamatan kerja: "Keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Rusli, Achmad (2017). keselamatan kerja merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan yang mengacu pada dukungan manajemen puncak dalam pelaksanaan kebijakan perusahaan, dan menciptakan suasana kerja yang aman dan damai bagi karyawan yang bekerja di perusahaan.

2.2 Program Kesehatan Kerja

Program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama. Pengertian program kesehatan kerja:

Rusli, Achmad (2017) program kesehatan kerja dapat dilakukan dengan penciptaan lingkungan kerja yang sehat Hal ini menjaga kesehatan dari gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan dan sebagainya. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat secara tidak langsung akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas.

Iqbal, Muhammad, and Iqlima Rachmah.(2018) Upaya kesehatan kerja

adalah upaya penyesuaian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerjanya yang optimal

2.3 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Manfaat penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

a. Perlindungan Karyawan

Menurut HPS (*Health dan Safety Protection*) Academy Training Center tujuan inti sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah memberikan perlindungan kepada karyawan. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Dengan adanya jaminan keselamatan, keamanan, dan kesehatan selama bekerja, mereka tentu akan memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

Organisasi atau perusahaan yang telah mematuhi peraturan dan menerapkan sistem manajemen K3, merupakan perusahaan yang menunjukkan etika baiknya dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan sehingga mereka dapat

berorientasi normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenagakerjaan.

Sistem manajemen juga melakukan pencegahan terhadap ketidaksesuaian. Dengan menerapkan sistem ini, dapat dicegah terjadinya kecelakaan, kerusakan atau sakit akibat tersebut. Dengan demikian dalam jangka pendek organisasi atau perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya yang timbul akibat kejadian tersebut. Memang dalam jangka pendek perusahaan atau organisasi akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menerapkan sebuah sistem manajemen K3. Penerapan sistem manajemen K3 yang efektif akan mengurangi rapat yang membahas Ketidaksesuaian.

Dengan adanya sistem maka hal ini dapat dicegah sebelumnya di samping kompetensi personel yang semakin meningkat dalam mengetahui potensi ketidaksesuaian. Dengan demikian organisasi dapat berkonsentrasi melakukan peningkatan terhadap sistem manajemennya dibandingkan melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi.

Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi seseorang baik jasmani maupun rohani sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan dimana para pekerja terjamin keselamatannya pada saat bekerja baik itu dalam menggunakan mesin atau alat kerja di lokasi pekerjaan. Apabila pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan didukung oleh sarana dan prasarana yang terjamin keselamatannya maka produktivitasnya kerja dapat ditingkatkan.

b. Manfaat Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan-kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan para pekerjanya, perusahaan akan semakin efektif.

Rusli, Achmad. (2017) peningkatan – peningkatan terhadap hal ini akan menghasilkan beberapa keuntungan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang.
- b. Meningkatnya efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen.
- c. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.
- d. Tingkat kompetensi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
- e. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan.

2.4 Produktivitas

Kasmiruddin & Siburian (2014) Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Produktivitas berkaitan erat dengan sistem produksi yaitu sistem di mana faktor-faktor semacam tenaga kerja, modal berupa mesin, peralatan kerja, bahan baku, bangunan pabrik, dikelola dalam cara yang terorganisasi untuk mewujudkan produksi yang efektif dan efisien.

a. Faktor-faktor Produktivitas

Yakin, Ainul. (2017) Faktor kendala yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sangat

mungkin mengakibatkan karyawan baru setelah beberapa bulan pertama. Perputaran karyawan awal ini adalah sesuatu yang lumrah. Hal ini malah akan bermanfaat jika itu terjadi diantara karyawan baru yang merasakan bahwa perusahaan atau pekerjaan tidak tepat untuk mereka. Dengan demikian perusahaan akan segera mencari jalan keluar yang terbaik, mulai dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan baru.

b. Konsep Produktivitas

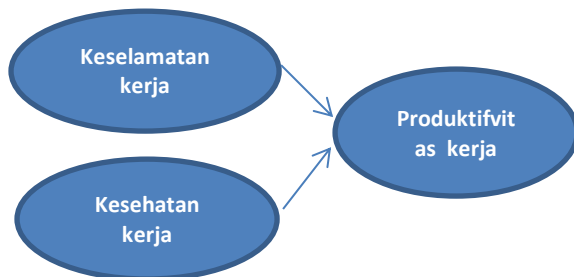
Herwanto, (2017). konsep produktivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input) persatuan waktu. Produktivitas dapat dikatakan meningkat apabila:

1. Produktivitas (P) naik apabila input (I) turun, output (O) tetap.
2. Produktivitas (P) naik apabila input (I) turun, output (O) naik.
3. Produktivitas(P) naik apabila input (I) tetap, output (O), naik.
4. Produktivitas(P) naik apabila input (I) naik, output (O) naik tetapi jumlah kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input.
5. Produktivitas (P) naik apabila input (I) turun, output (O) turun tetapi jumlah penurunan input lebih kecil dari pada turunnya output.

Konsep tersebut tentunya dapat dipakai didalam menghitung produktivitas disemua sektor kegiatan. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya. Dengan kata lain bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektifitas kerja secara total. Prinsip dalam manajemen

produktivitas adalah efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam menggunakan sumber daya.

2.5 Kerangka Pemikiran



Kerangka berpikir ini menjelaskan pertautan antara variabel independen dalam penelitian ini yaitu keselamatan kerja sebagai X1 dan kesehatan kerja sebagai X2 terhadap variabel dependen dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja sebagai (Y).

2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keselamatan kerja diduga berpengaruh terhadap produktivitas kerja
2. kesehatan kerja diduga berpengaruh terhadap produktivitas kerja

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:11) Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan,

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini mendekati pada penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel Keselamatan kerja (X1) dan variabel X2 (kesehatan Kerja) dengan Variabel Y (produktivitas kinerja).

Populasi adalah semua subyek atau obyek sasaran penelitian (Mustami, 2015: 61). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2010: 122). Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT Leighton sebanyak 62 orang. Jumlah responden ini didapatkan dari rumus slovin yang digunakan penulis sebagai dasar dari pengambilan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas

Table 1. Uji Validitas

	R table	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
x1.1	0,250	0,766	Valid
x1.2	0,250	0,854	Valid
x1.3	0,250	0,833	Valid
x1.4	0,250	0,508	Valid
x1.5	0,250	0,417	Valid
x2.1	0,250	0,866	Valid
x2.2	0,250	0,831	Valid
x2.3	0,250	0,899	Valid
x2.4	0,250	0,925	Valid
x2.5	0,250	0,429	Valid
y1	0,250	0,871	Valid
y2	0,250	0,693	Valid
y3	0,250	0,871	Valid
y4	0,250	0,669	Valid
y5	0,250	0,720	Valid

Sumber : Data diolah, SPSS 2020

Sesuai dengan bahwa r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan bahwa item variabel dapat dikatakan valid. Pada pengujian dari olah data dengan menggunakan program komputer SPSS (*Statistical Package For The Social*

Sciences) 20 for windows, maka diperoleh r hitung $>$ dari r tabel=0.25 (nilai r standar untuk $n= 62$). Sehingga semua indikator dari variabel penelitian ini adalah valid.

4.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Pengujian Realibitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Koefisien Alpha	keterangan
Keselamatan Kerja	0,776	0,60	Reliabilitas
Kesehatan Kerja	0,807	0,60	Realibilitas
Produktivitas Karyawan	0,796	0,60	Realibilitas

Sumber : Data diolah, SPSS 2020

Hasil uji realibitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memiliki koefisien *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan dari koesioner adalah *reliable* yang berarti bahwa koesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan koesioner yang handal dan benar.

Uji regresi linear berganda ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Keselamatan Kerja (X1), dan Kesehatan Kerja (X2) terhadap variabel dependen Produktivitas Karyawan (Y). Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi linear berganda.

4.3 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,012	1,967		1,531	,131
KESELAMATAN	,526	,082	,520	6,378	,000
KESEHATAN	,359	,063	,468	5,742	,000

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : Data diolah, SPSS 2020

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut yaitu *Unstandardized coefficients* adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,012 + 0.52 X_1 + 0.359 X_2$$

Model *Unstandardized coefficients* diatas menunjukkan koefisien b yaitu nilai yang menjelaskan bahwa Y (variabel terikat) akan berubah jika X (variabel terikat) diubah 1 unit, sedang untuk model persamaan regresi *Standardized Coefficients* dimana nilai koefisiennya tidak akan mengalami perubahan lagi adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,520 + 0,468$$

1. Koefisien regresi (X1) sebesar 0,520 memberikan arti bahwa Keselamatan Kerja (X1) berpengaruh positif terhadap Produktivitas Karyawan (Y).
2. Koefisien regresi (X2) sebesar 0,468 memberikan arti bahwa Kesehatan Kerja (X2) berpengaruh positif terhadap Produktivitas Karyawan (Y)

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa variabel

independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) adalah variabel keselamatan kerja (X1) dengan koefisien 0,520.

4.4 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh sebesar 0,651. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh cukup besar terhadap terhadap produktivitas karyawan sebesar 65,1%, melihat variabel produktivitas karyawan dapat dipengaruhi oleh banyak variabel lain, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berikut hasil perhitungan Koefisien Determinasi dengan menggunakan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4
Koefisien Determinasi ((R²))

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,807 ^a	,651	,639	,294
a. Predictors: (Constant), rata_x2, rata_x1				

Sumber : Data diolah, SPSS 2020

4.5 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini,

mempunyai pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependennya. Berikut hasil uji F dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,500	2	4,750	55,052	,000 ^b
	Residual	5,091	59	,086		
	Total	14,591	61			
a. Dependent Variable: rata_y						
b. Predictors: (Constant), rata_x2, rata_x1						

Sumber : Data diolah, SPSS 2020

Dari hasil analisis regresi di atas dapat diketahui variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 55,052 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi (sig) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan.

4.6 Uji T (Parsial)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel independen (Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja) terhadap variabel dependen (Produktivitas Karyawan). Sementara itu secara parsial pengaruh dari kedua variabel independen tersebut terhadap variabel dependen ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,602	,393		1,531	,131
	rata_x1	,526	,082	,520	6,378	,000
	rata_x2	,359	,063	,468	5,742	,000
a. Dependent Variable: rata_y						

Sumber: *output* SPSS 2020

Pengaruh dari masing-masing variabel Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan dapat dilihat dari tingkatan signifikansi (probabilitas). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien parsial dari masing-masing variabel independen terhadap

dependennya. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas keselamatan karyawan (X1) yaitu $0,000 > 0,05$ dan nilai probabilitas kesehatan kerja (X2) $0,001 < 0,05$. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel keselamatan kerja (X1) dan kesehatan kerja (X2), memiliki pengaruh yang positif dengan tingkat signifikan masing-masing terhadap

variabel independen, maka nilai variabel keselamatan kerja (0,000) lebih besar jika dibandingkan dengan nilai variabel kesehatan kerja (0,000)

4.7 Pembahasan

a. Pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja

Keselamatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, hal yang mendukung hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat dari tinjauan empirik penelitian sebelumnya yang juga menyatakan bahwa program keselamatan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Hal ini juga didukung oleh beberapa ahli yang menyatakan keselamatan kerja dengan produktivitas sangat erat hubungannya bagi tenaga kerja, kesehatan kerja yang baik bagi pekerja otomatis dapat meningkatkan produktivitas kerja sekaligus pendapatan yang diterimanya.

Keselamatan kerja pada PT.Leighton adalah prioritas utama yang tidak dapat diabaikan,walaupun pencapaian-pencapaian lain dalam hal ini produksi dan pemasaran adalah tujuan perusahaan. Pencapaian target produksi dan keberhasilan pemasaran akan menjadi percuma jika aspek keselamatan tidak diperhatikan, untuk itulah semua pekerja berberkomitmen dalam hal mendukung dan memperhatikan aspek keselamatan dalam bekerja. Keselamatan kerja pada PT Leighton yaitu menjamin semua pekerja dapat bekerja secara sehat dan dengan gaya hidup yang sehat juga.

Sedangkan lindung lingkungan yang dimaksud PT Leighton yaitu Leighton menjamin lingkungan kerja yang ramah lingkungan, operasi tanpa limbah berbahaya dan ramah lingkungan

serta berusaha menekan emisi terhadap lingkungan serta meningkatkan efisiensi energi. Aspek lingkungan sudah menjadi prioritas utama dalam operasi perusahaan, baik dikantor pusat maupun unit-unit operasi, dimana proses eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi maupun penyimpanan (*Storage*) harus mengedepankan aspek lingkungan yang ramah lingkungan, tanpa pencemaran dan emisi/radiasi maupun limbah beracun serta meningkatkan pemakaian energi secara efisien.

b. Pengaruh kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja

Kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Upaya Kesehatan kerja adalah upaya penyesuaian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara baik tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Hal ini diperkuat berdasarkan dari beberapa hasil wawancara terhadap karyawan yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa kebanyakan karyawan lebih mengutamakan Kesehatan kerja karena melihat kondisi medan pekerjaan yang sedikit lebih berbahaya. Sehingga Kesehatan kerja merupakan prioritas mereka, dengan berhati-hati para karyawan akan tetap bekerja dan menghasilkan output yang maksimal dan mendapatkan gaji/upah yang telah ditentukan oleh perusahaan.

5. PENUTUP

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, telah terbukti bahwa keselamatan kerja mempunyai

pengaruh yang positif terhadap variabel produktivitas karyawan, kesehatan kerja dengan produktivitas sangat erat hubungannya bagi tenaga kerja.

2. Hasil kedua dari penelitian ini, membuktikan bahwa program kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan, yang telah dibuktikan peneliti di uji regresi linear berganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, yuli.(2016). *Analisa tingkat produktivitas tiang pancang dengan metode marvin emundel pada pt. Multiguna precast mandiri*. Diss. Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2016.
- Demo, gisela, (2011). et al. "políticas de gestão de pessoas no novo milênio: cenário dos estudos publicados nos periódicos da área de administração entre 2000 e 2010." *revista de administração mackenzie (mackenzie management areview)* 12.5 (2011).
- DepKes, R. I. "Sistem Kesehatan Nasional 2004." (2004).
- Dwitama, frisca sasri,Yuliana yuliana, and hijriyantomi suyuthie. ,(2016).(ed.). "komunikasi interpersonal karyawan purchasing denganfood and beverage division hotel basko padang." *e-journal home economic and tourism* 11.1 (2016).
- Feriani, merina.(2017). *Pengaruh budaya organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai pada badan penanaman modal dan perizinan terpadu (bpmp) provinsi jawa barat*. Diss. Unpas, 2017.
- Gallo, michele, (2017).et al. "the vietnamese pig as a translational animal model to evaluate tissue engineered heart valves: promising early experience." *the international journal of artificial organs* 40.4 (2017): 142-149.
- Handoko, dwi, and sony sunaryo.(2014). "analisa pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (k3) pada pekerja bangunagedung penataan ruang kementerian pekerjaan umum." *konstruksia* 5.2 (2014).
- Herwanto, d. (2017). Pengukuran produktivitas mesin gts (speed count) dengan pendekatan ratio untuk proses pita cukai di perum peruri. *Barometer*, 2(1), 29-33.
- Indonesia. *Undang-undang ri no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*. Cipta jaya, 2003.
- Ibrahimjati Kusuma (2010)" Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Bitratex Industries Semarang."
- Iqbal, muhammad, and iqlima rachmah.(2018). "konsep perlindungan tenaga kerja kontrak dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003." *jurnal justisia: jurnal ilmu hukum, perundang-undangan dan pranata sosial* 2.2 (2018): 154-171.
- Jati kusuma, ibrahim, and ismi darmastuti.(2011).*Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pt. Bitratex industries semarang*. Diss. Universitas diponegoro, 2011.
- Kasmiruddin, k., & siburian, d. R. (2014).Analisis proses seleksi dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan bagian redaksi pt. Riau pos pekanbaru. *Jurnal online mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau*, 1(2).
- Kusdiana, y. (2018). pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada pt. Kebun pantai raja. *Jurnal daya saing*, 4(2), 202-210.(2018)

- Lala, andi.(2018)."urgensi penerapan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang k3 bagi tenaga kerja di indonesia." *syntax literate; jurnal ilmiah indonesia* 3.11 (2018): 1-14.
- Nomor, undang-undang. "tahun 1992 tentang kesehatan." *depkes ri, jakarta* (23).
- Ri, departemen tenaga kerja. "permenaker no per 05/men/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja." *jakarta: depnaker* (1999).
- Prawitasari, A. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Turnover Intention Karyawan Pada PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu. *Ekombis Review*, 4(2).
- Rusli, achmad. (2017).*pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada pt. Pertamina (persero) tbbm pare- pare*. Diss. 2017.
- Saputra, A. A. (2017). *Pengaruh Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) Cabang Pinrang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Saputra, andi adam.(2017). *Pengaruh program kesehatan dan keselamatan kerja k3 terhadap produktivitas kerja karyawan pada pt. Pln (persero) cabang pinrang*. Diss. Universitas islam negeri alauddin makassar, 2017.
- Stefi Margareth Pabara (2011) " Pengaruh Program Kesehatan dan keselamatan kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Pada PT. PLN Makasaar"
- Siswanto, bayu indra.(2015). "pengaruh pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada pt. Pembangunan perumahan tbk cabang kalimantan di balikpapan."
- universitas mulawarman. Samarinda* (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP BESARNYA TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT DI KABUPATEN SOPPENG (STUDI KASUS DI DESA CONGKO KECAMATAN MARIORIWAWO)

A. Nur Achsanuddin UA

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: nur.achsanuddin@unismuh.ac.id

Muhammad Adil

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: muh.adil@unismuh.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to meet the unlimited needs of life but the level of ability to meet their needs is limited to a problem that often occurs. This is influenced by the level. The purpose of this study was to determine the effect of income levels on the level of community consumption in Soppeng district (a case study in Congko village, Marioriwawo district). This researcher uses a quantitative analysis method which is an overview of the effect of income levels on the level of community consumption in Marioriwawo District, Soppeng Regency. The level of population consumption that is measured or generated through the results of partial test calculations with a value of tcount 10.808, this is very influential significantly and has a positive impact on the level of public consumption where t table is 1.988 where the significant value is 0.000 < 0.05.

Keywords: *Income Level, Consumption Level, and Society*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas tetapi tingkat kemampuan untuk memenuhinya terbatas menjadi masalah yang sering terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Besarnya Tingkat Konsumsi Masyarakat di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo). Peneliti ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang merupakan gambaran umum mengenai pengaruh tingkat pendapatan terhadap besarnya tingkat konsumsi masyarakat di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Tingkat konsumsi penduduk yang diukur atau dihasilkan melalui hasil perhitungan uji parsial dengan nilai t_{hitung} 10,808, hal ini sangat berpengaruh secara signifikan dan berdampak positif pada tingkat konsumsi masyarakat dimana t_{tabel} 1,988 dimana nilai signifikan 0,000 < 0.05.

Kata kunci : *Tingkat Pendapatan, Tingkat Konsumsi, dan Masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Sandang yaitu kebutuhan manusia akan pakaian, pangan kebutuhan yang paling utama bagi manusia yang berupa makanan, sedangkan papan adalah kebutuhan yang berupa tempat tinggal.

Desa Congko salah satu daerah di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng jumlah Kepala Keluarga yaitu 641 dan jumlah penduduk sebesar 2.677 orang (Instansi Desa Congko, 2019). Masyarakat Desa Congko bekerja sebagai petani dan sebagiannya lagi bekerja sebagai pegawai negeri sipil, wiraswasta, pedagang sayur dan lain sebagainya. Tingkat pendapatan masyarakat di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng bervariasi sesuai dengan pekerjaan dan statusnya. Pendapatan yang diperoleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Besarnya Tingkat Konsumsi Masyarakat di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan

Pendapatan penduduk merupakan penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam kurun waktu tertentu dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan penduduk tidak selalu merata, sebagian ada yang berpenghasilan kecil bahkan hanya cukup untuk membeli kebutuhan makanan saja, sebaliknya ada penduduk yang berpenghasilan sangat besar

sehingga selain kebutuhan makanan terpenuhi, kebutuhan non makanan juga dapat terpenuhi. Perbedaan pendapatan tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan, lapangan usaha, kesempatan kerja, kewiraswastaan, modal dan lain sebagainya.

2.2 Penghasilan Masyarakat

Penghasilan penduduk tidak selalu merata, sebagian pendapatannya rendah, bahkan hanya mampu untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, sedangkan adapula masyarakat yang berpenghasilan besar mampu memenuhi kebutuhannya baik berupa makanan maupun non makanan dapat terpenuhi.

Pendapatan masyarakat tidak hanya dilihat dari besarnya penghasilan, tetapi bagaimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi jika dibiarkan semakin parah pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap bidang politik maupun sosial.

2.3 Konsumsi

Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain memenuhi kebutuhan hidup.

2.4 Konsumsi Masyarakat

Faktor yang menentukan tingkat pengeluaran konsumsi yaitu tingginya tingkat konsumsi sebenarnya tidak

sebanding dengan tingkat pendapatan. Dimana masyarakat yang berpenghasilan tinggi cenderung untuk menabung dibanding masyarakat dengan pendapatan rendah, lebih sedikit menabung, masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung mempunyai tabungan minim karena pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan konsumsinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian adalah 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan Agustus - Oktober 2019. Data primer, yang diperoleh melalui kuesioner dengan mengambil data, seperti tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Desa Congko Kecamatan Marioriwawo) seperti jumlah penduduk, sumber mata pencaharian, dan lain sebagainya.

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian Kuantitatif. Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah 641 Kepala Keluarga, yang terdiri atas 2 Dusun, yaitu Dusun Congko dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 387 dan Dusun Kampiri dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 254. Sedangkan sampel yang diteliti adalah 86 jumlah Kepala Keluarga dari 2 Dusun. Adapun Penelitian ini menggunakan metode *Stratified Random Sampling*. Jumlah sampel yang akan diambil dapat dihitung dengan menggunakan rumus dari slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{[1 + N (e)^2]}$$

4. HASIL PENELITIAN

Konsumsi terbesar Masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng lebih dominan pada makanan pokok yaitu padi-padian dengan jumlah persentase terbesar 35,24%. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo umumnya mengkonsumsi padi-padian dan mereka bekerja tidak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berikut adalah tabel pola konsumsi non makanan Masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo

Pola Konsumsi Non Makanan Masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo

No	Jenis Pengeluaran	Persentase (%)
1	Perumahan	0
2	Aneka barang dan jasa	7,57
3	Pendidikan	48,18
4	Kesehatan	4,96
5	Pakaian	23,11
6	Barang tahan lama	6,49
7	Pajak dan asuransi	4,26
8	Konsumsi Lain	5,25
Jumlah		100 %

Sumber Data : Data diolah tahun 2019

4.1 Pendapatan Masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo

Keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya kesenjangan. Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat maka indikator yang cukup baik adalah distribusi pendapatan masyarakat diantara golongan penduduk.

Berdasarkan hasil penelitian dari 86 responden yang ada, pendapatan Masyarakat tergantung dari lapangan usaha, pekerjaan, produktivitas, dan lain-

lain. Informasi mengenai pendapatan memiliki kendala yakni sebagian responden tidak terus terang dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya, sebagian ada yang melebihkan dan sebagian lagi ada yang mengurangi.

Untuk mengetahui distribusi pendapatan Masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng maka digunakan pendekatan pengeluaran, pada kenyatannya pendapatan masyarakat maka tingkat pengeluaran dan pendapatan berbanding lurus. Maka tingkat pendapatan masyarakat, maka akan semakin tinggi tingkat pengeluaran

Berikut digambarkan hasil penelitian dari 86 responden pendapatan dan pengeluaran konsumsi masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng :

Rata-rata Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Per Bulan

N o	Pendapatan	Frekuensi	Perseentase
1	0 – 500.000	1	1,16%
2	>500.000 – 1000.000	0	0%
3	>1000.000 – 1.500.000	28	32,56%
4	>1.500.000 –	49	56,98%

	2.000.000		%
5	≥ 2.000.000	8	9,30%
Jumlah		86	100%

Sumber : Data diolah tahun 2019

Pendapatan masyarakat hanya terbagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan masyarakat berpendapatan sedang dan golongan masyarakat berpendapatan rendah.

Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Rata-rata Tingkat Konsumsi Masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Per Bulan

N o	Konsumsi	Frekuensi	Persentase
1	0 – 500.000	0	0%
2	>500.000 – 1000.000		0%
3	>1000.000 – 1.500.000	21	24,42%
4	>1.500.000 – 2.000.000	49	56,98%
5	≥ 2.000.000	16	18,60%
Jumlah		86	100%

Sumber : Data diolah tahun 2019

4.2 Persamaan Regresi Sederhana

Output pengolahan data yang dapat menunjukkan persamaan regresi adalah pada tabel Coefficient. Pada tabel ini ditunjukkan nilai beta, nilai constanta, t hitung, dan signifikansi variabel uji regresi sederhana

Regresi Sederhana Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Standar error	Beta		
1	(Constant)	473705.878	121972.260		3.884	.000
	Tingkat Pendapatan	.883	.082	.763	10.808	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Konsumsi

4.3 Uji Statistik

a. Uji t (Parsial)

**Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	473705.878	121972.260		3.884	.000
Tingkat Pendapatan	.883	.082	.763	10.808	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Konsumsi

Determinasi

b. Uji Koefisien Korelasi dan

**Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.763 ^a	.582	.577	2.37240E5

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan

Hasil pengujian koefisien korelasi (R) dan determinasi (R²) pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,763. tingkat konsumsi masyarakat di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sedangkan sisanya 41,8%.

4.4 Pembahasan

Pengaruh tingkat pendapatan terhadap besarnya tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Soppeng Desa Congko Kecamatan Marioriwawo, telah dilakukan penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 86 responden.

Tingkat pendapatan masyarakat memberikan dampak yang lebih baik terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Hasil perhitungan uji t (parsial) dengan pengaruh tingkat pendapatan (X) terhadap besarnya tingkat konsumsi masyarakat (Y), diperoleh nilai t_{hitung}

sebesar 10,808 dan t_{tabel} sebesar 1,988 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa "Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Soppeng Desa Congko Kecamatan Marioriwawo".

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi memiliki hubungan yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian dari 86 responden menyatakan bahwa, tingkat pendapatan lebih baik dengan tingkat konsumsi masyarakat. Berdasarkan uji-t (parsial) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,808 dan t_{tabel} sebesar 1,988 dengan taraf signifikansi

sebesar 0,000. Oleh karena itu nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau 0,5%, sedangkan hasil pengujian korelasi dan determinasi sebesar 0,763 dan 0,582.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kab. Soppeng, 2017. Kecamatan Marioriwawo Dalam Angka Tahun 2017. Kabupaten Soppeng : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kab. Soppeng, 2017. Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Kabupaten Soppeng : Badan Pusat Statistik.

Hanum, N., 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol.1.

Mulyani, N., 2016. *Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Harapan Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komerin Ulu (OKU) Timur*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.

https://www.slideshare.net/mishelei_lo/en/distribusi_pendapatan

<http://junaidichaniago.wordpress.com>